

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL BPPK



ANALISIS EMPIRIS INKLUSIFITAS KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Azwar

Balai Diklat Keuangan Makassar, Indonesia. Email : azwar.iskandar@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
31 Maret 2017

Dinyatakan Dapat Dimuat
6 November 2017

KATA KUNCI:

inklusif,
keuangan,
syariah,
kesejahteraan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis inklusifitas keuangan syariah pada 33 provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder berbasis tahunan dari publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, penelitian ini mengestimasi inklusifitas keuangan syariah di Indonesia dengan metode Index for Syariah Financial Inclusion (ISFI) yang dikembangkan dari Sarma (2012) berdasarkan tiga dimensi pengukuran yaitu accessibility, availability dan usage of banking services. Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa indeks inklusifitas keuangan syariah di Indonesia secara umum tergolong rendah yaitu dengan average value sebesar 0,127. Pada tingkat provinsi, ditemukan bahwa Provinsi Bangka Belitung memiliki indeks inklusifitas tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Temuan ini bermakna bahwa kelompok masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal, khususnya, sebagai sumber keuangan dan pembiayaan utama, sehingga pengambil kebijakan perlu untuk meningkatkan availabilitas keuangan syariah dengan menambah dan memperluas layanan perbankan syariah di Indonesia khususnya pada kawasan timur Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis hubungan antara inklusifitas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui metode Product Moment Coefficient of Correlation, penelitian ini menemukan adanya korelasi positif dan signifikan antara inklusifitas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Umumnya, provinsi dengan Human Development Index (HDI) yang tinggi dan medium dapat dianalogikan relatif memiliki inklusi keuangan yang tinggi pula.

This paper analyzes the index of syariah financial inclusion across the 33 provinces in Indonesia. As the inclusiveness of a financial system depends on various criteria, an Index for Syariah Financial Inclusion (ISFI) has been constructed using a multidimensional approach. Using the annual secondary data from Bank Indonesia and Badan Pusat Statistik for three dimensions i.e. accessibility, availability and usage of banking services, ISFI has been computed for various provinces of Indonesia in period of 2010-2015. It is found that index of syariah financial inclusive in Indonesia generally still low with average value of 0.127. The province of Bangka Belitung is the most financially inclusive province of Indonesia. Further, the relationship between financial inclusion and human development index as proxy of welfare has been investigated. The empirical results show that the index of syariah financial inclusion and human development index are positively correlated with each other. It is observed that although various measures have been implemented to increase financial inclusion, a large population of Indonesia does not have access to formal financial system yet. Thus, the promotion of syariah financial inclusion should be a policy priority in Indonesia to achieve the central goals of inclusive growth, welfare and economic development.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi

intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat financial exclusion yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional. Survei Neraca Rumah Tangga (2011) oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non-lembaga keuangan sebesar 48 persen. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non-bank masih relatif sangat tinggi yaitu sekitar 52%. Sementara Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya 49 persen rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Kedua survei tersebut saling menguatkan fakta bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non-formal masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan.

Meskipun demikian, dengan segala permasalahan tersebut di atas, akses masyarakat kepada layanan keuangan di Indonesia sebenarnya tergolong moderat dibandingkan negara berkembang lainnya. Tingkat akses penduduk Indonesia pada layanan keuangan lebih besar dari dua emerging giants, India dan Cina, dan hanya sedikit di bawah Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Artinya, masih ada ruang untuk membuat sistem keuangan Indonesia lebih inklusif dan meraih keuntungan

sosial yang lebih besar (Bank Indonesia, 2014).

Mengingat pentingnya isu ini, pembahasan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Forum internasional seperti G20, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Alliance for Financial Inclusion (AFI), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Selain itu, keuangan inklusif juga telah masuk dalam prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi kerangka kerja, implementasi dan langkah ke depan pelaksanaan keuangan inklusif. Strategi nasional ini diharapkan menjadi jalan

terciptanya kolaborasi antarlembaga pemerintah dan pemangku kepentingan secara baik dan terstruktur.

Peran perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat memegang peranan yang vital dalam mewujudkan program nasional ini. Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia dan perbankan nasional baik dari sisi moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial. Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus juga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional. Perbankan dan industri keuangan syariah secara umum ditantang untuk memberikan perannya. Apalagi hal ini dikuatkan dengan hasil survei oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 yang menemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim, namun pada kenyataannya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih jauh dari maksimal. Berdasarkan survei tersebut ditemukan bahwa dari 100 orang penduduk muslim, hanya 8 orang yang memahami produk dan layanan keuangan syariah dan 11 orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan

lembaga jasa keuangan syariah¹. Rasio ini tentu saja menjadi catatan penting bagi upaya peningkatan peran perbankan dan industri keuangan syariah saat ini.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah², dalam Seminar Nasional Keuangan Inklusif tahun 2016 mengemukakan bahwa keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat unbanked, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Sementara prinsip syariah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui prinsip partnership dan profit sharing. Selain itu, saat ini berkembang juga beberapa pemikiran tentang Islamic Financial Inclusion khususnya terkait dengan pemanfaatan potensi dari kegiatan yang bernilai sosial. Sektor sosial Islam yang mencakup sistem zakat dan wakaf dengan potensi sekitar Rp 217 triliun (atau setara dengan 3,4 persen Produk Domestik Bruto Indonesia) dapat memainkan peran yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.

Lebih lanjut, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E. Siregar³, mengatakan bahwa di tahun-tahun akan datang, OJK memiliki beberapa sasaran arah pengembangan industri keuangan syariah, yaitu membuka akses masyarakat kurang mampu dalam rangka mendukung inklusi keuangan, menangkap potensi bertumbuhnya kelas menengah melalui penyediaan produk dan jasa keuangan yang variatif dan inovatif sesuai kebutuhan, dan harus berkontribusi pada pembiayaan jangka panjang dan sektor prioritas pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, mengingat peranan inklusifitas sektor keuangan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, kajian terkait inklusifitas keuangan syariah di Indonesia seyogyanya menjadi agenda yang sangat penting dan menarik untuk dilakukan baik oleh para peneliti dan pemegang kebijakan

terkait. Selain itu, kajian ilmiah yang berfokus pada pengukuran dan determinan inklusi keuangan syariah di Indonesia dirasakan masih sangat minim dan menjadi salah satu poin yang dapat menyebabkan upaya pemerintah dalam case ini menjadi kurang optimal karena pemahaman dan wawasan tentang dinamikanya relatif terbatas.

Untuk menjembatani gap tersebut di atas, penelitian ini mencoba menganalisis dan mengukur inklusifitas sektor keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menjadi berbeda dan terbaru dari penelitian-penelitian inklusifitas sektor keuangan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sarma (2012), Gupta et al. (2014) dan Sanjaya dan Nursechafia (2016) yang masih melihat dan mengkaji inklusifitas keuangan dalam konteks non-syariah (konvensional). Sementara, penelitian ini menggunakan cakupan yang lebih khusus yaitu pada sektor perbankan atau keuangan syariah. Bahkan, sejauh yang penulis ketahui, penelitian ini merupakan yang pertama yang mengukur dan menganalisis inklusifitas sektor keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, untuk mencari tahu bagaimana hubungan inklusifitas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan studi tersendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan ekonomi dan keuangan inklusif yang berbasis pada bukti dan temuan empiris.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana inklusifitas keuangan syariah pada 33 provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara inklusifitas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengukur dan menganalisis inklusifitas

¹ <http://infobanknews.com/tingkat-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-masih-minim/2/>

² <http://mysharing.co/keuangan-syariah-dan-keuangan-inklusi-bisa-bersinergi/>

³ <http://mysharing.co/ini-arah-pengembangan-keuangan-syariah-jelang-mea/>

keuangan syariah pada 33 provinsi di Indonesia;

2. Menganalisis hubungan antara inklusifitas keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

2. KERANGKA TEORITIS

Pada bagian ini peneliti menyajikan berbagai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan teori atau konsep terkait topik penelitian dan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.1. Inklusi Keuangan

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari oleh dampak krisis kepada kelompok the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya termasuk kategori unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Pada G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 sepakat akan perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework (Bank Indonesia, 2014).

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design product barrier (produk yang cocok) dan channel barrier (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

Meningkatkan efisiensi ekonomi.

Mendukung stabilitas sistem keuangan. Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance. Mendukung pendalaman pasar keuangan.

Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.

Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.

Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Sejak saat itu banyak forum-forum internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), AFI, Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia (Bank Indonesia, 2014).

Beberapa penelitian telah banyak meyakinkan para ekonom dan pengambil kebijakan di negara berkembang tentang dampak positif dari sektor keuangan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun demikian, masih belum ada definisi global dan baku dari keuangan inklusif yang menjelaskan apa sebenarnya inklusi keuangan itu sendiri. Berbagai studi dan institusi mencoba untuk mendefinisikannya, sebagai berikut:

Leyshon dan Thrift (1995) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan antitesis dari eksklusi keuangan. Proses eksklusi keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan dikarenakan kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan.

Global Partnership for Financial Inclusion (GPII-CGAP) Forum pada tahun 2012 mendefinisikan inklusi keuangan sebagai: "state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal

financial services rather than existing informal options”.

Menurut FATF, “financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”.

Reserve Bank of India (RBI) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai: “process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players”.

Sementara, dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif digambarkan sebagai kondisi dimana: “hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil” (Bank Indonesia, 2014).

Sejak tahun 2000-an, inklusi keuangan telah secara luas digunakan sebagai fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan dan bank sentral untuk membangun negaranya. Di India, inklusi keuangan menekankan pada proses untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem jasa keuangan and kredit yang memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangrajan Committee, 2008). Di Peru, Reyes (2010) mengungkapkan pentingnya perluasan akses bagi sebagai besar masyarakat terhadap portofolio produk dan jasa keuangan, seperti pinjaman, deposito, asuransi, pensiun, sistem pembayaran, serta mekanisme pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen.

Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan

(Hadad, 2010). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014). Sederhananya, beberapa penelitian yang ada saat ini telah menghubungkan paling tidak tiga poin inklusi keuangan yaitu akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan (Demirgüç-Kunt et al., 2008; Sarma dan Pais, 2008; Sarma, 2008; Demirgüç-Kunt dan Klapper, 2012).

Dari berbagai belahan dunia, untuk meningkatkan financial inclusion dan menurunkan financial exclusion, dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania dan melalui berbagai program terpisah, misalnya edukasi keuangan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Strategi keuangan inklusif di Indonesia bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

2.2. Indikator Inklusi Keuangan

Bank Indonesia menetapkan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks

multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) dari layanan perbankan.

Dimensi akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.). Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa; (2) jumlah ATM per 10.000 penduduk dewasa; (3) jumlah kantor bank per 1.000 km²; dan (4) jumlah ATM per 1.000 km².

Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari deposito, giro dan tabungan per 1.000 penduduk dewasa; dan (2) jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa.

Sedangkan dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang concern dalam pengembangan keuangan inklusif sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta tools yang dipergunakan. Secara umum The Alliance for Financial Inclusion (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas (conciseness), spesifik (specifity), sederhana (simplicity), adanya perbaikan (improvement), dan client perspective.

Sementara dalam literatur lainnya, seperti pada Sarma (2012), Gupta et. al. (2014), Sanjaya dan Nursechafia (2016), menggunakan indikator atau dimensi pengukuran pada metode perhitungan Index Financial Inclusion (IFI) berupa aksesibilitas (penetration), availabilitas (availability) dan penggunaan jasa perbankan (usage of banking services). Dimensi penetrasi diwakili oleh jumlah rekening deposit per 1.000 jumlah orang dewasa, dimensi availabilitas diwakili oleh jumlah bank outlets per 1000 jumlah penduduk dan/atau jumlah ATM per 1000 jumlah penduduk, dan dimensi penggunaan diwakili oleh rasio volume dari two basic services of the banking system yaitu credit dan deposit dari jumlah penduduk dewasa terhadap nilai Gross Domestic Product (GDP). IFI yang rendah ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah, sedangkan kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi.

2.3. Inklusi Keuangan dan Kesejahteraan

Studi empiris menunjukkan hubungan positif antara perkembangan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Levine, 2005). Pada regresi dengan menggunakan sampel antarnegara (cross-country regression), Demircuc-Kent, Beck dan Honohan (2008) mengukur dampak perkembangan intermediasi keuangan terhadap masyarakat miskin dan kesenjangan pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan memberikan dampak positif terhadap (i) menurunnya kesenjangan pendapatan (koefisien Gini), (ii) peningkatan pendapatan masyarakat yang sangat miskin, dan (iii) menurunnya persentase populasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Demircuc-Kunt, Beck dan Honohan (2008) mengungkapkan bahwa akses keuangan pro-poor menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan lebih cepat.

Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad dalam Sanjaya dan Nursechafia, 2016). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa

keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014).

Pembangunan sektor keuangan, terutama sektor perbankan, dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha. Akibatnya, ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat (Allen et al., 2012).

Terdapat program transisi untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menggunakan kredit mikro untuk pembiayaan mikro. Pada prosesnya, inklusifitas keuangan menawarkan sejumlah jasa keuangan yang lebih luas termasuk kredit, simpanan, transfer uang, dan asuransi (Robinson, 2001, Armendariz dan Murdoch, 2010). Dengan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik, konsep inklusi keuangan menjadi sangat penting untuk diimplementasikan.

Inklusi keuangan harus didukung dengan analisis empiris tentang bagaimana mengukur inklusi keuangan pada indikator ekonomi agregat. Lebih jauh lagi, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada pertumbuhan ekonomi dan akhirnya menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Untuk menerapkannya, maka database Indonesia tentang inklusi keuangan dapat membantu mengembangkan kapasitas statistik lokal. Di samping itu, perbandingan antara indikator inklusi keuangan dan ditingkatkan antar ekonomi dan antar waktu (Sanjaya dan Nursechafia, 2016).

2.4. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan inklusi keuangan dan

faktor-faktor yang memengaruhinya, beberapa penelitian mencoba untuk mengukur sejauh mana inklusi keuangan yang terdapat pada beberapa negara.

Honohan (2008) menggunakan pendekatan ekonometrika dari gabungan data survey based dan secondary data untuk mengestimasi proporsi rumah tangga yang dapat mengakses pelayanan atau jasa keuangan formal di 160 negara di dunia. Honohan menemukan bahwa indeks akses keuangan mempengaruhi secara signifikan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan.

Wachira dan Kihiu (2012) telah melakukan studi tentang pengaruh literasi keuangan terhadap akses jasa keuangan di Kenya pada tahun 2009, ternyata akses terhadap jasa keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan tetapi lebih besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jarak dari bank, usia, status perkawinan, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan tingkat pendidikan.

Adapun studi Beck et al. (2007) di 99 negara pada tahun 2003-2004 menunjukkan bahwa faktor yang menentukan jangkauan sektor keuangan sama dengan faktor yang menentukan kedalaman sektor keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat dari pembangunan yang diprosikan dengan GDP per kapita, kualitas institusi yang diprosikan dengan governance index, serta informasi kredit yang diprosikan dengan credit information index.

Van der Werff et al. (2012), dalam studinya di 31 negara OECD tahun 2011, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi proporsi populasi yang mengakses perbankan adalah ketimpangan pendapatan, jumlah ATM dan bank per 100.000 populasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diprosikan dengan corruption index dan GNI per kapita. Inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

Ummah (2013), dengan menggunakan perhitungan Index of Financial Inclusion yang dikembangkan oleh Sarma (2008) penelitiannya menemukan bahwa delapan negara di Asia yang diteliti dari tahun 2004-2011, Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi yaitu 0.9 dan 0.5, sedangkan Pakistan berada di posisi terendah dengan indeks rata-rata sebesar 0.1. Regresi Tobit digunakan untuk melihat faktor

pembangunan yang memengaruhi inklusi keuangan. Hasil yang diperoleh adalah tingkat pendapatan per kapita dan jumlah populasi di desa memengaruhi inklusi keuangan. Sedangkan pengangguran tidak signifikan memengaruhi inklusi keuangan.

Demirguc-Kent dan Klapper (2012), dalam penelitiannya yang mengukur penggunaan produk keuangan usia dewasa (level mikro) pada 148 negara pada tahun 2011 menemukan bahwa 50% orang dewasa di seluruh dunia (sampel) menggunakan jasa keuangan formal, dan lebih dari 2,5 milyar orang dewasa di seluruh dunia tidak memiliki akun jasa keuangan formal. Namun demikian, informasi parsial dan tidak lengkap dari analisis tingkat mikro dapat menyebabkan adanya mis-interpretasi tentang sejauh mana inklusi keuangan pada perspektif makro.

Sarma (2012) mengembangkan metode perhitungan Index Financial Inclusion (IFI) yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan antar negara atau provinsi dalam sebuah negara pada periode waktu tertentu. Metode ini memenuhi asumsi komparabilitas, properti matematika, dan tiga dimensi (aksesibilitas, availabilitas, dan penggunaan jasa perbankan). IFI yang rendah ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah, sedangkan kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi.

Gupta et. al. (2014) mengukur Index for Financial Inclusion (IFI) pada 28 negara bagian dan 6 regions di India menggunakan dimensi : penetration, availability dan usage of banking services, menemukan secara empiris bahwa indeks inklusi keuangan dan indek pembangunan manusia sebagai proksi

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Deskripsi	Indikator
I. Analisis Pengukuran Inklusi Keuangan Syariah			
1.	aksesibilitas (D ₁)	Mengukur penetrasi keuangan syariah pada masyarakat miskin (Sarma, 2012).	Rasio jumlah DPK perbankan Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dalam jutaan rupiah per 1.000 penduduk miskin dewasa dihitung dengan rumus : $D_1 = \frac{\text{Jumlah DPK perbankan syariah (tahun}_t\text{)}}{\text{Jumlah penduduk (tahun}_t\text{)}} \times 1.000$
2.	availabilitas (D ₂)	Mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal syariah oleh masyarakat miskin (Sarma, 2012).	Rasio jumlah kantor layanan bank syariah meliputi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 100.000 penduduk miskin dewasa dihitung dengan rumus : $D_2 = \frac{\text{Jumlah kantor layanan bank syariah (tahun}_t\text{)}}{\text{Jumlah penduduk (tahun}_t\text{)}} \times 100.000$
3.	penggunaan (D ₃)	Mengukur sejauh mana penggunaan jasa keuangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa pembiayaan (financing) syariah (Sarma, 2012).	Rasio jumlah pembiayaan (financing) Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam milyar rupiah dihitung dengan rumus : $D_3 = \frac{\text{Jumlah pembiayaan (financing) syariah (tahun}_t\text{)}}{\text{Nilai PDRB (tahun}_t\text{)}} \times 1.000$
II. Analisis Korelasi (Hubungan) Inklusi Keuangan Syariah dan Kesejahteraan			
1.	Indeks Inklusi Keuangan Syariah	Nilai indeks hasil perhitungan inklusi keuangan syariah.	
2.	Human Development Index (HDI)	Nilai Indeks Pembanguana Manusia (rasio) sebagai proksi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.	

kesejahteraan masyarakat di India memiliki hubungan (korelasi) yang positif. Oleh karena itu, mereka menekankan prioritas kebijakan pemerintah India untuk mencapai pertumbuhan inklusif, pembangunan manusia dan ekonomi. Sanjaya dan Nursechafia (2016) dalam penelitiannya mengukur dan menganalisis tingkat inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia menemukan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data dan Variabel Penelitian Penelitian ini menggunakan data sekunder berbasis tahunan yaitu tahun 2010-2015 pada 33 provinsi di Indonesia yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia.

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan metode Indeks Inklusi Keuangan atau Index of Financial Inclusion (IFI) yang dikembangkan oleh Sarma (2012) dalam menganalisis dan mengukur inklusi keuangan syariah di Indonesia, maka variabel penelitian yang digunakan mengacu pada dimensi pengukuran IFI yaitu aksesibilitas (d_1), availabilitas (d_2), dan penggunaan (d_3). Adapun terkait dengan analisis determinan terhadap inklusi keuangan serta dampak terhadap kesejahteraan, penelitian ini menggunakan beberapa faktor atau variabel yang dipilih yaitu jumlah penduduk miskin, jumlah kantor cabang bank, dan pendapatan daerah (PDRB). Definisi operasional seluruh variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

3.2. Metode Analisis

Kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Model dan teknik analisis yang digunakan dibedakan berdasarkan pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjawab pertanyaan pertama, penelitian ini menggunakan model analisis Pengukuran Index of Financial Inclusion (IFI) yang digunakan oleh Sarma (2012). Metode

ini digunakan karena menyajikan pengukuran komprehensif yang robust dan dapat dibandingkan antarprovinsi.

Secara detail, langkah dari metode ini dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, kita menentukan nilai indeks inklusi setiap dimensi (d_i) menggunakan rumus berikut:

$$= \frac{-}{-}$$

di mana:

- w_i : weight attached untuk dimensi i
- D_i : nilai aktual dimensi i
- m_i : batas terendah nilai dimensi i
- M_i : batas tertinggi nilai dimensi i

Pada penelitian ini, bobot yang digunakan (weight attached) untuk seluruh dimensi bernilai sama ($w_i = 1$). Dengan merujuk ke metode yang digunakan oleh Sarma (2012), penelitian ini mengasumsikan bahwa seluruh dimensi memiliki prioritas yang sama, sehingga bobot nilai nya adalah w_i

$= 1$ untuk seluruh i . Nilai dimensi yang mendekati w_i menunjukkan area dengan capaian tertinggi pada seluruh dimensi.

Sarma (2012) secara empiris melakukan pengamatan batas minimum terendah dan batas maksimum tertinggi. Tidak seperti dimensi pembangunan manusia (human development), hal ini agak sulit untuk mengukur batas bawah dan batas atas inklusi keuangan. Namun demikian dikarenakan tidak adanya hasil outlier dalam kasus Indonesia, titik M_i mewakili nilai maksimum dari data yang tersedia yang merupakan batas maksimum untuk setiap dimensi, sedangkan m_i merepresentasikan batas terendah.

Kedua, menentukan nilai X_1 dan X_2 dengan menggunakan rumus di bawah ini:

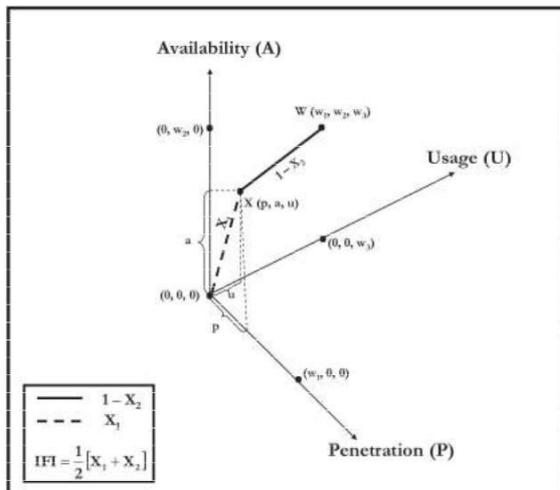
$$= \frac{\begin{array}{cc} \text{---} & \text{---} \\ + & + \\ \text{---} & \text{---} \end{array}}{\begin{array}{cc} + & + \end{array}}$$

$$= \frac{(-) + (-) + (-)}{+ +}$$

Ketiga, menentukan nilai IFI sebagai nilai rata-rata sederhana dari X_1 dan X_2 dengan rumus berikut:

$$= \frac{1}{2} [+]$$

Gambar 1 berikut menunjukkan bagaimana inklusi keuangan terjadi :



Gambar 1. Vektor Inklusi Keuangan
Sumber : Sarma (2012)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai indeks dari setiap dimensi terletak antara 0 dan w_i . Nilai di yang lebih tinggi mengindikasikan lebih banyak titik ideal pada dimensi ke i . Titik $X = (d_1, d_2, d_3)$ menunjukkan pencapaian inklusi keuangan pada sebuah provinsi. Kemudian pada ruang dimensi, point $O = (0, 0, 0)$ merepresentasikan situasi yang terburuk, sedangkan titik $W = (w_1, w_2, w_3)$ – di mana w_1, w_2 , dan w_3 adalah bobot setiap dimensi – yang mewakili situasi paling ideal untuk seluruh dimensi (Sarma, 2012).

Dengan titik $W = (1,1,1)$, maka rumus akhir dari IFI adalah sebagai berikut:

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{+ +}{\sqrt{3}} + 1 - \frac{(1 -) + (1 -) + (1 -)}{\sqrt{3}} \right]$$

Rumus IFI didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai X_1 dan X_2 yang

merepresentasikan posisi antara titik paling buruk dan titik ideal.

Hasil pengukuran IFI dibagi menjadi tiga kategori: (i) IFI rendah jika nilai IFI kurang dari 0,3; (ii) IFI medium jika nilai IFI berada di antara 0,3 dan 0,6, dan (iii) IFI tinggi jika nilai IFI antara 0,6 dan 1 (Sarma, 2012).

- Untuk menjawab pertanyaan kedua penelitian, peneliti menggunakan metode analisis Korelasi Pearson berupa Product Moment Coefficient of Correlation, mengingat data variabel model yang digunakan berbentuk rasio. Metode ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Gupta et. al.

(2014), dengan formula:

$$= \frac{\sum - \sum \sum}{\sum - (\sum) \cdot \sum - (\sum)}$$

dimana :

- r : nilai korelasi pearson
- X : average variabel Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IFIS)

Y : average variabel Human Development Index (HDI)

n : jumlah sampel

Selain itu, untuk memperkuat hasil analisis hubungan antara inklusifitas keuangan dan indeks pembangunan manusia, penelitian ini juga menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan tersebut secara grafis.

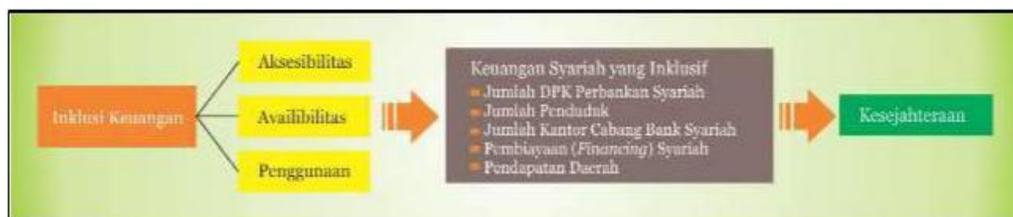
3.3. Kerangka Pemikiran

Pengukuran inklusifitas (inclusiveness) pada sektor keuangan syariah dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Index of Financial Inclusion (IFI) pada perbandingan 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Dalam indeks yang disajikan dalam penelitian ini, IFI dibangun dengan menggunakan dimensi aksesibilitas, availibilitas jasa perbankan, dan penggunaan sistem perbankan. Dikarenakan sektor keuangan menjadi hal utama dalam sistem ekonomi Indonesia, sistem keuangan sering digunakan sebagai pintu masuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Dengan

melakukan pengukuran pada IFI pada database provinsi di Indonesia, maka data tersebut dapat membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan reformasi dengan baik untuk mendorong desain kebijakan dengan lebih kuat

berdasarkan temuan empiris sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan bernegara (Lihat Gambar)



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1. Inklusi Keuangan Syariah

Terdapat program transisi untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menggunakan kredit mikro untuk pembiayaan mikro. Pada prosesnya, inklusifitas keuangan menawarkan sejumlah jasa keuangan yang lebih luas termasuk kredit, simpanan, transfer uang, dan asuransi (Robinson, 2001, Armendariz dan Murdoch, 2010). Dengan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik, konsep inklusi keuangan menjadi sangat penting untuk diimplementasikan.

Inklusi keuangan harus didukung dengan analisis empiris tentang bagaimana mengukur inklusi keuangan pada indikator ekonomi agregat. Lebih jauh lagi, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada pertumbuhan ekonomi dan akhirnya menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Untuk menerapkannya, maka database Indonesia tentang inklusi keuangan dapat membantu mengembangkan kapasitas statistik lokal. Di samping itu, perbandingan antara indikator inklusi keuangan dan ditingkatkan antar ekonomi dan antarwaktu.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Dimensi Inklusi Keuangan (D)

Dimensi Aksesibilitas (D ₁)							
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
Min	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
Max	131.26	151.04	195.11	248.43	269.19	273.65	211.45
Ave.	8.36	10.29	14.23	17.74	18.98	19.29	14.82
Stdev.	22.75	26.34	34.24	43.13	46.66	47.46	36.76
Dimensi Availabilitas (D ₂)							
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
Min	-	-	-	-	-	-	-
Max	0.29	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31
Ave.	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
Stdev.	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
Dimensi Penggunaan (D ₃)							
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
Min	1.519379	2.52716	2.952273	3.773752	3.186194	2.551185	2.75
Max	3341.919	4129.473	4748.192	5024.911	5117.371	5452.086	4635.66
Ave.	360.4269	414.8972	615.2478	641.5791	579.093	660.0283	545.21
Stdev.	657.326	827.1698	1058.599	1067.032	996.0246	1144.744	958.48

Sumber : Hasil Olah Data

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif tiga dimensi pengukuran inklusi keuangan pada 33 provinsi di Indonesia yang telah diestimasi pada tahun 2010-2015. Hasilnya menunjukkan beberapa indikator seperti: minimum (Min), maksimum (Max), rata-rata (Ave.), dan standar deviasi.

Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Proporsi dari populasi yang memiliki rekening bank merupakan sebuah ukuran untuk penetrasi perbankan. Salah satu variabel yang dapat mencerminkan ukuran ini adalah jumlah DPK di

rata 211 juta rupiah per 1000 penduduk (Lihat Grafik 1 pada Lampiran 1).

Selain penetrasi perbankan, ukuran lain dalam sistem keuangan yang inklusif adalah ketersediaan jasa perbankan. Ukuran ini menggambarkan jangkauan jasa perbankan sehingga masyarakat dapat mengakses jasa keuangan di mana pun berada. Indikator dari ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah outlet (baik itu kantor, kantor cabang, ATM, dan sebagainya). Dalam penelitian ini, ketersediaan jasa perbankan diukur dengan jumlah kantor layanan bank syariah meliputi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 100.000 penduduk. Pada tahun 2010-2015, rata-rata jumlah perbankan

Tabel 3
Statistik Deskriptif Indeks Inklusi Keuangan Syariah (d)

Indeks Aksesibilitas (d ₁)						
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Min	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Max	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ave	0.0636	0.0680	0.0728	0.0713	0.0704	0.0704
Stdev.	0.1734	0.1744	0.1755	0.1736	0.1734	0.1735
Indeks Availabilitas (d ₂)						
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Min	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Max	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ave	0.1813	0.1666	0.1794	0.1861	0.1855	0.1781
Stdev.	0.2284	0.2152	0.2180	0.2167	0.2157	0.2125
Indeks Penggunaan (d ₃)						
Stat.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Min	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Max	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Ave	0.1074	0.0999	0.1290	0.1270	0.1126	0.1206
Stdev.	0.1968	0.2004	0.2231	0.2125	0.1948	0.2101

Sumber : Hasil Olah Data

bank per 1000 penduduk dewasa. Penelitian ini menggunakan rasio nilai DPK pada perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap 1000 penduduk. Pada tahun 2010-2015, rata-rata total jumlah DPK perbankan syariah per 1000 penduduk secara total di Indonesia adalah sekitar 14,82 juta rupiah (Lihat Tabel 2). Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata jumlah DPK pada perbankan syariah tertinggi dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-

syariah untuk melayani setiap 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebesar 0,05 unit atau dengan kata lain tersedia 5 unit untuk melayani 10 juta penduduk (Lihat Tabel 2). Jumlah ini tentu saja merupakan jumlah yang sangat minim terkait dengan ketersediaan layanan perbankan syariah di daerah. Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi teratas tingkat ketersediaan layanan perbankan syariah dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 0,30 unit per 100.000 penduduk atau 3 unit

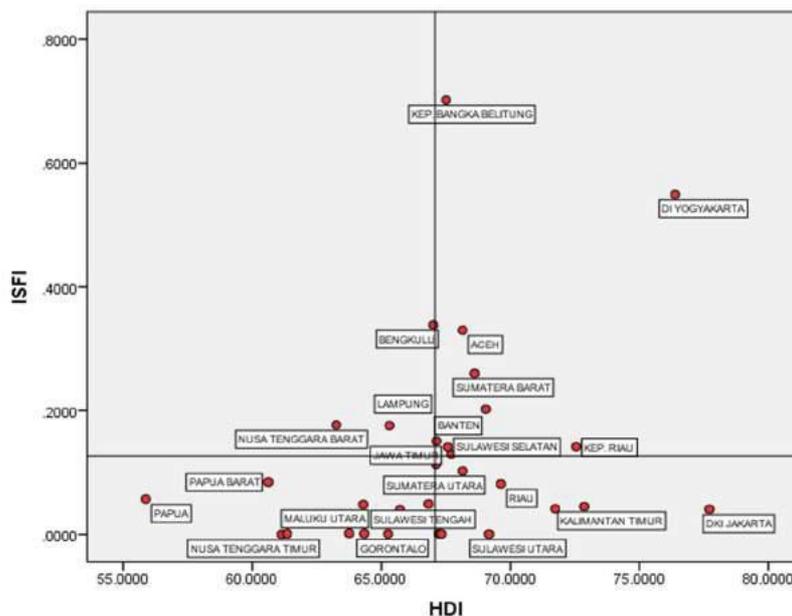
per 1 juta penduduk (Lihat Grafik 2 pada Lampiran 2).

Selanjutnya, memiliki rekening di bank tidaklah cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif. Keberadaan jasa keuangan pun harus memiliki cukup manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dapat dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa kredit, deposito, pembayaran, remitansi, transfer, dan lain-lain. Oleh karena itu, indikator penggunaan ini harus dimasukkan ke dalam pengukuran sistem keuangan yang inklusif. Dalam penelitian ini, indikator penggunaan dilihat dari proporsi jumlah pembiayaan (financing) syariah oleh perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap nilai PDRB pada tiap provinsi selama Tahun 2010-2015. Hasil estimasi menemukan bahwa rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah pada periode penelitian di Indonesia adalah sebesar 545 miliar rupiah (Lihat Tabel 2). Tidak jauh berbeda dengan dimensi aksesibilitas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menempati posisi tertinggi dalam penggunaan jasa perbankan syariah oleh masyarakat (Lihat Grafik 3 pada Lampiran 3).

Dari proporsi Indeks Inklusi Keuangan tiga dimensi pada Tabel 3 di atas, dimensi availabilitas memiliki nilai rata-rata (average)

yang paling tinggi selama periode tahun 2010-2015, diikuti oleh penggunaan kemudian aksesibilitas. Hasil ini mengindikasikan bahwa inklusi keuangan syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi availabilitas dan penggunaan. Sementara dimensi availabilitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Selain availabilitas, dimensi penggunaan juga menunjukkan nilai indeks yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memberikan peran intermediasinya kepada masyarakat melalui pembiayaan syariah di berbagai bidang, sektor dan penggunaan.

Pada banyak provinsi, proporsi jumlah penduduk memiliki potensi untuk mencapai aksesibilitas yang tinggi pada sistem keuangan syariah dengan tersedianya berbagai kantor layanan syariah (availabilitas), namun mereka tidak menggunakan layanan yang ada dengan baik dikarenakan adanya kendala berupa kantor cabang yang tidak dapat dijangkau dikarenakan tempat tinggal yang begitu terpencil serta kendala fisik dan psikologis. Beberapa literatur telah mengungkapkan bahwa jasa-jasa tersebut tidak digunakan dengan baik, walaupun masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan (Sarma, 2012). Akibatnya, tingkat rata-rata indeks inklusi keuangan syariah dari dimensi aksesibilitas yang diukur dari rasio



Sumber : Hasil Olah Data
Grafik 7. Scatter Plot nilai ISFI dan HDI pada 33 Provinsi di Indonesia

jumlah DPK perbankan baik pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 1.000 penduduk miskin dewasa relatif rendah.

Dalam statistik perbankan syariah di Indonesia, kita dapat menemukan bahwa meskipun kantor layanan bank syariah di 33 provinsi di Indonesia telah berdiri dan beroperasi (Lihat Grafik 4 pada Lampiran 4), tetapi jumlah DPK yang mencerminkan kepemilikan rekening baik tabungan maupun deposito masyarakat pada perbankan syariah masih belum merata di seluruh Indonesia. Grafik 5 (Lampiran 5) menunjukkan bahwa pada banyak provinsi di Kawasan Timur Indonesia, penggunaan jasa perbankan syariah dari nilai DPK masih relatif jauh lebih rendah daripada provinsi yang berada pada Kawasan Barat Indonesia.

Seperti yang diindikasikan oleh nilai dimensi aksesibilitas yang rendah, avaiibilitas yang tinggi cenderung tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan formal sebagai sumber utama pembiayaan. Daripada menggunakan fasilitas perbankan formal, masyarakat cenderung menggunakan jasa keuangan informal. Peran yang dominan institusi keuangan non-formal di Indonesia, khususnya pada daerah terpencil, mengindikasikan bahwa pasar keuangan syariah di Indonesia tidak berfungsi dengan baik.

Selanjutnya, pada analisis ISFI Syariah pada 33 provinsi di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa Provinsi Kep. Bangka Belitung dikategorikan sebagai provinsi dengan IFI yang tinggi (hijau) dengan nilai average ISFI selama periode 2010-2015 sebesar 0,702. Bahkan pada tahun 2010, provinsi ini mencatat nilai ISFI yang sangat tinggi yaitu sebesar 0,726. Provinsi dengan nilai IFI medium (kuning) adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu dan Aceh. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya tergolong pada tingkat IFI rendah (cokelat) diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan lainnya (Lihat Tabel 4 pada Lampiran 7).

Sebagaimana ditunjukkan oleh total rata-rata ISFI di Indonesia yaitu sebesar 0,127,

Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah selama periode penelitian. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 (Lampiran 7), sebagian besar provinsi di Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah. Beberapa provinsi yang memiliki nilai ISFI rendah yang relatif konsisten pada tahun 2010-2015 adalah umumnya provinsi di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan sebagian Sumatera. Saat banyak pihak sepakat tentang kebijakan dasar yang penting bagi inklusifitas dan penurunan kemiskinan, beberapa literatur baru telah mengidentifikasi hubungan antara inklusi keuangan dan pembangunan (Sarma, 2008). Beberapa determinan utama pembangunan yang digunakan dalam literatur-literatur tersebut berhubungan dengan perbaikan sektor keuangan. Lebih lanjut, meskipun hanya satu provinsi dengan ISFI yang tinggi, tetapi Indonesia secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan optimis dalam hal inklusifitas sektor keuangan syariah selama periode tersebut. Terdapat level transisi pada sebagian besar provinsi di Indonesia dari ISFI yang rendah ke ISFI yang tinggi (Lihat Grafik 6 pada Lampiran 6).

4.2. Inklusi Keuangan dan Kesejahteraan Dalam mengukur hubungan antara indeks inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari nilai Human Development Index, penelitian ini mengestimasi hubungan tersebut dengan pearson correlation.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa para periode 2010-2015, average inklusi keuangan syariah pada 33 provinsi di Indonesia berkorelasi positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.288 dengan signifikansi 0.052 (lebih kecil dari alpha 0.1) menunjukkan adanya hubungan yang nyata di antara keduanya. Artinya, ketika inklusi keuangan syariah naik, maka kesejahteraan masyarakat juga cenderung akan meningkat. Dengan kata lain, daerah yang memiliki indeks keuangan inklusif yang tinggi, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pula (Lihat Tabel 5 pada Lampiran 8).

Berdasarkan scatter plot di atas, penelitian ini mematok titik pada nilai ISFI dan HDI pada masing-masing 33 provinsi tersebut. Umumnya, provinsi dengan HDI yang tinggi dan medium dapat dianalogikan relatif memiliki inklusi

keuangan yang tinggi pula. Provinsi Kep. Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Aceh yang memiliki nilai ISFI yang tinggi juga memiliki nilai HDI di atas rata-rata. Sama halnya dengan provinsi yang memiliki ISFI yang rendah juga memiliki HDI yang relatif rendah di bawah rata-rata seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan lainnya.

5. KESIMPULAN

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah selama periode penelitian. Secara umum, inklusi keuangan syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi availabilitas dan penggunaan. Sementara dimensi availabilitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Temuan ini bermakna bahwa kelompok masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal, khususnya, sebagai sumber keuangan dan pembiayaan utama. Sehingga, pengambil kebijakan perlu untuk meningkatkan availabilitas keuangan syariah dengan menambah dan memperluas layanan perbankan syariah di Indonesia khususnya pada kawasan timur Indonesia. Selain itu, dari hasil analisis kuantitatif, penelitian ini juga menemukan bahwa Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI) dan Human Development Index (HDI) memiliki hubungan yang positif dan signifikan satu sama lain. Umumnya, provinsi dengan HDI yang tinggi dan medium dapat dianalogikan relatif memiliki inklusi keuangan yang tinggi pula. Sama halnya dengan provinsi yang memiliki IFI yang rendah juga memiliki HDI yang relatif rendah seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan lainnya.

Dalam mengukur inklusifitas keuangan syariah pada dimensi pengukuran availabilitas, penelitian ini hanya menggunakan data jumlah Bank Pembiayaan Syariah pada 33 provinsi di Indonesia mengingat keterbatasan data yang dapat diperoleh. Pada penelitian berikutnya, disarankan untuk menggunakan data perbankan yang lebih lengkap yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta lingkup keuangan syariaah yang dilebih luas diluar perbankan seperti obligasi syariah, saham syariah dan lainnya. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk memperhitungkan indikator

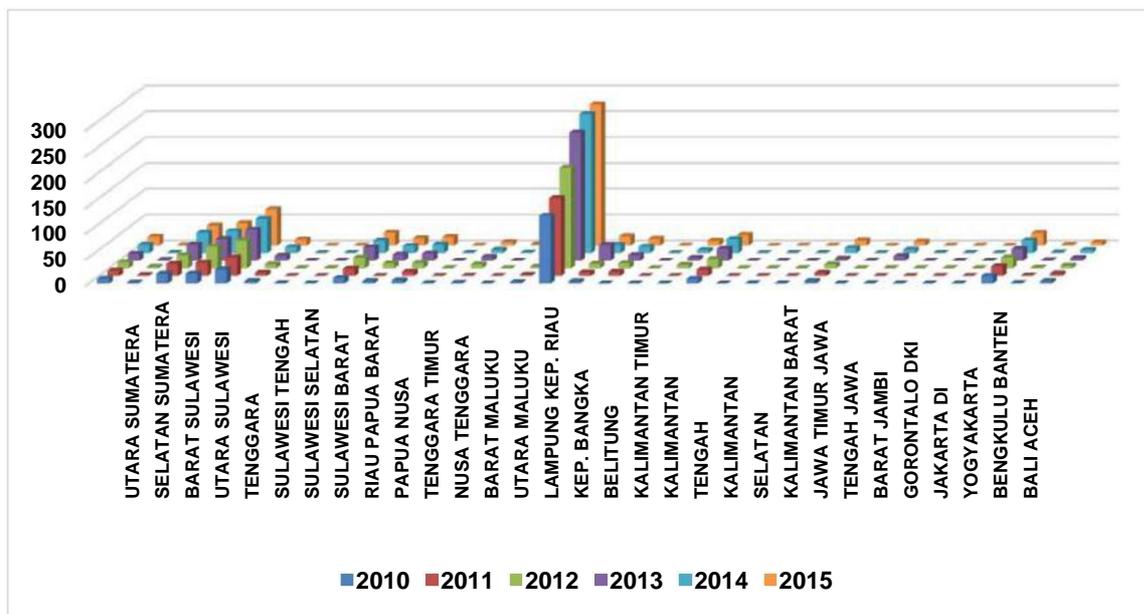
pengukuran atau parameter lainnya seperti affordability, timeliness dan quality of banking services serta new technological advances in banking sector seperti mobile banking dan internet banking. Selain itu, penelitian ini juga belum mengukur determinan pembentukan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia sehingga penting untuk menjadi agenda penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen et al. 2012. *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts*. Policy Research Working paper 6290, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank.
- Armendariz, B. and J. Morduch. (2010). *The Economics of Microfinance*. 2nd Edition. London: The MIT Press.
- Asian Development Bank (ADB). (2011). *Key Indicators for Asia and the Pasific 2011: Framework for Inclusive Growth Indicators, Special Supplement*. Manila: ADB.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Financial Inclusion*. Jakarta: Bank Indonesia
- Beck et al. (2007). *Finance, Inequality and the Poor*. *Journal of Economic Growth*. 12, 27-49.
- Demirgüç-Kunt, A. and L. Klapper. (2012). *Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database*. Policy Research Working Paper, 6025.
- Demirgüç-Kunt, A., T. Beck and P. Honohan. (2008). *Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report.
- Gupta, Anurag, et al. (2014). *Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India*. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, United Kingdom Vol. II, Issue 5, 2014
- Honohan, P. (2008) *Cross-Country Variation in Household Access to Financial Services*. *Journal of Banking and Finance* 32: 2493-2500
- Leyshon, A., & Thrift, N. (1995). *Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States*. *JSTOR, New Series*, Vol. 20, No. 3 , 312-241.
- Rangarajan Committee. (2008). *Report of the*

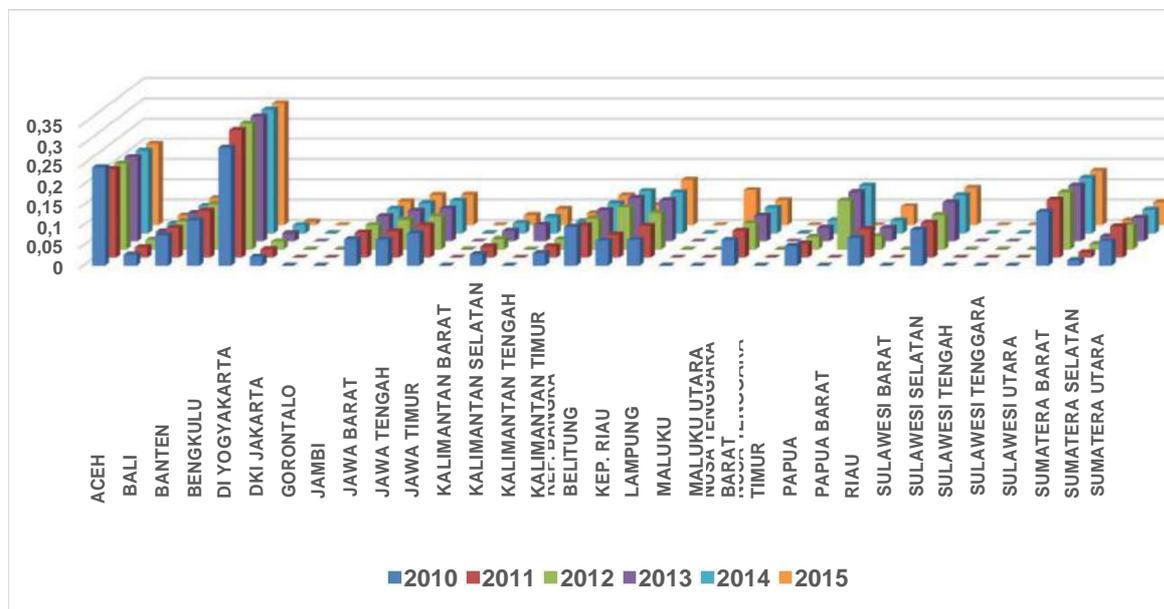
- Committee on Financial Inclusion.
Government of India.
- Reyes, G. P. (2010). *Financial Inclusion Indicators for Developing Countries: The Peruvian Case*. Peru: Superintendency of Banking.
- Robinson, M.S. (2001). *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*. Washington: The World Bank.
- Sanjaya, I Made dan Nursechafia. (2016). *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016
- Sarma, M. (2008). *Index of Financial Inclusion*. ICRIER Working Paper, 215.
- Sarma, M., and J. Pais. (2008). *Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis*. Paper Presented at the Conference on Equality, Inclusion and Human Development organized by HDCA and IHD, New Delhi.
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No.7, p.1-34.
- Ummah, Bintang Badriatul. (2013). *Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan dengan Pembangunan di Asia*. Skripsi : Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Van der Werff et al. (2012). *A Cross-country analysis of financial inclusion within the OECD*. *Consumer Interest Annual Volume* 59.

Lampiran 1



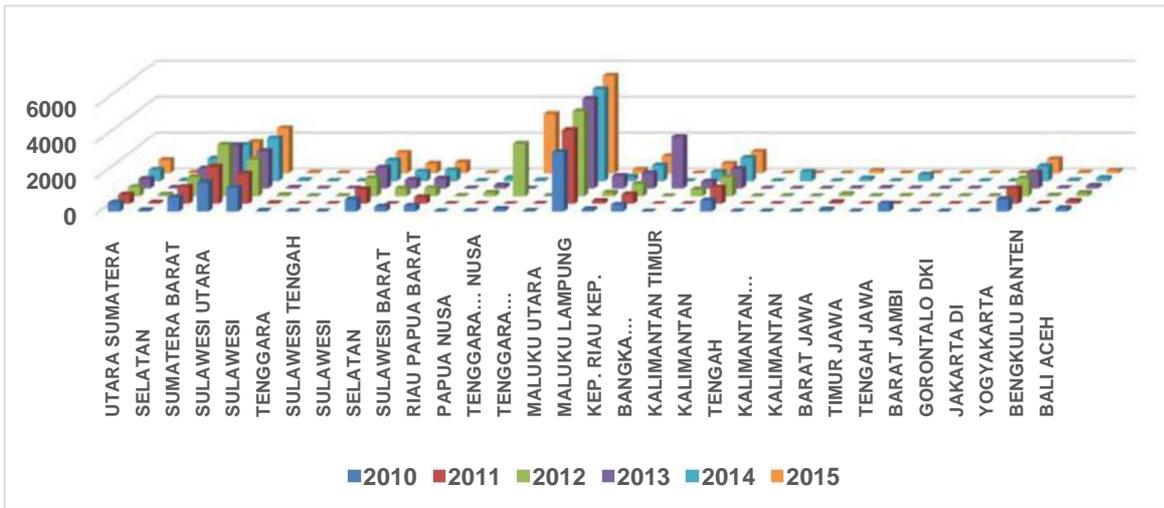
Sumber : Hasil Olah Data
Grafik 1. Dimensi Aksesibilitas (D_1) pada 33 Provinsi di Indonesia

Lampiran 2



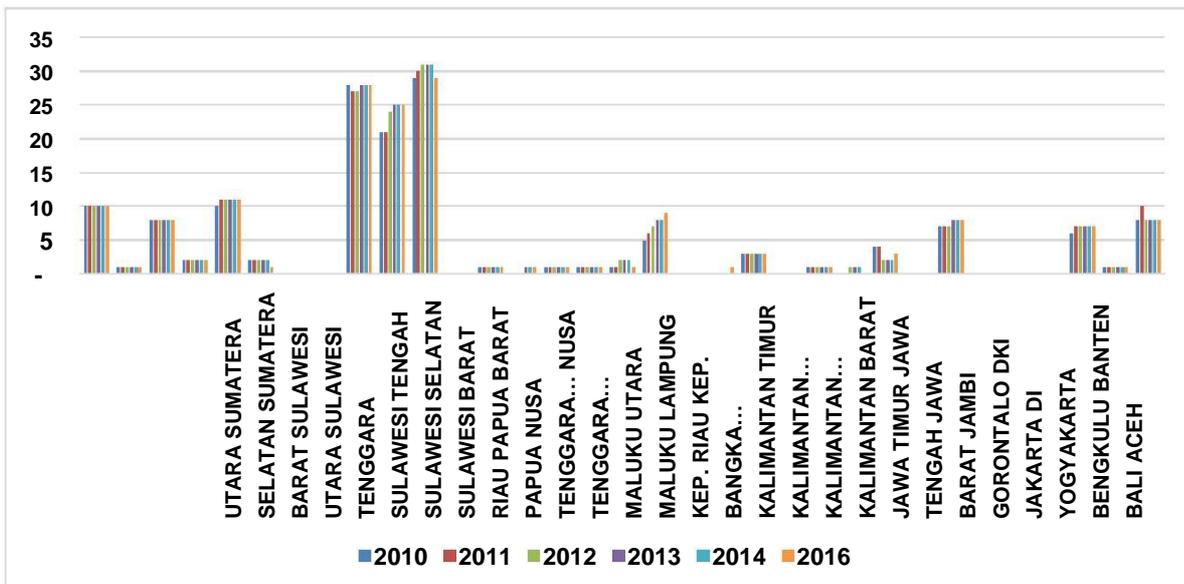
Sumber : Hasil Olah Data
Grafik 2. Dimensi Availabilitas (D_2) pada 33 Provinsi di Indonesia

Lampiran 3



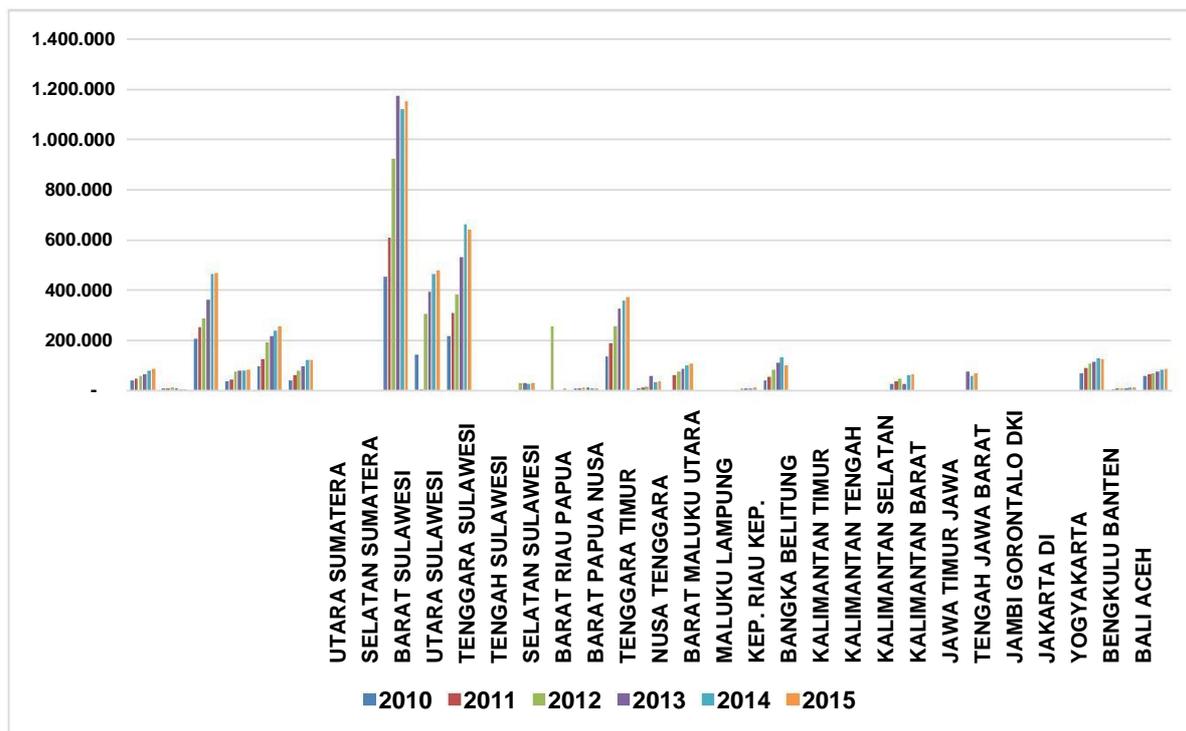
Sumber : Hasil Olah Data
Grafik 3. Dimensi Penggunaan (D₃) pada 33 Provinsi di Indonesia

Lampiran 4



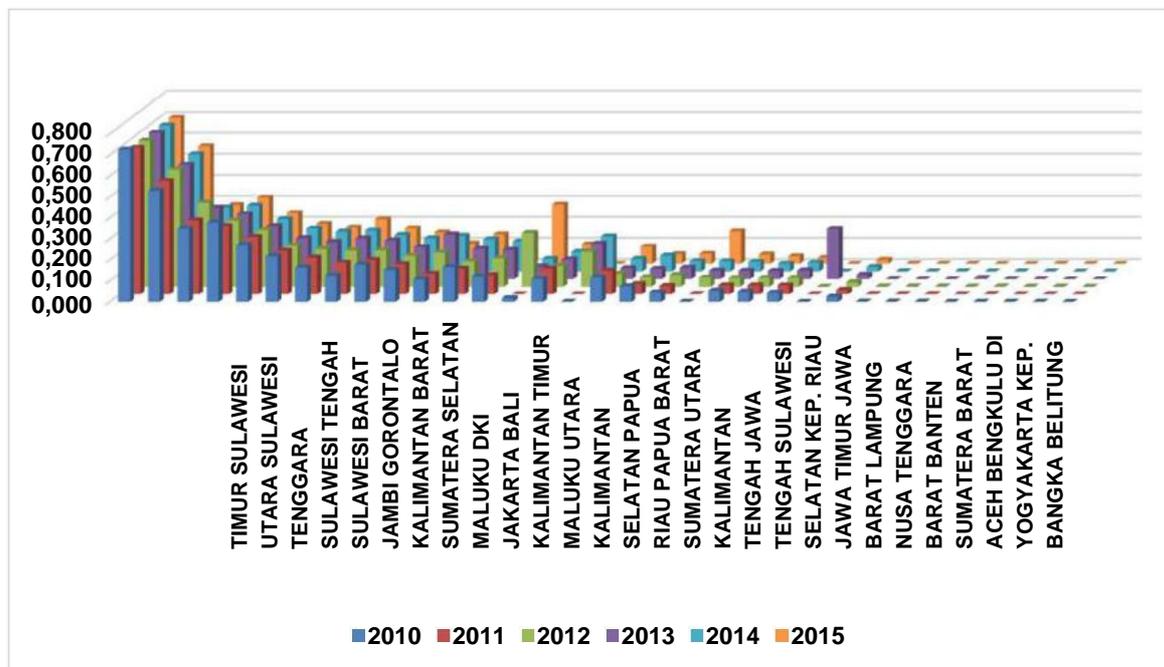
Sumber : Bank Indonesia
Grafik 4. Perkembangan Jumlah Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia

Lampiran 5



Sumber : Bank Indonesia
 Grafik 5. Jumlah DPK Perbankan Syariah

Lampiran 6



Sumber : Bank Indonesia
 Grafik 6. Rata-rata ISFI pada 33 Provinsi di Indonesia

Lampiran 7

Tabel 4
ISFI pada 33 Provinsi di Indonesia

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Average
KEP. BANGKA BELITUNG	0.726	0.699	0.697	0.697	0.697	0.696	0.702
DI YOGYAKARTA	0.529	0.541	0.559	0.546	0.559	0.562	0.549
BENGKULU	0.349	0.353	0.400	0.341	0.306	0.281	0.339
ACEH	0.379	0.325	0.315	0.310	0.315	0.317	0.327
SUMATERA BARAT	0.271	0.273	0.269	0.254	0.250	0.244	0.260
BANTEN	0.218	0.207	0.196	0.196	0.206	0.191	0.202
NUSA TENGGARA BARAT	0.163	0.176	0.180	0.177	0.190	0.174	0.177
LAMPUNG	0.126	0.152	0.173	0.195	0.196	0.213	0.176
JAWA BARAT	0.177	0.165	0.174	0.185	0.174	0.170	0.174
JAWA TIMUR	0.152	0.143	0.148	0.154	0.158	0.150	0.151
KEP. RIAU	0.107	0.099	0.163	0.213	0.170	0.098	0.142
SULAWESI SELATAN	0.166	0.121	0.121	0.145	0.154	0.141	0.141
JAWA TENGAH	0.122	0.091	0.136	0.141	0.143	0.143	0.129
KALIMANTAN TENGAH	0.018	0.000	0.256	0.060	0.062	0.283	0.113
SUMATERA UTARA	0.110	0.122	0.099	0.095	0.095	0.094	0.103
PAPUA BARAT	0.000	0.000	0.168	0.169	0.167	0.000	0.084
RIAU	0.117	0.113	0.062	0.052	0.061	0.084	0.082
PAPUA	0.075	0.049	0.046	0.048	0.077	0.048	0.057
KALIMANTAN SELATAN	0.046	0.040	0.056	0.053	0.050	0.049	0.049
MALUKU UTARA	0.001	0.001	0.043	0.041	0.049	0.155	0.048
KALIMANTAN TIMUR	0.054	0.043	0.041	0.040	0.046	0.046	0.045
BALI	0.049	0.043	0.042	0.039	0.037	0.038	0.041
DKI JAKARTA	0.044	0.042	0.042	0.042	0.043	0.030	0.040
MALUKU	0.000	0.000	0.000	0.240	0.000	0.000	0.040
SUMATERA SELATAN	0.024	0.022	0.021	0.021	0.021	0.021	0.022
KALIMANTAN BARAT	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
GORONTALO	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
JAMBI	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
SULAWESI BARAT	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	0.000	0.001
SULAWESI TENGAH	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
SULAWESI TENGGARA	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
SULAWESI UTARA	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
NUSA TENGGARA TIMUR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Average Total	0.122	0.116	0.134	0.135	0.128	0.128	0.127

Sumber : Hasil Olah Data

Lampiran 8

Tabel 5
Hasil Estimasi Korelasi ISFI dan HDI

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
ISFI	.127395	.1596270	33
HDI	67.093788	4.2983207	33
Correlations			
		ISFI	HDI
ISFI	Pearson Correlation	1	.288
	Sig.		.052
	N	33	33
HDI	Pearson Correlation	.288	1
	Sig.	.052	
	N	33	33
Correlation is significant at the 0.1 level			

Sumber : Hasil Olah Data

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

JURNAL BPPK



RANCANGAN MODEL E-GOVERNMENT TERINTEGRASI UNTUK MENCEGAH PENYIMPANGAN PADA BELANJA PERJALANAN DINAS

Suprayitno

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya,
Tangerang Selatan. Email: suprayitno@pknstan.ac.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
31 Maret 2017

Dinyatakan Dapat Dimuat
6 November 2017

KATA KUNCI:

E-Government,
sistem informasi,
proses bisnis,
TIK,
SPI,
sistem pengendalian intern,
korupsi,
penyimpangan belanja
negara,
perjalanan dinas.

ABSTRAK

The current system of official travel expenditure has not been able to prevent travel expenditure frauds maximally. BPK RI (The Audit Board of The Republic of Indonesia) reported official travel expenditure fraud of Rp99,64 billion in the audit report of the central government financial statements of 2015. The wasteful, fictitious and double travel expenditure are some modus operandi of the expenditure frauds. The ineffectiveness of internal control system design is the primary problem which potentially causes some official travel expenditure frauds. The research try to identify and analyze the control design weakness of current official travel expenditure. Based on the analysis, the research try to find how to strengthen the internal control system design to prevent official travel expenditure frauds maximally by implementing E-Government. The research also try to design a model of E-Government that can increase the effectiveness of internal control system in the official traveling expenditure system. A system development method applied in the research, by using a System Development Life Cycle (SDLC) approach focusing on a business process analysis phase and an E-Government model design conceptually. The Results showed that an E-Government model of official travel expenditure system should be designed by integrating all business processes and stakeholders that it can strengthen internal control system in minimizing fraud of official travel expenditure.

Sistem belanja perjalanan dinas saat ini belum mampu secara maksimal mencegah tindak penyimpangan pada belanja perjalanan dinas. Sebagaimana dilaporkan dalam temuan BPK RI pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 dimana terdapat penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp99,64 Miliar. Perjalanan dinas fiktif, ganda dan melebihi standar biaya merupakan contoh modus penyimpangan belanja yang sering terjadi. Ketidakefektifan rancangan SPI merupakan permasalahan mendasar yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan pada belanja perjalanan dinas. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan rancangan pengendalian pada belanja perjalanan dinas. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian berusaha menggali upaya memperkuat rancangan SPI dalam mencegah penyimpangan belanja perjalanan dinas melalui penerapan E-Government. Selanjutnya menggali rancangan model E-Government yang dapat meningkatkan keefektifan SPI pada sistem belanja perjalanan dinas. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem informasi dengan pendekatan berbasis model System Development Life Cycle (SDLC), yang menitikberatkan pada fase analisis proses bisnis dan rancangan model E-Government secara konseptual. Hasil penelitian mengemukakan bahwa model E-Government pada sistem belanja perjalanan dinas hendaknya dirancang dengan mengintegrasikan keseluruhan proses bisnis dan para pemangku kepentingan agar dapat memperkuat SPI dalam meminimalkan potensi munculnya penyimpangan pada belanja perjalanan dinas.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena penyimpangan belanja negara hingga kini masih terjadi dan melibatkan para pegawai negeri sipil (PNS) mulai dari staf hingga pejabat tinggi negara, bahkan tidak sedikit yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbagai bentuk penyimpangan keuangan negara seperti

korupsi dan ketidakefisienan belanja publik mewarnai birokrasi pemerintahan baik pemerintahan pusat, daerah, BUMN dan BUMD. Satrio Budiharjo Judono, ketika masih menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pernah melaporkan sepanjang Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003 menemukan sebanyak 22

kasus yang berindikasi KKN dengan nilai nominal Rp165,5 Triliun dan USD \$62,7 Juta (Suwitri, 2007).

BPK RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2016 mengungkapkan temuan sebanyak 10.198 yang memuat 15.568 permasalahan, meliputi 7.661 (49%) kelemahan SPI dan 7.907 (51%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp44,68 Triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.762 (60%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp30,62 triliun (BPK, 2012).

Selanjutnya, dalam IHPS tersebut, BPK RI juga melaporkan perihal hasil pemantuan tindak lanjut temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana periode 2003 hingga Juni 2016, dimana dalam periode tersebut BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sebanyak 231 surat yang memuat 446 temuan pemeriksaan mengandung indikasi unsur pidana senilai Rp33,52 triliun dan US\$41,88 juta atau seluruhnya senilai Rp44,62 triliun.

Berdasarkan Ringkasan Eksekutif hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, BPK RI mengungkapkan 14 kelemahan pengendalian intern dan 8 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu permasalahan terkait temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dinyatakan pada poin 5.17 dimana BPK melaporkan pada pemeriksaan LKPP Tahun 2013 dan 2014 BPK telah mengungkapkan ketidakpatuhan atas penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 54 kementerian dan lembaga (KL) sebesar Rp5,62 triliun dan Belanja Barang pada 63 KL sebesar Rp2,53 triliun tidak sesuai ketentuan (BPK, 2015)

Adapun dari sekitar Rp2,53 Triliun, sebanyak Rp99.643.354.511,46 merupakan permasalahan perjalanan dinas. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp99,64 tersebut terjadi pada 28 KL disebabkan belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp80.434.106.748, nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest sebesar Rp2.661.138.670,31, harga tiket tidak sesuai dengan sebenarnya sebesar Rp2.905.248.735,02, perjalanan dinas rangkap Rp202.734.400,00, perjalanan dinas fiktif

Rp3.762.476.014,00, kelebihan bayar perjalanan dinas Rp9.677.649.944,63 (table 1).

Temuan BPK RI atas LKPP Tahun 2014 mengungkapkan jumlah penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp9,2 miliar (BPK, 2004). Nilai tersebut jauh di bawah temuan pada tahun 2015 sebesar Rp99,64 miliar, artinya penyimpangan belanja perjalanan dinas pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu lebih dari sepuluh kali lipat dibanding dengan yang terjadi pada tahun 2014.

Tabel 1. Temuan Jenis Penyimpangan pada Perjalanan Dinas Tahun 2015

MODUS PENYIMPANGAN PADA PERJALANAN DINAS	NILAI
Belum ada bukti pertanggungjawaban	Rp 80.434.106.748,00
Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest	Rp 2.661.138.670,31
Harga tiket tidak sesuai dengan sebenarnya	Rp 2.905.248.735,02
Perjalanan dinas rangkap	Rp 202.734.400,00
Perjalanan dinas fiktif	Rp 3.762.476.014,00
Kelebihan bayar perjalanan dinas	Rp 9.677.649.944,63
Jumlah Keseluruhan	Rp 99.643.354.511,96

Padahal jika diamati dari kasus serupa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, muncul kecenderungan penurunan nilai penyimpangan perjalanan dinas, yaitu yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2013. Pada tahun 2012, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2012, diungkapkan bahwa temuan penyimpangan pada belanja perjalanan dinas sebesar Rp30,36 Miliar (BPK, 2012). Adapun temuan kasus serupa pada tahun 2013 turun 59% menjadi Rp12,3 Miliar (BPK, 2013). Demikian pula yang terjadi pada tahun 2014 sebagaimana dilaporkan BPK RI, kasus temuan tersebut hanya sebesar Rp9,2 Miliar atau turun 70% dibandingkan dengan tahun 2012 (gambar 1).



Gambar 1. Tren Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas

Sumber: Diolah dari LHP BPK Tahun 2012 s.d 2015

Pada IHPS I Tahun 2016, BPK RI memaparkan beberapa permasalahan terkait dengan

penyimpangan perjalanan dinas, diantaranya:

1. Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang melibatkan 49 entitas di lingkungan pemerintah pusat dengan nilai sebesar Rp16,46 Miliar. Penyimpangan ini berupa kelebihan biaya perjalanan dinas, uang tiket, uang harian, dan penginapan melebihi standar biaya;
2. Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan yang melibatkan 224 pemerintah daerah dengan nilai kerugian Rp50,47 Miliar. Adapun bentuk penyimpangan berupa bukti pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan, dan pembayaran uang harian melebihi ketentuan yang ditetapkan.

BPK RI secara garis besar mengungkapkan modus yang sering dilakukan oleh aparat, secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Perjalanan dinas tidak dilaksanakan namun tetap dipertanggungjawabkan dan dananya tetap dicairkan (fiktif);
- b) Perjalanandinas rangkap, pegawai melaksanakan perjalanan dinas rangkap;
- c) Perjalanan dinas dilakukan, tetapi harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- d) Perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan maskapai penerbangan X, namun dipertanggungjawabkan menggunakan tiket maskapai Y yang lebih mahal;
- e) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan maskapai tertentu, namun nilai tarif pesawat dan/atau hari, tanggal keberangkatan berbeda dengan bukti pertanggungjawaban;
- f) Tiket yang dijadikan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan manifest.

Lebih lanjut, BPK menguraikan bahwa penyimpangan perjalanan dinas tersebut berulang kali terjadi antara lain karena pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas pengendalian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas oleh atasan langsung lemah, pejabat terkait tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai, terdapat biro perjalanan yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill hotel palsu.

Penyimpangan pada perjalanan dinas ini

menjadi perhatian khusus BPK RI melalui laporan hasil pemeriksaan yang sudah diungkapkan BPK RI pada IHPS I Tahun 2012. BPK (2012) melaporkan hasil pemeriksaan yang signifikan yang perlu mendapat perhatian baik pemerintah, lembaga perwakilan, maupun seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain karena memuat temuan pemeriksaan terjadi di banyak entitas, hasil pemeriksaan BPK yang diperkirakan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat (nationwide impact) baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Data historis hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa temuan terkait perjalanan dinas terjadi berulang dari tahun ke tahun serta terjadi di entitas pemerintah pusat dan daerah.

Lebih lanjut, BPK telah memasukkan jenis temuan terkait dengan penyimpangan perjalanan dinas pada tahun 2012 dalam daftar pemantauan khusus yaitu melalui Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan LKPP dengan subjudul LHP Kepatuhan 2007-2014 (BPK, 2015). Pada laporan monitoring dengan jenis temuan Tahun 2010 "Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu tidak dilaksanakan kegiatannya, dibayar ganda, tidak sesuai bukti pertanggungjawaban, dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban". Berkenaan dengan penyimpangan biaya perjalanan dinas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.

Beberapa fakta yang disampaikan BPK RI tersebut sebenarnya ibarat fenomena gunung es yang hanya kelihatan permukaan saja, namun dibalik kasus yang terungkap tersebut masih banyak kasus penyimpangan keuangan negara yang belum banyak diketahui masyarakat. Hal ini karena hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK menggunakan metode sampling dari keseluruhan populasi dokumen belanja negara, apalagi temuan penyimpangan perjalanan dinas tersebut bukan merupakan pemeriksaan khusus BPK terhadap akun belanja perjalanan dinas.

Dengan masih banyaknya temuan BPK atas LKPP terkait dengan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan penting yang

memberikan kontribusi pada penyimpangan belanja negara. Padahal SPI yang lemah pada belanja negara menunjukkan bahwa SPI tidak efektif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak penyimpangan belanja negara, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan. Padahal, SPI merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan keefektifan dan keefisienan operasi, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada kelemahan sistem belanja negara, lebih khususnya kelemahan rancangan SPI pada sistem perjalanan dinas yang diterapkan saat ini. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, penulis mengelaborasi dan mengidentifikasi berbagai solusi yang dapat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Melalui sinergisitas antara proses bisnis, TI dan implementasi SPI pada sistem perjalanan dinas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas SPI dalam menutup celah yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk penyimpangan belanja negara.

Selanjutnya penelitian berusaha menyajikan rancangan model sistem perjalanan dinas berbasis E-Government dengan menggambarkan proses bisnis terintegrasi yang menyelaraskan keunggulan TI dan komponen-komponen SPI sehingga memberikan kontribusi positif pada keefektifan SPI pada sistem perjalanan dinas. Melalui sistem tersebut diharapkan dapat memperkecil potensi penyimpangan pada belanja perjalanan dinas yang dapat merugikan keuangan negara.

1.2. Rumusan Masalah

Ketidakefektifan rancangan SPI pada sistem belanja negara, khususnya perjalanan dinas dapat berimplikasi pada munculnya potensi penyimpangan pada belanja negara yang dilakukan oleh aparat. Upaya untuk mengurangi tindakan korupsi belanja negara adalah dengan menutup celah-celah kelemahan pada SPI yang berpeluang pada penyimpangan belanja negara sehingga dapat meningkatkan keefektifan rancangan SPI dalam mencegah potensi penyimpangan belanja negara.

Rancangan SPI belanja perjalanan dinas pada sistem yang ada saat ini masih memungkinkan

terjadinya penyimpangan belanja negara, sebagaimana masih terjadinya perjalanan dinas fiktif, ganda ataupun melebihi standar yang ditetapkan. Penulis berusaha menggali faktor-faktor yang menyebabkan munculnya celah-celah kelemahan pada SPI tersebut. Selanjutnya berupaya menemukan solusi untuk menutup celah pada rancangan sistem sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh aparat pemerintahan untuk melakukan tindakan penyimpangan.

Permasalahan utama yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana memperkuat rancangan SPI pada sistem belanja perjalanan dinas melalui penerapan E-Government sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan pada belanja perjalanan dinas. Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengelaborasi rancangan model sistem perjalanan dinas berbasis E-Government yang terintegrasi dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan keefektifan SPI pada belanja perjalanan dinas.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menyajikan rancangan model E-Government pada sistem perjalanan dinas yang secara efektif mampu menutup celah terjadinya penyimpangan belanja negara. Melalui model tersebut, diharapkan sistem perjalanan dinas memiliki rancangan SPI yang secara efektif mampu menghantarkan tujuan organisasi berupa efektifitas dan efisiensi operasi.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk memanfaatkan bentuk-bentuk penerapan TI dan penerapan SPI dalam proses bisnis pada belanja perjalanan dinas yang sinergis, sehingga menghasilkan rancangan SPI yang secara efektif mampu meminimalisir terjadinya potensi penyimpangan belanja negara, yaitu dengan menutup celah-celah yang dapat dijadikan untuk melakukan tindakan penyalahgunaan pada belanja perjalanan dinas.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan yang penting dan relevan pada penelitian ini adalah:

- a) Apa saja kelemahan rancangan SPI dan proses bisnis pada sistem belanja perjalanan dinas.
- b) Bagaimanakah rancangan model E-Government yang dapat memperkuat keefektifan SPI pada sistem perjalanan dinas.
- c) Seperti apa perbaikan proses bisnis pada

rancangan model E-Government terintegrasi pada sitem perjalanan dinas.

Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Keuangan Negara

Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU No.17 Tahun 2013).

Ditinjau dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

2.1.1. Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Belanja negara sebagai bagian dari komponen APBN dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, presiden memberikan kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kepada para pembantunya, yaitu Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, Presiden menguasai kepada para menteri/pimpinan lembaga, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

2.1.2. Belanja Negara

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah.

Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan sifat ekonomi (jenisnya), belanja negara diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sementara itu, belanja barang meliputi belanja barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat.

Berdasarkan UU Perbendaharaan Negara pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA)/KUSA Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) yang telah disahkan, selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut PA dan KPA berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan melalui dokumen anggaran (DIPA). Selanjutnya pada pasal 18 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran tersebut, PA dan KPA melakukan pengujian, membebaskan sesuai dengan mata anggaran dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD. Pejabat yang menandatangani dan mengesahkan dokumen bukti pengeluaran tagihan tersebut bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Sesuai dengan pasal 19 dan 20, pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN/APBD dilakukan oleh Bendahara Umum

Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Daerah.

2.2. Perjalanan Dinas

2.2.1. Definisi dan Prinsip Perjalanan Dinas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan dinas didefinisikan sebagai perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Secara umum, perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah.

Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Sementara itu, perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.

Sebagaimana diatur pada pasal 3, perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- c) Efisiensi penggunaan belanja negara; dan
- d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

2.2.2. Ketentuan dan Penyimpangan Perjalanan Dinas

Pada prinsipnya komponen yang dapat disediakan untuk biaya perjalanan dinas antara lain berupa biaya transportasi, biaya penginapan, uang harian, uang representasi, dll. Biaya transportasi dipergunakan untuk transportasi darat, laut maupun udara dari lokasi/daerah kedudukan semula menuju lokasi/daerah yang dituju oleh pegawai. Biaya penginapan dipergunakan untuk keperluan menginap/bermalam pegawai baik di hotel ataupun penginapan lainnya dalam. Adapun uang

harian dipergunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku.

Pada pasal 6 dinyatakan bahwa perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas (ST). Adapun ST mencantumkan hal-hal seperti pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu dan tempat pelaksanaan tugas. Beberapa ketentuan lain yang terkait dengan perjalanan dinas sebagai berikut:

- a) Besarnya biaya perjalanan dinas diklasifikasikan sesuai dengan tingkat pegawai/jabatan;
- b) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur PMK mengenai Standar Biaya;
- c) Biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor;
- d) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada PMK mengenai Standar Biaya;
- e) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau Pembayaran Langsung (LS), dll.

Berkenaan dengan penyimpangan belanja negara, Soepardi (2010) menguraikan istilah fraud, yaitu berupa adanya tindak penipuan (deception), ketidakjujuran (dishonest), dan niat (intent). Fraud menyangkut cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan penyajian yang salah/palsu. Kecurangan mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain. Sementara itu, fraud terdiri dari penyalahgunaan internal atau korupsi, kecurangan dalam pelaporan.

2.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Suwitri (2007) mengungkapkan bahwa korupsi merupakan penyakit birokrasi yang penyembuhannya hanya dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi. Penampilan administrasi negara diwakili penampilan birokrasi, memberantas korupsi merupakan upaya birokrasi dengan merubah penampilan birokrasi. Korupsi merupakan endemik maka harus diberantas dengan model dan strategi yang menyeluruh.

Ameen dan Ahmad (2011) menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat

memainkan peran yang penting pada reformasi manajemen publik dalam memerangi korupsi. Penerapan sistem informasi keuangan dapat berguna dalam hal transparansi yang lebih baik, auditing dan pengendalian pada administrasi keuangan publik, sehingga sistem informasi ini dapat menjadi salah satu komponen utama strategi anti korupsi yang lebih luas. Zhang dan Zhang (2009: 115), menyatakan sebagai berikut:

“Although E-Government cannot cure all structural factor that breed corruption in the society, strategic implementation of E-Government can help improve critical variable in combating corruption-government citizen relationship.”

Sedangkan menurut Chen dan Xu (2012) Internet dan pengembangan E-Government dapat memberikan sarana baru anti korupsi. Sebagai sarana anti korupsi yang baru, maka arsitektur teknis jaringan dan rancangan logika sistem media menentukan keefektifan dalam memerangi korupsi melalui Internet.

Penerapan SPI yang efektif diyakini mampu mencegah tindakan penyimpangan belanja dan kecurangan (fraud) yang dilakukan karyawan. Akinyomi (2012) pada jurnal riset tentang pemeriksaan dan pencegahan kecurangan pada sektor perbankan Nigeria merekomendasikan bahwa salah satu solusi untuk melakukan pencegahan fraud adalah melalui penerapan sistem pengendalian intern yang cukup dan dapat diandalkan.

2.4. Sistem Pengendalian Intern

2.4.1. Definisi dan Tujuan SPI

Lakis dan Giriunas (2012) memaparkan bahwa SPI didefinisikan dengan berbagai definisi yang beragam, hal ini karena konsep tersebut dipengaruhi oleh pemahaman fakta atas pengendalian (control) dengan banyak aspek dan situasi yang berbeda-beda.

Adapun beberapa definisi SPI yang diterima secara luas antara lain berasal dari COSO, CobiT, INTOSAI, USA SEC, dsb. Menurut COSO (2013), SPI merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan terkait dengan operasi, pelaporan dan ketaatan.

Adapun CobiT mengadaptasi definisi pengendalian (control) dari Internal Control-

Integrated Framework yang disusun COSO, yaitu berbagai kebijakan, prosedur, praktik dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa berbagai tujuan bisnis dapat dicapai dan berbagai peristiwa (event) yang tidak diharapkan dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi.

INTOSAI (2004) mendefinisikan SPI sebagai suatu proses yang integral yang dipengaruhi oleh manajemen entitas dan pegawai dan dirancang untuk menangani risiko-risiko serta memberikan kepastian memadai bahwa dalam rangka pencapaian misi entitas, tujuan umum berikut dapat dicapai berupa penyelenggaraan operasi yang tertib, sesuai etika, ekonomis, efisien dan efektif, memenuhi kewajiban akuntabilitas, patuh terhadap berbagai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan pengamanan sumberdaya dari kerugian, penyalahgunaan dan kerusakan.

Bapepam AS mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan kepastian memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan persiapan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum (Agrawa R., dkk, 2006).

Menurut COSO (2013), berdasarkan tujuannya, penerapan SPI pada suatu entitas dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan ketaatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan pemerintah menerapkan SPIP atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laith (2012) mengutip Jarbou (2003), berkenaan dengan organisasi dengan lingkungan berbasis TIK mengungkapkan bahwa tujuan penerapan SPI tidak jauh berbeda dengan tujuan penerapan SPI pada lingkungan operasi tradisional. Namun berkenaan dengan risiko, sistem pada lingkungan TIK lebih terbuka, yang berpengaruh pada keselamatan dan keamanan informasi, secara khusus untuk aktifitas e-commerce melalui internet terdapat tujuan

tambahan yang harus dicapai melalui SPI, yaitu menjaga kepercayaan pelanggan yang bertransaksi melalui kegiatan e-commerce termasuk kepercayaan operasional usaha melalui jaringan internet.

2.4.2. COSO – ICIF

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pertama kali menerbitkan Internal Control-Integrated Framework (ICIF) pada tahun 1992. COSO merupakan hasil dari inisiatif organisasi sukarelawan sektor swasta yang bertujuan untuk perbaikan kinerja organisasi dan tata kelola melalui pengendalian internal yang efektif, manajemen risiko enterprise, dan pencegahan fraud (McNally, 2013).

KPMG (2013) memaparkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, COSO mempublikasikan framework SPI versi terbaru yang dikenal dengan COSO ICIF 2013. Framework SPI 2013 yang diterbitkan COSO masih mempertahankan definisi SPI dan kubik COSO, termasuk lima komponen SPI. Perubahan yang penting adalah adanya kodifikasi

17 prinsip-prinsip untuk mendukung lima komponen SPI.

Menurut COSO (2013), suatu SPI dikatakan efektif apabila manajemen senior dan dewan komisaris mempunyai keyakinan memadai yang berkaitan dengan penerapan dalam struktur entitas bahwa organisasi:

- a) Mencapai operasi yang efektif dan efisien ketika peristiwa eksternal dianggap tidak mungkin berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan.
- b) Memahami seberapa luas operasi dikelola secara efektif dan efisien dimana organisasi dapat secara layak memprediksi sifat dan saat peristiwa eksternal dan mengurangi dampak pada suatu tingkat yang dapat diterima.
- c) Mempersiapkan laporan sesuai dengan peraturan yang diterapkan, ketentuan dan standar atau dengan tujuan pelaporan spesifik entitas.
- d) Mematuhi undang-undang, peraturan, ketentuan, dan pedoman eksternal. Kendatipun SPI mampu menyajikan kepastian yang memadai pada pencapaian tujuan entitas, tetapi terdapat keterbatasan. SPI tidak mampu melakukan pencegahan keputusan atau pertimbangan yang buruk, atau berbagai peristiwa

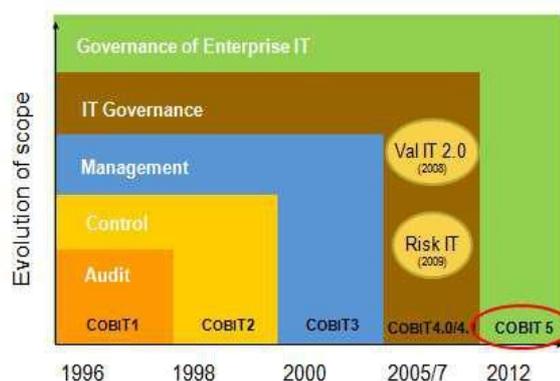
eksternal yang dapat menyebabkan organisasi gagal mencapai tujuan operasionalnya.

2.4.3. COBIT 5

Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) merupakan suatu pedoman yang diterima secara umum, dipergunakan oleh para eksekutif dan profesional untuk memastikan bahwa operasi TI selaras dengan tujuan dan sasaran bisnis (Zhang dan Fever, 2013).

COBIT disusun oleh Information System Audit and Control Association (ISACA), sebuah lembaga asosiasi profesional yang memfokuskan pada pengelolaan teknologi informasi dan berafiliasi dengan International Federation of Accountants (IFAC). COBIT memungkinkan para manajer untuk mengisi celah pengendalian atas permasalahan teknis, kebutuhan dan risiko bisnis, dan pergeseran tingkat pengendalian pada para pemangku kepentingan. Pedoman ini memungkinkan penyusunan kebijakan pengendalian TI dan praktik terbaik disepanjang tingkatan bisnis (Khther dan Othman, 2013).

Pada awalnya, COBIT (versi 1) diluncurkan pada tahun 1996, tetapi pada waktu itu piranti manajemen ini masih terbatas cakupannya, yaitu fokus pada lingkup audit. Pada tahun 1998, ISACA menerbitkan COBIT 2, dengan lingkup pengendalian (control). Selanjutnya, dua tahun berikutnya pada Tahun 2000, diterbitkan COBIT 3 yang memperluas jangkauan pada lingkup manajemen (gambar2).



Gambar 2. Evolusi COBIT oleh ISACA
Sumber: www.isaca.org/cobit

Pada Tahun 2005/2007 ISACA menerbitkan COBIT 4.0/4.1 dengan menjadikan TI sebagai bagian dari proses bisnis yang mendapatkan perhatian khusus, sehingga COBIT Versi 4 menjadikan tata kelola TI sejajar dengan kegiatan

manajerial lainnya dari proses bisnis perusahaan. Pada Tahun 2012 lembaga profesi ISACA menerbitkan COBIT 5 dengan lingkup tata kelola TI enterprise (ISACA, 2012).

Publikasi ISACA (2013) mengenai COBIT 5 pada situs online menegaskan bahwa COBIT 5 menyajikan suatu pedoman kerangka komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai berbagai tujuan dalam rangka tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Framework COBIT 5 bersifat generik, dan dapat dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai ukuran, baik perusahaan komersial, nirlaba maupun organisasi sektor publik. COBIT 5 membedakan secara tegas antara tata kelola (governance) dan pengelolaan/manajemen (management). Kedua istilah tersebut mempunyai tipe kegiatan yang berbeda yang memerlukan struktur organisasi yang berbeda dan menjalankan tujuan yang berbeda pula.

ISACA (2013b) memaparkan bahwa COBIT 5 membagi kriteria informasi menjadi tiga bagian, yaitu intrinsik, kontekstual, dan keamanan/aksesibilitas, masing-masing bagian dirinci menjadi beberapa kriteria kualitas.

2.5. E-Government

2.5.1. Manfaat dan Layanan E-Government

Menurut organisasi kerjasama pembangunan ekonomi/OECD (2003) terdapat banyak definisi tentang konsep E-Government dengan perbedaan definisi tidak hanya terkait dengan permasalahan semantik saja, tetapi juga mencerminkan prioritas dalam strategi pemerintahan. OECD (2003:63) mendefinisikan E-Government sebagai “The use of information and communication technologies, and particularly the Internet, as a tool to achieve better government”.

Turban dan Volonino (2011) memaparkan bahwa E-Government merupakan penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan informasi dan layanan publik kepada warga negara, mitra bisnis, pemasok lembaga pemerintahan, dan orang-orang yang bekerja pada sektor publik.

Shahkooh dan Abdollahi (2007) mengelaborasi definisi E-Government sebagai penggunaan TI dalam rangka menyediakan berbagai layanan online yang lebih cepat dan lebih baik dan informasi kepada warga negara, mitra bisnis dan para pegawai oleh pemerintah. Gartner, sebagaimana dikutip Fang (2002) mendefinisikan

E-Government sebagai suatu optimasi penyediaan layanan, partisipasi konstituen, dan tata kelola melalui transformasi hubungan internal dan eksternal melalui teknologi, internet dan media.

Menurut publikasi yang disusun Center for Democracy and Technology untuk Bank Dunia (2002), E-Government adalah penggunaan TIK dalam rangka transformasi pemerintah, dengan menjadikan pemerintah dapat lebih mudah diakses, lebih efektif dan lebih akuntabel. NAZ (2009) dalam riset tentang E-Government for improved public services delivery in Fiji menyimpulkan bahwa penerapan E-Government berpotensi memperbaiki penyediaan layanan dan kepuasan pelanggan.

Berkaitan dengan model layanannya, Fang (2002) memaparkan delapan konsep tipe E-Government yaitu Government-to-Citizen (G2C), Citizen-to-Government (C2G), Government-to-Business (G2B), Business-to-Government (B2G), Government-to-Government (G2G), Government-to-Nonprofit (G2N), Nonprofit-to-Government (N2G), dan Government-to-Employee (G2E).

Adapun kategori yang lebih ringkas dikemukakan Turban dan Volonino (2011), berupa tiga kategori utama E-Government berdasarkan transaksi yang terjadi, yaitu G2C, G2B, dan G2G. Turban (2011) memaparkan model G2C sebagai suatu model E-Government dengan transaksi yang secara intensif mempergunakan internet pada lembaga pemerintahan untuk menyediakan jenis-jenis layanan kepada warga negara, misalnya transfer jaminan sosial elektronik dimana pemerintah melakukan transfer atas pembayaran pensiun dan jaminan sosial secara langsung melalui rekening bank penerima atau kartu pintar.

2.5.2. Memerangi Korupsi melalui Penerapan E-Government

Saat ini banyak organisasi yang memanfaatkan kemajuan era digital untuk melakukan transaksi secara elektronik sehingga membawa kemudahan dan keamanan transaksi bisnis, bahkan tidak sedikit perusahaan komersial yang sudah menerapkan sistem informasi E-Government untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan. Hal ini merupakan fenomena yang mulai mendapatkan penerimaan dari berbagai pihak.

OECD (2013) memaparkan bahwa penerapan TIK dapat menjadi penggerak keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan kebijakan,

mempromosikan pemerintahan yang akuntabel dan terbuka, dan membantu mencegah korupsi.

Zhang dan Zhang (2009) memaparkan bahwa penerapan E-Government dapat menjadi salah satu komponen kunci strategi anti-korupsi dengan memungkinkan adanya komunikasi yang efektif selain transparansi. Melalui E-Government hal ini dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan pengungkapan fakta, karena pengelolaan data transaksi yang rinci memungkinkan untuk menelusuri dan menghubungkan pelaku korupsi dengan perilaku menyimpangnya

Kim (2013) menguraikan pendekatan yang dapat dipergunakan untuk membasmi korupsi menjadi empat pendekatan, yaitu pendekatan hukum-administratif, pendekatan perilaku-budaya, pendekatan ekonomi dan pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi diarahkan pada penggunaan TIK sebagai sarana penyediaan layanan dalam rangka pencegahan korupsi pada pemerintahan.

Mengutip Transparency International Korea, Zhang dan Zhang (2009) menyebutkan bahwa E-Government dapat menjadi salah satu komponen utama dari strategi anti-korupsi yang lebih luas sebagaimana didemonstrasikan melalui sistem Online Procedures Enhancement for Civil Applications (OPEN) yang diterapkan di Kota Seoul, Republik Korea. OPEN merupakan suatu program pemberantasan korupsi yang diinisiasi Walikota Seoul, Republik Korea pada Tahun 1998. Proyek ini dianggap sebagai suatu contoh yang efektif atas komitmen manajerial dan politik terhadap transparansi dan dampak terhadap korupsi. Program OPEN memungkinkan masyarakat memonitor aplikasi perizinan atau persetujuan, termasuk mengajukan pertanyaan dalam hal dideteksi adanya ketidakberesan. Melalui OPEN, pemrosesan urusan sipil tersedia secara online, sehingga efisiensi dan transparansi beberapa area administrasi sipil tercapai.

2.5.3. Tahapan dan Tantangan

Implementasi E-Government

Berkaitan dengan model kematangan pada E-Government, Irani, Sebie dan Elliman (2006) pada Howard (2001) menguraikan tiga tahapan sistem E-Government, yaitu publikasi, interaksi dan transaksi. Tiga tahapan E-Government yang dikemukakan Howard juga serupa dengan tahapan

yang dipublikasikan Center for Democracy and Technology untuk Bank Dunia (2002), antara lain fase publikasi, fase interaksi, dan fase transaksi.

PBB melalui Division for Public Economics and Public Administration (2002) membagi lima fase E-Government, yaitu fase pertama berupa tahap kemunculan, peningkatan, interaktif, transaksi, dan integrasi. Shareef, Jahankhani dan Dastbaz (2013) melaporkan bahwa Gartner Group membagi empat fase E-Government berupa kehadiran web (web presence), interaksi (interaction), transaksi (transaction) dan transformasi (transformation).

Adapun terkait dengan tantangan implementasinya, Yanging (2011), menyebutkan empat tantangan terkait implementasi E-Government, yaitu keamanan komputer, privasi, perbedaan dalam akses komputer, dan manajemen TI pemerintah dan pendanaan. Perbedaan akses komputer meliputi dua isu yaitu ketimpangan digital ("digital divide") dan kemampuan akses bagi orang-orang yang cacat. Menurut Almarabeh dan AbuAli (2012), ketersediaan (availability) dan akses (accessibility) merupakan dua prasyarat kritis yang berpengaruh pada keberhasilan E-Government.

2.5.4. E-Government dan Sistem Informasi Terintegrasi

Menurut Turban dan Volonino (2011) komponen suatu SI terdiri dari hardware, software, data, jaringan, prosedur dan orang. Saat ini, kondisi migrasi massal para pengguna komputer PC ke piranti bergerak (mobile devices) telah menggeser peran SI di atas organisasi dan menyebabkan lokasi secara praktis menjadi tidak relevan lagi. Kemungkinan besar, saat ini teknologi bergerak telah menembus dinding di antara sisi bisnis dan kehidupan personal manusia. Turban (2011) menambahkan bahwa inovasi TI saat ini sedang mengguncang atau mempengaruhi cara-cara perusahaan menjalankan bisnis, pekerjaan para manajer dan pekerja, rancangan proses bisnis, serta struktur pasar.

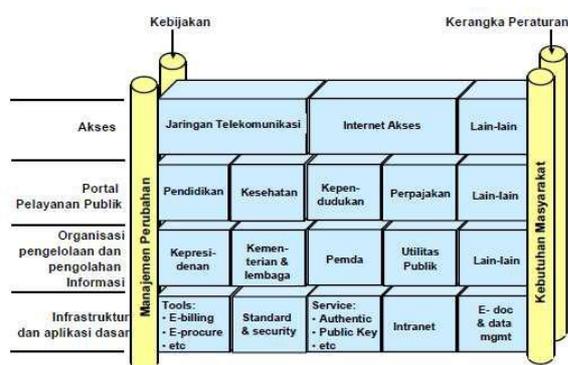
Litan, dkk. (2011) menyampaikan bahwa saat ini, integrasi sistem informasi telah menjadi suatu kebutuhan karena didasari oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan besar telah mengembangkan SI yang berulang, yang kebanyakan merupakan sistem yang terpisah untuk otomasi kegiatan yang berbeda-beda.

Keuntungan yang diperoleh dari integrasi SI antara lain berupa pengurangan biaya pengelolaan SI hingga penyederhanaan aliran kerja.

2.5.5. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 disusun kebijakan nasional tentang E-Government dalam rangka menyamakan pemahaman, tindakan sejalan dan langkah yang terpadu pada seluruh lembaga pemerintahan. Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien.

Pengembangan E-Government harus merujuk pada kerangka arsitektur yang ditetapkan. Adapun kerangka arsitektur pengembangan E-Government terdiri dari empat lapis, yaitu berupa akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, serta infrastruktur dan aplikasi dasar (gambar 3).



Gambar 3. Kerangka arsitektur E-Government
Sumber: Inpres No.3 Tahun 2003

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian berupa pengembangan sistem informasi, melalui suatu pendekatan pengembangan sistem berbasis model System Development Life Cycle (SDLC). SDLC merupakan suatu framework/panduan umum yang mendefinisikan beberapa pekerjaan/tugas yang dikerjakan pada setiap tahapan/fase pada proses pengembangan software. SDLC meliputi empat fase proses pengembangan sistem yang saling berhubungan dan berkisambungan, yaitu perencanaan (planning), analisis (analysis),

perancangan (design), dan implementasi (implementation).

Sesuai karakteristik penelitian, penulis berusaha mengelaborasi model rancangan sinergisitas antara proses bisnis, pengendalian intern dan bentuk-bentuk adopsi TIK, maka dari keempat fase proses pengembangan sistem SDLC tersebut, penulis memfokuskan pada dua fase proses, yaitu pada fase analisis dan perancangan sistem.

Melalui metode ini, penulis melakukan teknik penggalian dan pendalaman atas proses bisnis sistem belanja perjalanan dinas yang berjalan saat ini, sebagai bahan analisis terhadap sistem dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan beserta kekuatan atas sistem belanja perjalanan dinas saat ini.

Berdasarkan hasil analisis sistem yang berjalan saat ini, penulis selanjutnya berusaha menemukan solusi alternatif untuk memperkuat dengan menutup kelemahan atas sistem yang dipergunaan. Selanjutnya, merangkai berbagai solusi tersebut bentuk rancangan konseptual sistem belanja perjalanan dinas dengan melakukan penyelarasan antara proses bisnis sistem belanja negara khususnya perjalanan dinas, konsep-konsep pengendalian intern dan pemanfaatan TIK. Sehingga hasil akhir dari penelitian adalah sebuah kolaborasi tiga unsur tersebut yang disajikan dalam bentuk model E-Government yang terintegrasi pada sistem belanja perjalanan dinas.

1.2. Sumber Data dan Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini, penulis mempergunakan

sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, pengamatan dan wawancara, yang antara lain dapat dikelompokkan menjadi empat sumber, yaitu

- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, belanja negara dan perjalanan dinas;
- Teori, literatur, tata kelola/framework yang berkaitan dengan pengendalian intern organisasi;
- Teori, literature, tata kelola/framework yang berkaitan dengan sistem informasi dan TIK;
- Pengalaman pribadi, pengamatan terhadap objek penelitian, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan perjalanan dinas.

Strategi yang dipergunakan pada penelitian ini mempergunakan pendekatan berbasis proses

(process-centered methodology) atau sering dikenal dengan manajemen proses bisnis (business process management/BPM), yaitu suatu pendekatan sistematis untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan melakukan optimasi proses bisnis suatu organisasi. Melalui BPM, perbaikan proses bisnis yang lebih bertahap dan berkelanjutan dapat didukung melalui penerapan TIK.

Sementara itu manajemen proses bisnis dapat dikelola melalui sistem BPM (BPMS) suatu sistem yang dapat mengotomasi dan memfasilitasi perbaikan-perbaikan proses bisnis. BPMS sendiri mempunyai kemampuan dalam memperbaiki komunikasi dan kolaborasi, automasi kegiatan-kegiatan, dan mengintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya serta para pemangku kepentingan lainnya melalui rantai nilai (value chain).

Dengan demikian, pada pendekatan ini penulis lebih banyak melakukan pengkajian dan analisis terhadap permasalahan objek penelitian terutama berkaitan dengan proses bisnis pada sistem belanja perjalanan dinas yang berlaku. Penulis

berusaha melakukan penelaahan, mengidentifikasi fakta-fakta terkait dengan objek penelitian, yaitu pada sistem belanja perjalanan dinas melalui kajian literatur yang terkait seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori, framework/tata kelola terkait SPI dan pengembangan sistem.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta atas sistem yang saat ini dipergunakan, penulis mendokumentasikan melalui diagram alir proses bisnis dengan mempergunakan software business process model and notation (BPMN). Berdasarkan diagram alir tersebut, penulis mengidentifikasi kelemahan atas sistem yang berjalan, termasuk dengan melakukan tinjauan berdasarkan SPI yang diterapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ditemukan, penulis melakukan analisis untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan pada proses bisnis melalui kajian literatur dan praktik-praktik terbaik (best practices) untuk menemukan berbagai alternatif pemecahan permasalahan pada objek penelitian. Selanjutnya mengolah gagasan perbaikan proses bisnis atas sistem tersebut dengan merangkai dalam bentuk rancangan model sistem informasi berbasis E-Government belanja perjalanan dinas. Melalui rancangan model tersebut diharapkan mampu meningkatkan

efektivitas sistem belanja perjalanan dinas dalam mencegah penyimpangan belanja negara.

1.3. Tahapan Penelitian

3.3.1. Analisis Sistem

Pada tahapan penelitian ini, penulis melakukan identifikasi terhadap kondisi sistem yang berjalan, yaitu sistem belanja perjalanan dinas PNS yang dipergunakan saat ini, selanjutnya penulis melakukan analisis atas sistem yang dipergunakan. Adapun tujuan tahapan ini adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi sistem yang sedang dipergunakan, berbagai kelemahan atas sistem yang ada, serta mengidentifikasi gagasan rekomendasi penyempurnaan terhadap sistem yang berjalan. Tahapan analisis meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Pengumpulan data pendahuluan.

Pengumpulandatapendahuluan

(preliminary survey) dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai sistem yang berjalan, unit organisasi yang menjadi bagian dari sistem tersebut, termasuk cakupan implementasi sistem tersebut. Berdasarkan analisis pendahuluan selanjutnya penulis mengumpulkan data pokok sebagai bahan analisis utama terhadap sistem berjalan yang menjadi objek penelitian. Adapun metode pengumpulan data pendahuluan dilakukan melalui pengamatan dan penelusuran data, fakta, dan literatur dari berbagai sumber.

b) Pengumpulan data pokok.

Pengumpulan data pokok dilakukan setelah mendapatkan gambaran analisis atas penelaahan terhadap data pendahuluan yang telah diperoleh sebelumnya. Data pokok tersebut berkaitan dengan penerapan sistem yang berjalan saat ini, data diperoleh melalui pengumpulan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan dan prosedur, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi sistem yang ada. Selain itu juga melalui pendalaman terhadap pengalaman melaksanakan perjalanan dinas, wawancara dengan pegawai baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sistem yang menjadi objek penelitian. Teknik wawancara tersebut dilakukan dalam rangka melakukan verifikasi atau memperoleh kepastian mengenai suatu permasalahan yang perlu

mendapatkan kejelasan. Selanjutnya, penulis juga mempergunakan metode observasi dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih utuh perihal suatu fakta terkait dengan pelaksanaan sistem yang menjadi objek penelitian.

c) Analisis data

Pada tahapan ini penulis melakukan analisis dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun maksud dari analisis data adalah dalam rangka mendapatkan gambaran yang utuh mengenai permasalahan atas objek penelitian yang dikaji, yaitu berupa gambaran proses bisnis pada sistem belanja saat ini dalam rangka mengidentifikasi kelemahan sistem.

d) Pemetaan kondisi sistem yang diterapkan.

Berdasarkan gambaran proses bisnis yang diperoleh pada tahap analisis data, selanjutnya penulis mengidentifikasi kondisi sistem yang berjalan saat ini, seperti kelemahan-kelemahan sistem yang memunculkan potensi penyimpangan pada belanja negara, untuk selanjutnya menjadi dasar penyempurnaan dan rekomendasi perbaikan proses bisnis pada rancangan sistem yang diusulkan.

3.3.2. Perancangan Sistem

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada tahapan analisis terhadap sistem yang ada, penulis melakukan kajian literatur dan praktik-praktik penerapan sistem yang diterima secara umum yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya penulis berusaha menggali berbagai alternatif solusi untuk mengurai dan memperbaiki kelemahan atas kondisi sistem yang berjalan saat ini untuk kemudian dirangkai menjadi sebuah gagasan perbaikan atas proses bisnis.

Atas gagasan tersebut, penulis menyusun rekomendasi penyempurnaan proses bisnis pada sistem perjalanan dinas dalam bentuk rancangan model secara konseptual sistem informasi berbasis E-Government yang mengintegrasikan proses bisnis, teknologi informasi, dan bentuk-bentuk pengendalian intern.. Pada tahapan perancangan sistem, penulis mempertimbangkan beberapa framework SPI, tata kelola dan metode pengembangan SI seperti COSO ICIF, COBIT 5, TOGAF 9.1.

1.4. Validasi dan Evaluasi

Berdasarkan rancangan model E-Government

yang penulis hasilkan, selanjutnya penulis melakukan validasi dan evaluasi dari pakar yang independen melalui expert judgement dalam rangka mendapatkan masukan, penilaian yang objektif, kritikan, dan saran dari pemangku kepentingan. Selanjutnya, berdasarkan hasil validasi dan evaluasi tersebut, penulis melakukan perbaikan dan penyempurnaan rancangan model E-Government pada sistem perjalanan dinas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Sistem

4.1.1. Lingkup Sistem Belanja Negara

A. APBN dan Pengelolaan Keuangan Negara

APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara setiap tahun ditetapkan melalui penerbitan undang-undang dengan persetujuan DPR. Dengan ditetapkannya UU APBN, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan APBN, yang pelaksanaannya dituangkan melalui keputusan presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian APBN, masing-masing kementerian/lembaga menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan kegiatan.

Pertanggungjawaban APBN merupakan bentuk akuntabilitas setelah pelaksanaan APBN selama periode satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan keuangan untuk mendapatkan pemeriksaan dari BPK RI. Hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational

Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dalam lingkup APBN, perlu ditetapkan pejabat perbendaharaan negara pada masing-masing kementerian negara dan lembaga. Secara garis besar pejabat perbendaharaan negara dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengguna anggaran, bendahara umum negara, dan bendahara penerimaan/pengeluaran.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai PA atas bagian anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut. Pejabat perbendaharaan negara pada setiap kementerian negara/lembaga meliputi PA, KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), dan bendahara pengeluaran.

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sementara itu KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Sedangkan, PP SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Menteri Keuangan bertindak selaku Bendahara Umum Negara (BUN), selanjutnya mengangkat Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kuasa BUN didelegasikan pada Ditjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

B. Pengujian Belanja Negara

PPK/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Sedangkan pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Kuasa BUN

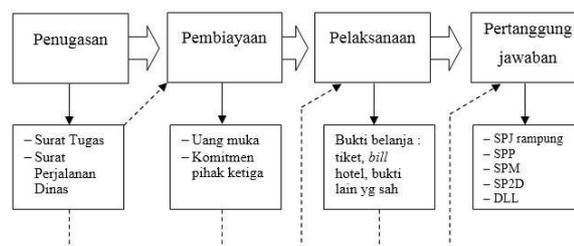
4.1.2. Proses Bisnis pada Sistem Perjalanan Dinas

A. Siklus Belanja Perjalanan Dinas

Secara umum siklus belanja perjalanan dinas meliputi empat tahapan, yaitu penugasan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (gambar 4). Adapun rincian keempat tahapan tersebut sebagai berikut :

1) Penugasan

Tahapan penugasan merupakan tahapan awal pada perjalanan dinas. Diawali dengan adanya penugasan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas ke suatu daerah tertentu. Penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan bentuk otorisasi penugasan perjalanan dinas kepada pegawai. Dengan demikian ST dan SPD adalah dokumen sumber yang telah diotorisasi oleh pejabat berwenang, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dokumen sumber legal untuk keperluan pemrosesan transaksi pada siklus belanja perjalanan dinas.



Gambar 4. Siklus belanja perjalanan dinas
Sumber: diolah dari PMK No.113 Tahun 2012

2) Pembiayaan

Terbitnya ST dan SPD menjadi dasar untuk melaksanakan transaksi pada tahap pembiayaan. Tahapan pembiayaan bertujuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan pegawai untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, seperti biaya transportasi, penginapan, uang saku, konsumsi, dsb.

3) Pelaksanaan

Pada tahap ini, biaya berupa uang persediaan yang sudah disediakan dan/atau komitmen pihak ketiga dapat dipergunakan untuk membiayai keperluan transportasi, penginapan, dan biaya lainnya yang dapat dibebankan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa dokumen realisasi belanja perlu disimpan oleh pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas antara lain seperti tiket transportasi baik pesawat, kereta api, bis, kapal laut, taksi dan angkutan lainnya, faktur tagihan penginapan/hotel, dan daftar pengeluaran riil lainnya. Berbagai jenis dokumen tersebut diperlukan untuk proses pertanggungjawaban perjalanan dinas.

4) Pertanggungjawaban

Tahapan pertanggungjawaban merupakan bagian akhir dari siklus perjalanan dinas. Pada tahap ini, berbagai dokumen sumber yang dihasilkan pada ketiga tahapan sebelumnya diproses melalui beberapa fase transaksi untuk selanjutnya dihasilkan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) rampung dan penyelesaian tagihan biaya perjalanan dinas, baik berupa penggantian uang muka persediaan, pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas, dan pembayaran kepada pihak penyedia jasa atas pelayanan yang telah diberikan kepada PNS yang melaksanakan perjalanan dinas.

B. Hubungan para Pemangku Kepentingan

Proses bisnis belanja perjalanan dinas melibatkan beberapa entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, antar organisasi pemerintahan maupun dengan perbankan dan penyedia jasa seperti perusahaan transportasi udara, darat dan laut, hotel ataupun penginapan. Pada tahapan penugasan, proses bisnis hanya melibatkan organisasi pemerintahan, yaitu satuan kerja. Sedangkan pada siklus pembiayaan, selain satker selaku PA, transaksi juga bisa melibatkan KPPN selaku BUN dan bank operasional yang

berfungsi untuk melakukan transfer dana kepada satker sesuai dengan perintah dari KPPN ataupun kepada penyedia jasa.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, transaksi belanja perjalanan dinas melibatkan satker dengan penyedia jasa dalam hal mekanisme pembiayaan melalui UP dari bendahara pengeluaran satker yang dapat dipergunakan pelaksana perjalanan dinas untuk melakukan transaksi belanja.

Transaksi pada tahapan pertanggungjawaban melibatkan pengguna anggaran, KPPN, penyedia jasa dalam hal mekanisme pembiayaan melalui LS, bank operasional sebagai mitra KPPN untuk melakukan pembayaran baik kepada rekanan pihak ketiga maupun kepada satker berdasarkan perintah tertulis dari KPPN. Pada gambar 5 menunjukkan keterkaitan antar organisasi berkaitan dengan perjalanan dinas.



Gambar 5. Relasi antar Pemangku Kepentingan
Sumber: diolah dari PMK No.113 Tahun 2012

C. Gambaran Umum Sistem Perjalanan Dinas
Berdasarkan fungsinya, mekanisme pada sistem belanja saling berhubungan. Namun demikian, sistem belanja perjalanan dinas yang terdiri dari empat subsistem (tahapan) berjalan secara mandiri berdasarkan fungsi dengan aplikasi yang berbeda dan dengan standar pengolahan data yang tidak seragam.



Gambar 6. Gambaran Umum Sistem Perjalanan Dinas
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Sistem belanja perjalanan dinas yang masih tersekat-sekat karena transaksi yang terjadi pada beberapa fungsi yang berbeda melibatkan relasi

antar entitas. Sistem aplikasi yang dikembangkan BUN hanya dapat diimplementasikan pada sebagian tahapan. Sementara aplikasi pengolahan data pada tahapan yang lain diserahkan pada satker, sehingga masih banyak satker yang mempergunakan aplikasi manual berupa pengolah kata ataupun mengembangkan aplikasi secara mandiri yang dioperasikan secara standalone. (gambar 6).

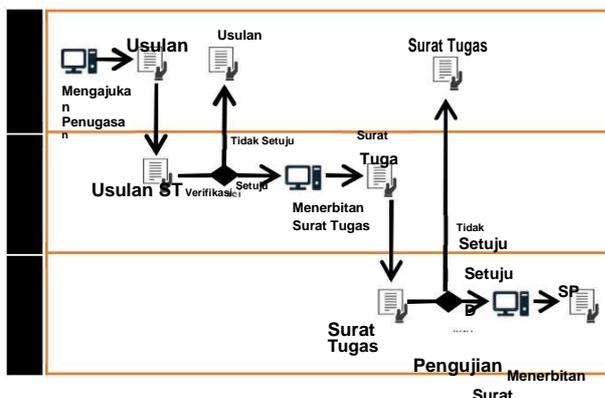
D. Diagram Alir Belanja Perjalanan Dinas

Berdasarkan prosedur dan mekanisme transaksi yang terjadi, diagram alir sistem perjalanan dinas pada masing-masing tahapan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Subsistem Penugasan

Terdapat tiga pihak yang bertanggungjawab pada proses penerbitan dokumen ST dan SPD, yaitu pemilik kegiatan, KPA dan PPK. Pemilik kegiatan mengusulkan penugasan kepada pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas. Melalui aplikasi yang ada diterbitkan dokumen usulan ST yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada KPA.

KPA melakukan verifikasi berkas, yaitu dengan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi penugasan pegawai melalui lembar monitoring penerbitan surat tugas yang telah diadministrasikan. Apabila KPA menemukan duplikasi penugasan, maka dokumen usulan ST dikembalikan kepada pemilik kegiatan, sehingga usulan penugasan tidak dapat diproses lebih lanjut, namun apabila tidak ada duplikasi dan permasalahan administratif lainnya, maka KPA dapat menerbitkan ST dan menyampaikan kepada PPK. Dokumen ST tersebut antara lain berisi pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu dan tempat pelaksanaan tugas.

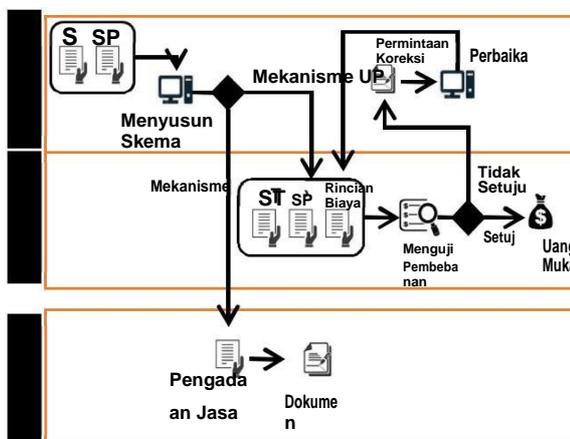


Gambar 7. Diagram Alir Tahapan Penugasan
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan ST yang diterbitkan, PPK melakukan pengujian kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas dengan kinerja yang direncanakan. Jika PPK tidak menemukan adanya permasalahan, maka PPK menerbitkan SPD yang berisikan PPK penerbit SPD, rincian nama dan jabatan pegawai yang ditugaskan, maksud perjalanan dinas, tingkat biaya perjalanan dinas, alat angkutan, tempat tujuan dan lama perjalanan dinas, pembebanan anggaran, dsb. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar 7.

2. Subsistem Pembiayaan

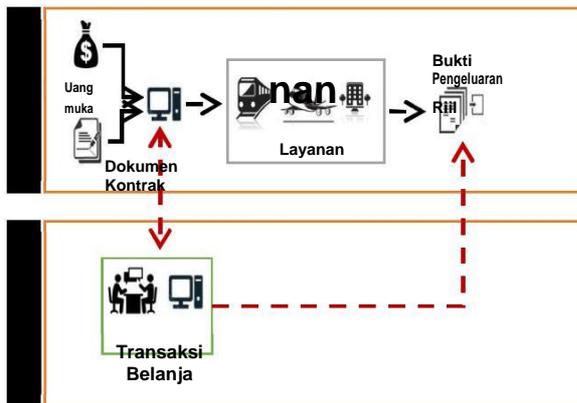
Tahap pembiayaan melibatkan PPK, bendahara pengeluaran dan penyedia jasa dari perusahaan publik dan swasta. Prosedur dimulai ketika PPK menetapkan skema pembiayaan perjalanan dinas, yaitu melalui uang persediaan ataupun melalui pembayaran langsung. Pada mekanisme UP, PPK mengajukan uang muka perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan dokumen. Selanjutnya bendahara pengeluaran melakukan pengujian pembebanan biaya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Permintaan koreksi terkait perhitungan, kelengkapan dokumen administratif disampaikan kepada PPK apabila diperlukan. Selanjutnya, bendahara mempersiapkan uang muka perjalanan dinas yang akan disampaikan kepada PPK. Namun, apabila PPK mempergunakan mekanisme pembiayaan LS, maka PPK mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa dengan menyusun dokumen kontrak/komitmen dengan pihak ketiga. Adapun gambaran tahapan pembiayaan seperti pada gambar 8.



Gambar 8. Diagram Alir Tahapan Pembiayaan
Sumber: diolah dari berbagai sumber

3. Subsistem Pelaksanaan

Proses bisnis melibatkan transaksi belanja antara pelaksana SPD dengan pihak ketiga selaku penyedia jasa, baik biro perjalanan, event organizer, perusahaan transportasi dan penginapan, dsb. Pelaksana SPD mengumpulkan bukti pengeluaran riil yang dibelanjakan untuk keperluan transportasi dan penginapan. Bukti pengeluaran tersebut antara lain berupa tiket pesawat, kereta api, kapal laut, bis ataupun angkutan umum lainnya, airport tax, kuitansi pembayaran penginapan, dll. (lihat gambar 9).



Gambar 9. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan
Sumber: diolah dari berbagai sumber

4. Pertanggungjawaban

Pelaksana SPD mengumpulkan seluruh bukti pengeluaran riil terkait dengan perjalanan dinas seperti tiket, airport tax, bill hotel, dan bukti lainnya. Seluruh dokumen SPJ tersebut selanjutnya disampaikan kepada PPK. Apabila ada sisa dana perjalanan dinas dikembalikan ke bendahara pengeluaran.

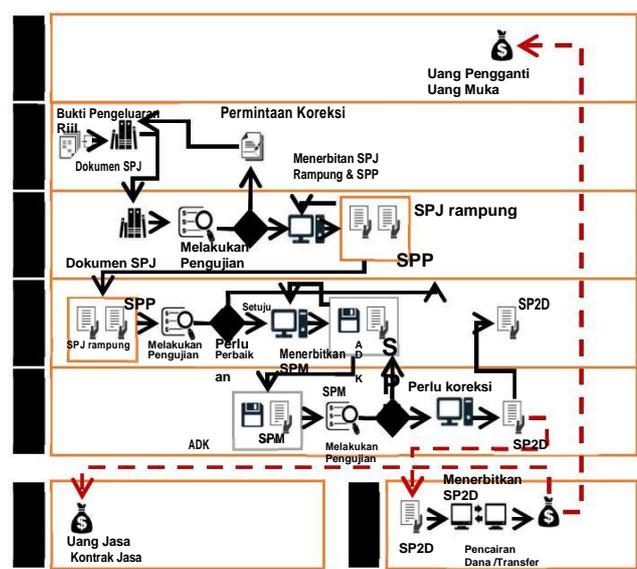
Berdasarkan dokumen SPJ yang disampaikan pelaksana SPD, PPK melakukan pengujian berkas SPJ yang diajukan, yaitu berupa pengujian kelengkapan berkas, tidak ada SPJ ganda, keakuratan perhitungan dan keabsahan berkas pengeluaran riil, serta kebenaran materiil berkas dokumen SPJ atas biaya perjalanan dinas. Apabila masih terdapat berkas dokumen yang belum lengkap, perhitungan tidak akurat, berkas bukti pengeluaran yang disampaikan palsu/melebihi harga standar (mark up), maka PPK berhak menolak untuk memproses SPJ dan mengembalikan berkas SPJ kepada pelaksana SPD hingga berkas tersebut diperbaiki.

PPK bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan

bukti mengenai hak tagih kepada negara. Setelah PPK yakin akan kebenaran materiil dokumen SPJ, PPK akan menerbitkan SPJ rampung termasuk berkas daftar nominatif perjalanan dinas, dan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk disampaikan kepada pejabat penandatanganan SPM. Selanjutnya PP SPM melakukan pengujian berkas SPP dan lampiran.

PP SPM bertanggungjawab atas kebenaran, kelengkapan dan keabsahan secara administrasi atas dokumen SPP yang disampaikan PPK sebagai dasar penerbitan SPM. Apabila berkas SPP dan dokumen pendukung yang diajukan PPK belum memenuhi persyaratan, maka PP SPM berhak menolak dan mengembalikan berkas SPP kepada PPK untuk perbaikan berkas. Namun, apabila berkas SPP memenuhi persyaratan untuk dapat dibayarkan, maka PP SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SPM. Selanjutnya, PP SPM menyampaikan berkas SPM dan arsip data komputer (ADK) ke KPPN dalam rangka pencairan dana pengganti uang persediaan ataupun dana pembayaran atas kontrak pengadaan jasa pihak ketiga.

KPPN menerima berkas SPM dan ADK SPM dari petugas pengantar SPM yang ditetapkan KPA satker. Berkas SPM tersebut merupakan dasar untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Namun sebelum menerbitkan SP2D, petugas KPPN melakukan penelitian dan pengujian terhadap berkas SPM yang disampaikan satker.



Gambar 10. Diagram Alir Tahapan Pertanggungjawaban
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Apabila hasil penelitian dan pengujian terhadap berkas SPM memenuhi persyaratan, maka KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka pemindahbukuan dana perjalanan dinas dari rekening pengeluaran BUN ke rekening yang dituju. Salinan SP2D tersebut disampaikan kepada satker dan bank operasional rekening bendahara pengeluaran BUN berada. Selanjutnya, bank

operasional melakukan pemindahbukuan sejumlah dana yang tertera pada SP2D kepada rekening penerima. Ilustrasi proses pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas seperti nampak pada gambar 10.

4.1.3. Kelemahan SPI pada Proses Bisnis

Secara umum, masih terdapat kelemahan proses bisnis pada sistem perjalanan dinas yang berkontribusi pada ketidakefektifan SPI. Lemahnya SPI pada sistem belanja perjalanan dinas berawal pada adanya peluang munculnya penugasan perjalanan dinas fiktif dan ganda pada tahapan penugasan. Penugasan perjalanan dinas fiktif dan ganda membuka peluang munculnya penyimpangan pada tahapan selanjutnya, yaitu pada siklus pembiayaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ketidakefektifan SPI pada seluruh tahapan perjalanan dinas berkontribusi pada perjalanan dinas fiktif dan ganda. Berikut ini merupakan beberapa kelemahan mekanisme dan prosedur sistem berjalan yang berkontribusi pada ketidakefektifan rancangan SPI pada belanja perjalanan dinas.

1) Tahapan Penugasan

a) Mekanisme penerbitan dokumen penugasan rawan penyimpangan.

Walaupun sudah ada pemisahan fungsi penerbitan dokumen penugasan, baik ST dan SPD, namun lingkungan pemrosesan data masih membuka adanya peluang penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dokumen penugasan.

b) Prosedur tidak menjamin mampu mendeteksi adanya penugasan ganda.

Prosedur penerbitan dokumen penugasan belum mampu mendeteksi adanya penugasan ganda pada pegawai. Sistem seperti ini tidak bisa mendeteksi secara akurat adanya penugasan ganda pada seorang pegawai karena cara-cara manual masih memungkinkan adanya kekeliruan,

di samping penugasan seorang pegawai melalui satker lain belum tentu tercatat pada daftar monitoring pelaksanaan perjalanan dinas suatu satker.

c) Sistem tersekat-sekat dari proses bisnis. Proses bisnis masih dilakukan secara manual

dengan aplikasi pemrosesan data standar, dioperasikan dengan sistem standalone, sehingga tidak terhubung dengan tahapan pada proses bisnis secara keseluruhan sistem belanja perjalanan dinas. Dengan rancangan prosedur yang belum terintegrasi membuka peluang lolosnya berkas penugasan fiktif dan ganda.

2) Tahapan Pembiayaan

a) Pengujian verifikasi berkas secara manual.

Prosedur pengujian verifikasi pada berkas sebagai dasar pembiayaan sebagian besar dilakukan secara manual. Mekanisme dan prosedur demikian berpeluang membuka kekeliruan dalam proses verifikasi berkas.

b) Sistem tersekat-sekat dari proses bisnis.

Seperti pada tahapan penugasan, proses bisnis pada tahapan pembiayaan juga tidak terhubung dengan proses bisnis yang lain. Mekanisme dan prosedur pada tahapan penugasan dilakukan secara mandiri dan dengan cara konvensional sehingga memungkinkan terjadinya peluang kekeliruan dan penyimpangan pada proses pembiayaan perjalanan dinas. Sistem belum mampu melakukan validasi keabsahan dan kelengkapan data penugasan sebagai dasar untuk menetapkan pembiayaan secara akurat.

c) Pengujian keakuratan perhitungan pembiayaan lemah.

Pada tahapan pembiayaan, prosedur pengujian keakuratan perhitungan biaya perjalanan dinas dilakukan dengan sederhana dan manual sehingga berpotensi munculnya peluang ketidakakuratan perhitungan. Hal ini karena mekanisme pembiayaan tidak terhubung dengan informasi harga standar yang berlaku di pasar. Proses bisnis dilakukan melalui sistem tidak terhubung dengan informasi harga pasar yang real-time.

3) Tahapan Pelaksanaan

a) Sistem tidak didukung informasi yang memadai tentang pengeluaran selama perjalanan dinas.

Proses bisnis pada tahapan pelaksanaan tidak didukung adanya sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan tersedianya informasi yang andal mengenai rekapitulasi transaksi belanja

yang dilakukan pelaksana SPD. Sehingga tidak bisa dipergunakan sebagai mekanisme pengendalian preventif untuk mencegah tindakan kecurangan dan penyimpangan pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

b) Prosedur pengendalian pada saat proses pelaksanaan masih lemah.

Rancangan prosedur pengendalian pada tahapan pelaksanaan masih lemah karena terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan pelaksana perjalanan dinas untuk melakukan kecurangan dan tindak penyimpangan belanja. Pelaksana SPD masih mungkin untuk tidak menjalani perjalanan dinas sesuai dengan tempat tujuan dan lamanya hari perjalanan dinas sebagaimana dinyatakan pada berkas SPD. Namun, pada saat yang sama pelaksana SPD memungkinkan untuk dapat mempertanggungjawabkan penugasan perjalanan dinas dengan memperoleh berkas bukti transaksi belanja secara mudah.

c) Sistem tersekat-sekat dari proses bisnis.

Mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan prosedur yang tidak terhubung dengan proses bisnis secara keseluruhan pada perjalanan dinas. Kondisi demikian membuka peluang adanya penyimpangan pada saat transaksi belanja, karena data pengeluaran pelaksana SPD tidak tercatat secara realtime pada sistem belanja. Transaksi belanja baru dapat dicatat pada tahap pertanggungjawaban, selang beberapa hari setelah pegawai kembali ke tempat kerja sesuai melaksanakan perjalanan dinas.

4) Tahapan Pertanggungjawaban

a) Rancangan dan mekanisme verifikasi berkas dokumen SPJ masih lemah.

Mekanisme pertanggungjawaban bukti belanja perjalanan dinas pada sistem saat ini, menjadikan pula mekanisme verifikasi berkas untuk menguji keaslian dan keabsahan bukti pengeluaran riil seperti tiket, airport tax, kuitansi penginapan, dan bukti lainnya dilakukan dengan cara konvensional seperti mengamati dan membandingkan. Sementara itu proses verifikasi keaslian bukti transaksi melalui pihak yang menerbitkan berkas tersebut sulit dilakukan, karena tidak ada perjanjian yang mengikat antara pemerintah dan perusahaan penyedia jasa.

b) Sistem tersekat-sekat dari proses bisnis.

Sistem belanja perjalanan dinas tidak mengintegrasikan tahapan pertanggungjawaban dengan proses bisnis. Proses bisnis yang tersekat-

sekat menyebabkan proses pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak mampu secara akurat mendeteksi adanya tindak kecurangan dan penyimpangan belanja perjalanan dinas.

c) Sistem belanja tidak didukung dengan informasi yang andal dan memadai tentang data dan jejak rekam penyedia jasa (supplier).

Rancangan sistem belanja perjalanan dinas saat ini belum menyediakan sistem informasi yang andal dan memadai tentang jejak rekam penyedia jasa. Informasi mengenai penyedia jasa sangat penting dalam rangka proses validasi untuk memastikan keaslian, kelengkapan, keabsahan dan keaslian berkas transaksi.

d) Dokumen SPJ rentan dipalsukan.

Mekanisme pertanggungjawaban dokumen SPJ perjalanan dinas pada sistem yang berjalan, sebagian besar berupa dokumen berbasis kertas sehingga membuka peluang pemalsuan dokumen SPJ, terutama pada berkas transaksi pengeluaran riil seperti tiket, kuitansi penginapan/hotel, dan bukti transaksi lainnya.

4.1.4. Rekomendasi Perbaikan pada Proses Bisnis

Adanya kelemahan proses bisnis menyebabkan ketidakefektifan SPI dalam mencegah potensi penyimpangan perjalanan dinas, berupa perjalanan dinas fiktif atau ganda perlu mendapatkan perhatian dan penyempurnaan sistem. Beberapa rekomendasi penyempurnaan untuk memperkuat keefektifan SPI dalam rangka mencegah penyimpangan perjalanan dinas antara lain:

1) Perbaikan prosedur pengendalian pada seluruh tahapan proses bisnis.

Prosedur pengendalian pada seluruh tahapan proses bisnis perlu diperbaiki melalui perancangan mekanisme pengendalian yang kuat sehingga dapat memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh data dan dokumen diproses dengan cara benar, akurat dan sah sehingga mampu mencegah peluang adanya perjalanan dinas yang fiktif maupun ganda. Mekanisme pengendalian yang kuat dirancang sesuai dengan lingkungan pemrosesan data berbasis elektronik melalui penerapan berbagai teknik/prosedur pengendalian umum dan aplikasi. Sehingga dengan prosedur pengendalian tersebut mampu meminimalisir adanya potensi perjalanan dinas fiktif dan ganda, serta mencegah penyalahgunaan belanja perjalanan dinas.

2) Perbaiki rancangan dokumen sumber.

Rancangan dokumen sumber perlu diperbaiki dari sisi bentuk, format dan jenis-jenis pengendalian. Dokumen sumber selama ini rentan dipalsukan seperti tiket, bukti penginapan, dsb., sebagaimana dipaparkan melalui temuan BPK RI. Penggunaan dokumen elektronik yang memungkinkan dilakukannya verifikasi ke sumber yang menerbitkan dokumen secara real-time, mampu meminimalkan pemalsuan dokumen.

3) Menyatukan tahapan pada proses bisnis secara terintegrasi.

Mekanisme dan prosedur pada proses bisnis perlu diintegrasikan sebagai suatu sistem yang terpadu. Melalui integrasi diharapkan dapat memperkuat prosedur pengendalian pada sistem perjalanan dinas. Dengan adanya sistem yang terintegrasi akan mampu mencegah adanya kecurangan dan pemalsuan dokumen, serta mendeteksi adanya penugasan perjalanan dinas fiktif dan ganda.

4) Kolaborasi dengan organisasi yang terkait belanja perjalanan dinas.

Sistem belanja perjalanan dinas dirancang agar memungkinkan kolaborasi dengan organisasi terkait dalam proses bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempermudah proses bisnis, mempercepat transaksi belanja, mencegah secara dini adanya potensi kecurangan pegawai, mendeteksi adanya gejala penyimpangan belanja perjalanan dinas.

5) Automasi pemrosesan transaksi pada proses bisnis.

Penerapan automasi transaksi dapat membantu mempercepat pemrosesan transaksi, meningkatkan keakuratan pada pengujian dan verifikasi data dan dokumen sumber perjalanan dinas. Melalui automasi transaksi diharapkan dapat menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan belanja.

6) E-Government untuk integrasi proses bisnis.

Dalam rangka melakukan integrasi proses bisnis dan mendukung kolaborasi antar unit organisasi baik pada lembaga pemerintahan, BUMN, perusahaan publik maupun swasta serta memperkuat efektivitas SPI, sistem belanja perjalanan dinas dapat diterapkan melalui sistem informasi E-Government.

7) Memperkuat komponen SPI pada proses bisnis.

Keefektifan SPI pada proses bisnis perjalanan

dinas secara keseluruhan dapat diperkuat melalui rancangan komponen SPI yang diimplementasikan pada tahapan proses bisnis dan organisasi yang terlibat sesuai dengan relevansi penerapan dengan memperhatikan konsep biaya manfaat.

4.2. Rancangan Model E-Government

4.2.1. Prinsip Pokok Sistem

Pada prinsipnya upaya untuk menyelaraskan proses bisnis pada sistem perjalanan dinas dengan bentuk-bentuk penerapan TIK dalam rangka memperkuat keefektifan sistem dalam meminimalisasi terjadinya adanya potensi-potensi fraud yang dapat menyebabkan penyimpangan belanja negara. Sehingga upaya sinergisitas tersebut juga tidak terlepas dari sisi pengendalian intern, khususnya pada lingkungan pengendalian berbasis teknologi informasi. Adapun berkaitan dengan model sistem E-Government yang dirancang dalam rangka mengatasi permasalahan pokok pada sistem perjalanan dinas saat ini, berupa penyimpangan-penyimpangan belanja, berikut merupakan prinsip-prinsip pokok yang menjadi pondasi model E-Government tersebut:

1) Konektivitas

Model E-Government dirancang untuk dapat saling menghubungkan seluruh tahapan proses bisnis belanja perjalanan dinas dan entitas organisasi yang terkait dengan proses bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian seluruh rangkaian transaksi dari tahap penugasan hingga pertanggungjawaban, yang melibatkan pemangku kepentingan diupayakan saling terhubung melalui suatu sistem dengan mempertimbangkan prinsip keamanan informasi (confidentiality, integrity, availability).

2) Integrasi

Rancangan model E-Government didasarkan atas prinsip integrasi sistem dimana seluruh transaksi, data dan informasi diintegrasikan melalui sebuah sistem informasi sehingga proses bisnis tidak tersekat-sekat berdasarkan masing-masing tahapan proses bisnis atau sub sistem yang berbeda-beda.

3) Automasi Sistem

Sistem belanja perjalanan dinas dengan transaksi yang meliputi beberapa tahapan pemrosesan data dengan dukungan keterlibatan layanan pihak ketiga sebagai penyedia jasa, diharapkan dapat mengadopsi suatu sistem automasi pada pemrosesan transaksi elektronik.

Melalui automasi diharapkan dapat mewujudkan keandalan sistem informasi dalam mencegah potensi kecurangan karena sistem mengurangi intensitas interaksi manusia.

4) Kolaborasi

Proses bisnis melibatkan interaksi para pemangku kepentingan seperti pengguna anggaran dengan KPPN, hal ini melibatkan transaksi yang dapat terjadi pada hampir setiap daerah di Indonesia, termasuk juga melibatkan lembaga keuangan perbankan maupun penyedia jasa seperti perusahaan transportasi dan penginapan. Melalui rancangan E-Government yang terintegrasi maka berbagai interaksi tersebut diarahkan terjalin melalui kolaborasi yang intensif disertai dengan tata kelola pelayanan sesuai dengan prosedur yang baku yang diadopsi.

5) Fleksibilitas

Dengan rancangan model E-Government yang mengintegrasikan seluruh tahapan proses bisnis serta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat, maka prinsip fleksibilitas menjadi hal yang wajib pada tataran operasional sistem secara keseluruhan. Dengan demikian dapat mengurangi kendala operasional sistem ketika sistem sedang berjalan, artinya pengguna dihindarkan dari kendala berupa prosedur yang rumit dan kaku terkait dengan transaksi secara teknis, masalah birokrasi, ketersediaan penyedia layanan yang terhubung dengan sistem perjalanan dinas, dokumen bukti belanja perjalanan dinas, dsb.

6) Kemudahan

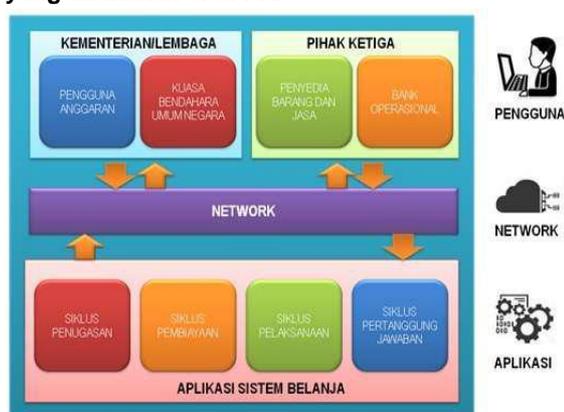
Prosedur operasional model E-Government dirancang agar memberikan kemudahan para pengguna pada seluruh tingkatan sesuai dengan peran (role) dan wewenang (authority) pada masing-masing proses bisnis para pemangku kepentingan. Tampilan pada lapis antarmuka (interface) pada modul, menu, formulir dan lainnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh para pengguna sehingga menghindari kerumitan dalam menjalankan aplikasi.

4.2.2. Model Integrasi E-Government

Integrasi sistem meliputi penyatuan proses bisnis yang tersekat-sekat berdasarkan fungsi, tahapan dan unit organisasi yang berinteraksi dengan proses bisnis tersebut. Proses bisnis diintegrasikan melalui suatu sistem informasi perjalanan dinas berbasis E-Government

sehingga masing-masing entitas bisnis dapat saling terhubung pada proses bisnis yang terintegrasi.

Sesuai dengan prinsip konektivitas seluruh entitas bisnis pengguna sistem, baik lembaga pemerintahan maupun pihak ketiga selaku penyedia jasa saling terhubung melalui jaringan komunikasi data. Adapun pengguna pada lembaga pemerintahan meliputi satker pengguna anggaran dan para pegawai yang terdapat pada setiap kementerian negara dan lembaga. Adapun Kementerian Keuangan selaku BUN yang diwakili KPPN di setiap kabupaten/kota di Indonesia, selaku bendahara pengeluaran negara juga merupakan pengguna sistem E-Government ini. Melalui sistem tersebut, KPPN sebagai pihak yang bertanggungjawab pada pembayaran dan pengeluaran kas atas belanja perjalanan dinas yang dilakukan oleh PA.



Gambar 11. Diagram Model Integrasi Sistem
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Sementara itu pengguna sistem lainnya meliputi perbankan, maskapai udara, perusahaan/agen transportasi, biro perjalanan, hotel dan penginapan, termasuk event organizer, dsb. Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan penyedia jasa dengan terhubung pada sistem E-Government perjalanan dinas, antara lain perusahaan tersebut mempunyai kesempatan yang besar untuk mengajukan penawaran layanan penyediaan jasa pada belanja perjalanan dinas yang dibiayai APBN, sehingga muncul kompetisi untuk menawarkan jasa transportasi dan penginapan yang berkualitas, murah dan kompetitif.

Seluruh tahapan proses bisnis perjalanan dinas diintegrasikan, dihubungkan melalui jaringan data yang mampu menghubungkan data dan informasi secara berkesinambungan dengan meninggalkan jejak audit (audit trail) pada seluruh transaksi yang

terjadi. Diagram pada Gambar 11 menggambarkan model integrasi sistem belanja perjalanan dinas yang mengadopsi model E-Government.

Model E-Government dirancang mampu mengintegrasikan seluruh siklus pada proses bisnis sehingga penyederhanaan proses birokrasi memungkinkan terjadi. Dengan proses birokrasi yang sederhana dan hemat maka pemrosesan transaksi pada belanja negara dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

4.2.3. Gambaran Umum Proses Bisnis

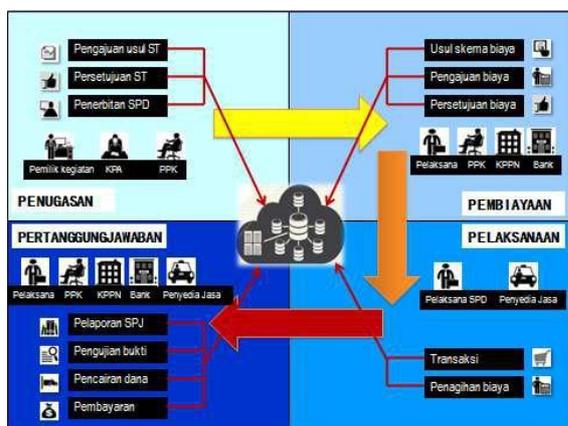
Model integrasi sistem berpengaruh pada mekanisme dan prosedur transaksi belanja perjalanan dinas. Penerapan model E-Government yang terintegrasi mengubah lingkungan pemrosesan data dari semula berbasis tradisional menjadi lingkungan sistem berbasis TI. Adapun gambaran umum proses bisnis model E-Government sistem belanja perjalanan dinas yang mengintegrasikan keseluruhan tahapan/siklus dengan para pemangku kepentingan sistem yang memungkinkan kolaborasi pada proses bisnis sebagaimana nampak pada Gambar 12.

Secara ringkas, mekanisme proses bisnis diawali dengan tahapan penugasan, pada tahapan ini diawali dengan pengajuan usulan penugasan dari pemilik kegiatan masing-masing satuan kerja, yang selanjutnya diikuti dengan prosedur otorisasi persetujuan penugasan dan penerbitan surat perjalanan dinas. Prosedur tersebut dilaksanakan oleh para pegawai (user account) melalui tampilan muka dashboard sistem perjalanan dinas sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing pengguna (user roles and tasks).

Selanjutnya pada tahapan pembiayaan, berupa mekanisme untuk membebaskan komponen pembiayaan perjalanan dinas berdasarkan batasan biaya (standard cost) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem dimungkinkan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas pembebanan komponen perjalanan dinas sesuai dengan yang batasan yang dimungkinkan misalnya terkait metode pembayaran uang persediaan ataupun langsung (LS). Adapun model sistem E-Government bisa menerapkan pembiayaan dengan basis mata uang elektronik (e-money) yang didistribusikan secara virtual ke masing-masing akun pelaksana kegiatan perjalanan dinas dalam rangka keperluan transaksi elektronik ataupun uang tunai yang ditransfer melalui rekening pegawai untuk transaksi lainnya.

Pada tahapan pelaksanaan perjalanan dinas, pengguna atau pelaksana SPD melakukan transaksi pemesanan tiket perjalanan dinas dan penginapan melalui tampilan menu yang tersedia pada dashboard akun masing-masing pegawai. Selanjutnya, mekanisme pembayaran transaksi dilakukan oleh kuasa BUN melalui sistem pembayaran elektronik yang melibatkan perbankan dengan perusahaan penyedia layanan jasa. Adapun batas transaksi sesuai dengan nominal kredit e-money yang tersedia pada akun virtual pengguna sistem.

Adapun pada tahap pertanggungjawaban berupa pelaporan bukti pertanggungjawaban, pengujian bukti-bukti serta pembayaran dana kepada rekanan. Bukti pertanggungjawaban dikumpulkan secara elektronik melalui sistem, sementara itu laporan-laporan dan bukti transaksi lainnya yang terjadi menggunakan mekanisme berbasis kertas (paper based) atau diluar sistem E-Government, maka berkas disampaikan dengan cara mendokumentasikan dalam format berkas pdf hasil pemindaian yang selanjutnya diupload ke sistem E-Government. Mekanisme pengujian bukti-bukti transaksi oleh pejabat yang terkait baik PPK, KPA hingga pejabat di KPPN dapat dilakukan secara otomatis ataupun semi otomatis. Pada tahap akhir berupa pencairan dana dilakukan setelah verifikasi berkas secara elektronik oleh kuasa BUN atas dokumen seperti SPM, SP2D dan diterbitkan dokumen permintaan transfer pembayaran secara elektronik kepada bank operasional. Bank melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal sesuai dengan permintaan Kuasa BUN.



Gambar 12. Diagram Alir Aktivitas
Sumber: diolah dari berbagai sumber

4.2.4. Penyempurnaan pada Proses Bisnis

Rancangan model E-Government yang terintegrasi memerlukan penyempurnaan proses bisnis atas prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk memperkuat efektivitas pengendalian intern dalam mencegah terjadinya potensi penyimpangan belanja negara. Adapun beberapa perbaikan proses bisnis antara lain sebagai berikut:

1) Mengadopsi Model Database Tunggal

Skema database ini mengintegrasikan seluruh data secara komprehensif yang sebelumnya tersekat-sekat berdasarkan aplikasi dan sistem tunggal. Melalui model database tunggal ini berbagai data dan informasi tidak perlu dilakukan perekaman secara berulang-ulang pada setiap tahapan proses bisnis maupun para pengguna sistem E-Government. Dengan model single database pada sistem E-Government belanja perjalanan dinas, maka berbagai manipulasi untuk menghilangkan jejak data dan transaksi akan sulit dilakukan sehingga mampu menjaga integritas data dan informasi dalam rangka pertanggungjawaban perjalanan dinas.

2) Sistem Automasi pada Pemrosesan Data

Sistem dirancang dapat memproses data transaksi secara otomatis sehingga mengurangi campur tangan manusia yang berpotensi menimbulkan kekeliruan, ketidakakuratan maupun manipulasi data. Sistem automasi pemrosesan data dapat menyederhanakan prosedur, mempercepat proses birokrasi dan menjaga integritas data. Sistem secara otomatis menyampaikan notifikasi pesan kepada para pengguna sistem sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun proses input data pada seluruh tahapan proses bisnis dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem, sehingga data yang diperlukan pada siklus pembiayaan dapat dihasilkan secara otomatis melalui sistem aplikasi berdasarkan input data pada siklus sebelumnya. Demikian pula berbagai data dan berkas elektronik pada tahapan pertanggungjawaban belanja dihasilkan otomatis melalui subsistem yang terintegrasi.

3) Transaksi Hemat Kertas (Less-Paper)

Sistem E-Government dirancang mempergunakan berkas elektronik sehingga penggunaan dokumen kertas (paper-based) diupayakan seminimal mungkin. Dengan sistem

informasi berbasis elektronik memungkinkan pemrosesan data secara otomatis sehingga dapat menghemat penggunaan kertas dan mampu menjaga efektivitas SPI karena sistem dapat mencegah upaya pemalsuan dokumen transaksi.

4) Mekanisme E-Payment dan Minimal Transaksi Tunai

Model E-Government dirancang agar penggunaan uang tunai untuk keperluan transaksi belanja terjadi secara minimal dan terbatas. Berdasarkan prinsip-prinsip pokok sistem E-Government maka penggunaan uang tunai untuk keperluan transaksi dengan pihak penyedia jasa dapat dibatasi, karena transaksi diarahkan dalam bentuk pembayaran elektronik. Penerapan transaksi elektronik pada proses bisnis belanja perjalanan dinas akan memberikan kemudahan transaksi dan mengurangi risiko penyimpangan belanja oleh pelaksana perjalanan dinas. Hal ini karena transaksi yang terjadi bersifat formal dalam bentuk government to business sehingga dapat mengurangi risiko adanya rekayasa transaksi yang dapat merugikan keuangan negara. Namun demikian, penerapan transaksi e-payment tidak menghilangkan sama sekali transaksi tunai (cash transaction). Sesuai dengan prinsip fleksibilitas, dalam hal terjadi transaksi diluar mekanisme normal sebagai akibat sistem E-Government tidak dapat diimplementasikan secara sempurna, maka sistem masih mengakomodasi penggunaan transaksi tunai.

4.2.5. Arsitektur Jaringan Model E-Government

Model E-Government dirancang sebagai suatu sistem informasi yang terintegrasi pada seluruh proses bisnis dan para pemangku kepentingan yang meliputi lembaga pemerintahan, BUMN dan swasta.

Dengan cakupan sistem tersebut, maka sistem secara terpusat akan menghubungkan seluruh pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sistem E-Government menghubungkan seluruh entitas yang terkait dengan proses bisnis melalui jaringan komunikasi data, baik jaringan intranet maupun internet. Diagram pada Gambar 14 berikut menyajikan gambaran umum arsitektur jaringan untuk rancangan model E-Government sistem perjalanan dinas.



Gambar 14. Arsitektur Jaringan Model E-Government
Sumber: diolah dari berbagai sumber

4.2.6. Model Rancangan SPI pada E-Government

Model E-Government sistem perjalanan dinas telah mengubah paradigma pengendalian (control) dari lingkungan sistem berbasis tradisional menuju pengendalian intern dengan lingkungan sistem berbasis TI. Pada lingkungan berbasis TI, prosedur pengendalian diarahkan pada dua kategori utama yaitu pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control).

Prosedur pengendalian pada tahapan proses bisnis dirancang untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) bahwa data dan informasi dibuat, diproses, dikelola dan dihasilkan melalui prosedur yang menjaga kredibilitas pemrosesan transaksi elektronik pada sistem online. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan sesuai dengan tujuan-tujuan SPI dan kualitas informasi yang diharapkan.

Adapun tujuan yang diharapkan pada praktik dan prosedur pengendalian terhadap model E-Government terkait dengan SPI antara lain berupa kelengkapan (completeness), keakuratan (accuracy), keabsahan (validity), dan otorisasi (authorization).

1) Pengendalian Umum

Jenis-jenis pengendalian umum yang dapat diterapkan pada model E-Government antara lain berupa pengendalian proses implementasi sistem E-Government, pengendalian piranti lunak sistem E-Government, pengendalian piranti keras, pengendalian keamanan data, dan pengendalian administrasi, dsb.

2) Pengendalian Aplikasi

Sementara itu pengendalian aplikasi diimplementasikan pada sistem aplikasi E-Government belanja perjalanan dinas, baik berupa prosedur manual maupun automasi untuk memastikan bahwa hanya data yang telah diotorisasi secara cukup diproses melalui sistem aplikasi secara akurat dan lengkap. Secara garis

besar terdapat tiga jenis pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian masukan (input control), pengendalian pemrosesan (processing control) dan pengendalian output (output control).

4.2.7. Aspek SDM pada Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian berperan pada keberhasilan keefektifan SPI, sehingga perlu dirancang secara memadai agar mampu membentuk kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya pengendalian intern pada sistem perjalanan dinas. Beberapa hal yang dapat memperkuat kesadaran untuk melaksanakan pengendalian antara lain berupa penanaman integritas, nilai etika dan budaya organisasi, munculnya keteladanan dan sikap anti korupsi dari para pejabat tinggi negara, pemberian insentif berupa tunjangan penghasilan yang memadai kepada pegawai, dan penerapan sanksi disiplin yang tegas terkait pelanggaran praktik perjalanan dinas.

4.2.8. Implementasi E-Government dan Permasalahan Birokrasi

Implementasi model E-Government pada sistem belanja perjalanan dinas akan mengubah perilaku dan tatanan model bisnis. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi baik yang bersifat positif berupa munculnya dukungan, maupun yang bersifat negatif berupa munculnya perlawanan (resistensi) terhadap penerapan sistem yang baru. Dengan demikian, para pengambil kebijakan hendaknya mampu menyusun suatu strategi terbaik yang dituangkan melalui proses manajemen perubahan yang komprehensif.

5. KESIMPULAN

Proses bisnis pada sistem belanja perjalanan dinas meliputi empat siklus, yaitu penugasan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Namun, sistem perjalanan dinas saat ini masing-masing tahapan proses bisnis tersebut memiliki sistem aplikasi yang berbeda-beda, termasuk menghasilkan data dengan jenis, format dan standar yang berbeda. Mekanisme dan prosedur pengendalian intern pada sistem belanja perjalanan dinas saat ini masih membuka adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penyimpangan belanja negara.

Dengan sistem dan aplikasi yang masih

tersekat-sekat berdasarkan proses bisnis dan unit satker yang berbeda menjadikan prosedur kerja yang berdiri sendiri, sehingga belum mampu mendeteksi adanya praktik-praktik penugasan fiktif dan ganda. Di sisi yang lain munculnya peluang penugasan perjalanan dinas fiktif dan ganda membuka peluang munculnya penyimpangan pada tahapan selanjutnya, yaitu pada saat tahapan pembiayaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dengan demikian proses bisnis pada perjalanan dinas saat ini masih belum efektif mencegah terjadinya potensi penyimpangan belanja perjalanan dinas.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperkuat rancangan sistem dengan SPI yang secara efektif mampu mencegah munculnya peluang terjadinya penyimpangan belanja negara atau fraud, penulis menyajikan suatu rancangan sistem informasi model E-Government dengan rancangan sistem yang mengintegrasikan seluruh tahapan proses bisnis dan para pemangku kepentingan yang terkait.

Rancangan model E-Government, hendaknya disertai dengan penyempurnaan proses bisnis, yaitu dengan mengadopsi single database, automasi pemrosesan data, rancangan sistem less paper, mengadopsi transaksi elektronik (e-payment) dengan mengurangi transaksi tunai. Dengan rancangan model E-Government yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan seluruh stakeholder maka ketersediaan infrastruktur jaringan data perlu mendapatkan prioritas, yaitu dalam rangka menyediakan koneksi Internet dan Intranet bagi para pengguna sistem tersebut.

Model E-Government pada sistem perjalanan dinas dirancang dengan lingkungan sistem pemrosesan data berbasis teknologi informasi, sehingga harus mengadopsi berbagai prosedur pengendalian berbasis TI supaya dapat secara efektif memperkuat sistem. Dengan demikian prosedur pengendalian perlu diselaraskan dengan model E-Government dalam rangka memperkuat keandalan rancangan SPI sehingga mampu mencegah penyimpangan belanja perjalanan dinas.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini membahas bagaimana mengelaborasi pemanfaatan TI dalam bentuk rancangan model E-Government pada sistem perjalanan dinas sehingga dapat mendukung

sinergisitas antara proses bisnis dengan model sistem informasi yang diadopsi. Melalui rancangan model E-Government diharapkan dapat memperkuat keefektifan SPI pada sistem perjalanan dinas sehingga mampu meminimalkan potensi terjadinya fraud atau penyimpangan pada belanja negara. Pada penelitian ini, penulis mengulas rancangan model E-Government pada sistem perjalanan dinas dengan gagasan yang bersifat umum yang disinergikan dengan bentuk-bentuk penerapan TI dan penerapan SPI pada lingkungan berbasis TI.

Pada penelitian ini, penulis tidak membahas secara rinci proses bisnis beserta prosedur operasional secara teknis rancangan model E-Government. Penulis juga tidak membahas secara khusus perancangan aplikasi (prototype) pada sistem perjalanan dinas. Termasuk berkenaan dengan rancangan SPI, penulis hanya menguraikan gambaran umum dan gagasan pokok implementasi prosedur pengendalian yang dapat memperkuat keefektifan SPI pada belanja perjalanan dinas. Sehingga perihal implementasi komponen SPI secara lengkap dan sistematis pada rancangan model E-Government perjalanan dinas tidak dibahas secara khusus.

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan para praktisi, pengambil kebijakan maupun akademisi dapat melakukan kajian yang lebih mendalam pada pembahasan yang lebih luas, khususnya terkait dengan aspek kelayakan (feasibility study) maupun perancangan sistem E-Government tersebut secara keseluruhan. Termasuk pembahasan dari aspek teknis ketersediaan infrastruktur pendukung sistem E-Government berupa jaringan data di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Turban, E. dan Linda Volonino. 2011. *Information Technology for Management – Improving Strategic and Operational Performance*. Edisi 8. USA: John Wiley & Sons, Inc.

Naskah Produk Kebijakan

Republik Indonesia. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan

- Strategi Nasional Pengembangan E-Government.**
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.**
- BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015.**
- BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014.**
- BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013.**
- BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012.**
- BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.**
- BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012.**
- Sumber Jurnal Ilmiah**
- Agrawa R., et al. 2006. Taming Compliance with Sarbanes-Oxley Intern Controls Using Database Technology. Journal IEEE. Vol.06.**
- Akinyomi O.J. 2012. Examination of Fraud in the Nigerian banking Sectors and its Prevention. Asian Journal of Management Research. Vol.3. No. 1: hal 184-192.**
- Al-Laith, Ali Abdl Ghani. 2012. Adaptation of the Internal Control Systems with the Use of Information Technology and its Effects on the Financial Statements Reliability: An Applied Study on Commercial Banks. International Management Review. Vol.8. No.1: hal 12-20.**
- Almarabeh, T. dan Amer AbuAli. 2010. General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success. European Journal of Scientific Research.**
- Vol.39. No.1: hal 29-42.**
- Ameen, A.A. dan Kamsuriah Ahmad. 2011. The Role of Financial Information Systems in Anti Financial Corruptions : A Theoretical Review. Journal of IEEE. hal 1-6.**
- Chen, Guoying. dan Qiong Xu. 2012. The Effectiveness and Limitations of Internet Anti-Corruption: A Perspective of Institutional Analysis. Jurnal IEEE. Vol. 12: hal 85-90.**
- COSO. 2013. Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary. Publikasi.**
- COSO. 1994. Internal Control-Integrated Framework. Publikasi.**
- Fang, Zhiyuan. 2002. E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development. International Journal of Computer, the Internet and Management. Vol.10. No.2: hal 1-22.**
- INTOSAI. 2004. Guidelines for Internal Control Standars for the Public Sector. Viena, Austria.**
- Irani, Z., Madi Al-Sebie, dan Tony Elliman. 2006. Transacation Stage of E-Government System: Identification of Location and Importance. Journal of IEEE. Vol.6. hal 1-9.**
- ISACA. 2012. COBIT 5 Introduction. diakses dari <http://www.isaca.org/cobit/pages/default.asp> x pada 19 Juni 2014.**
- ISACA. 2013a. COBIT 5 A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. diakses dari <http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx> pada 19 Juni 2014.**
- ISACA. 2013b. COBIT 5 Enabling Information. diakses dari <http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx> diakses pada 19 Juni 2014.**
- Khther, R.A. dan Marini Othman. 2013. COBIT Framework As a Guideline of Effective IT Governance in Higher Education: A Review.**

- International Journal of Information Technology Convergence and Services, Vol.3. No.1: hal 21-29.**
- Kim, C.K. 2013. *Anti-Corruption Initiatives and E-Government : A Cross-National Study*, Springer.
- KPMG. 2013. *COSO Internal Control Integrated Framework (2013)*. Publikasi, hal 1-8.
- Lakis, Vaclovas dan Lukas Giriunas. 2012. *The Concept of Internal Control System: Theoretical Aspect*, *Jurnal Ekonomika*. Vol. 91. No. 2: hal 142-152.
- Litan, D. et al. 2011. *Business New Requirement: Information System Integration–Method and Technologies*. *International Journal of Computers and Communication*. Vol.5. No.3: hal 1.
- McNally, J.S. 2013. *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Approach to an Effective Transition. Strategic Finance*. Edisi Juni: hal 1-18.
- NAZ, R. 2009. *E-Government for Improved Public Services Delivery in Fiji*. *Journal of Service Science & Management*. Vol. 3. hal 190-203.
- OECD E-Government Task Force. 2003. *The Case of E-Government : Excerpts from OECD Report “The E-Government Imperative”*. *OECD Journal on Budgeting*. Vol.3. No.1: hal 61-131.
- Shahkooh, K.A. dan Ali Abdollahi. 2007. *A Strategi-based Model for e-government planning*. *Journal of IEEE*, Vol.7.
- Shareef, S.M., Hamid Jahankhani dan Mohammad Dastbaz. 2013. *E-Government Stage Model: Based on Citizen-Centric Approach in Regional Government in Developing Countries*. *International Journal of Electronic Commerce Studies*. Vol.3 No.1: hal 145-164.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2010. *Peran BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah*, hal 1-17.
- Suwitri, Sri. 2007. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol 4, No.1: hal 23-41.
- United Nation. 2002. *Benchmarking E-Government: A Global Perspective*. diakses dari http://www.cm-porto.pt/users/0/61/Benchmarking_EGovernment_A_Glo_ffc7b1db93264a81aaf21c64cec46d94.pdf. pada 24 Juni 2014.
- World Bank. 2002. *The E-Government Handbook for Developing Countries*. Publikasi Online. diakses dari www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_16.pdf. pada 23 Juni 2014
- Yanging, Guo. 2011. *The Potential Opportunities and Challenges of E-Government*. *Journal of IEEE*. Vol.11.
- Zhang, S. dan Hans Le Fever. 2013. *An Examination of the Practibility of COBIT Framework and the Proposal of a COBIT-BSC Model*. *Journal of Economics, Business and Management*. Vol.1. No.4: hal 391-395.
- Zhang, J. dan Zengtian Zhang. 2009. *Applying E-Government information system for Anti-corruption Strategy*. *Journal of IEEE*. Vol.09: hal 112-115.

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL BPPK



EVALUASI KESUKSESAN IMPLEMENTASI OM SPAN MENGGUNAKAN MODEL DELONE DAN MCLEAN

M. Ichsan^a, Suryo Sujoko^b, Muhamad Guntur^c, Wida Choirunnisa^d.

^a BPPK, Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Email: ichsan.oke@gmail.com

^b DJPB, Gd. Prijadi Praptosuhardjo Lt. 3, Jl. Wahidin II No. 3, Jakarta Pusat. Email: suryo.sujoko@kemenkeu.go.id

^c BPPK, Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Email: muhamadg@gmail.com

^d BPPK, Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Email: choirs.22@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
8 April 2017

Dinyatakan Dapat Dimuat
6 November 2017

KATA KUNCI:

IS Success Models,
OM SPAN,
DeLone and McLean Model.

ABSTRAK

This study discusses DeLone and McLean Model to measure of the implementation of Online Monitoring (OM) SPAN and factors that affect success. OM SPAN is a web-based application used to monitor the planning and execution of the State Budget (APBN). OM SPAN developed and managed by the Directorate General of Treasury. Users OM SPAN as many 50s of thousands scattered nationwide from all work units of the central government. The results of this study indicate the successful implementation of information systems OM SPAN at 83% level ("Very Success"). Based on the analysis, researchers found that the information quality, system quality, and service quality simultaneously affect the user satisfaction of 44.1%. Furthermore, user satisfaction affects the net benefit of users amounted to 63.7%. The study also found that the system quality is the significant positive effect on user satisfaction. This needs to be considered by the organization for the development of OM SPAN in the future.

Penelitian ini membahas Model DeLone dan McLean untuk mengukur kesuksesan implementasi OM SPAN dan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan. OM SPAN merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). OM SPAN dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengguna OM SPAN sebanyak 50-an ribu yang tersebar secara nasional dari seluruh satuan kerja pemerintah pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesuksesan implementasi OM SPAN berada pada tingkat 83% ("Sangat Sukses"). Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan memengaruhi kepuasan pengguna sebesar 44,1%. Selanjutnya, kepuasan pengguna memengaruhi keuntungan bersih sebesar 63,7%. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh organisasi untuk pengembangan OM SPAN pada masa depan.

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif dan efisien. Namun demikian, pengukuran atau penilaian kualitas sistem informasi sulit dilakukan (Furukawa & Minami, 2013). Hal ini mendorong para peneliti mengembangkan model untuk menilai kesuksesan sebuah sistem, penelitian mengenai analisis pengaruh implementasi sistem terhadap organisasi, dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi tersebut. Salah satu model

yang populer adalah DeLone and McLean dengan sebutan Information System Success Model. Model ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu information quality, system quality, service quality, use, user satisfaction dan net benefit. Information System Success Model sudah banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur kesuksesan penerapan suatu sistem informasi (McGill, Hobbs, & Klobas, 2003), (Livari, 2005), (Petter, Delone, & McLean, 2008), (Istianingsih & Wijanto, 2008), (Wahyuni, 2011), (Utami & Samopa, 2013), (Pramadani & Mudjahidin, 2013), (Sulistyo,

2013), dan (Kanwal & Rehman, 2016).

Penelitian tentang pengukuran kesuksesan e-government dan sistem informasi (Livari, 2005) membuktikan bahwa kesuksesan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi dan kualitas informasi hasil dari sistem tersebut. Penggunaan sistem informasi yang baik mampu memberikan kepuasan pengguna dan berdampak positif pada organisasi (Wahyuni, 2011). Menurut Pramadani & Mudjahidin (2013) implementasi e-government mampu memangkas waktu yang digunakan.

Di Kementerian Keuangan terdapat sistem informasi yang digunakan secara nasional untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sistem informasi tersebut adalah Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). OM SPAN adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan APBN. OM SPAN dibangun dan dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai solusi atas kebutuhan stakeholder SPAN untuk mendapatkan informasi dari basis data Enterprise Resource Planning (ERP) SPAN secara cepat, tepat, andal dan user friendly. Pengguna OM SPAN terdiri dari internal dan eksternal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan jumlah 50-an ribu. Pengguna mendapatkan manfaat dari OM SPAN berupa akurasi informasi untuk pengambilan keputusan, kemudahan pengawasan APBN, kelancaran pelaksanaan APBN, dan sumber data penyusunan laporan. Basis data OM SPAN diperbarui secara periodik per jam dari database ERP SPAN. OM SPAN dapat diakses melalui web di alamat URL <http://spanint.kemenkeu.go.id> atau melalui aplikasi di smartphone.

Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Adanya OM SPAN ini akan membantu dalam mewujudkan amanat tersebut. Oleh karenanya, pengembangan OM SPAN perlu terus dilakukan.

Pengembangan sistem informasi memerlukan usaha dan biaya yang tidak sedikit. Sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara terkait pengelolaan keuangan negara secara efisien, ekonomis dan efektif, maka diperlukan kajian sebelum dilakukan pengembangan sistem informasi termasuk OM SPAN. Kajian dimaksud terkait evaluasi kesuksesan

implementasi OM SPAN dan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasinya.

Penelitian ini merupakan kajian yang menjawab kebutuhan pengembangan OM SPAN ke depan. Dalam penelitian ini akan dibahas tingkat kesuksesan implementasi OM SPAN, faktor-faktor pendukung kesuksesannya, dan hubungan antarfaktor tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini mengadopsi Information System Success Model DeLone dan McLean (2003) untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi OM SPAN dan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesannya.

Hasil penelitian ini berupa informasi terkait tingkat kesuksesan implementasi OM SPAN dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi terkait faktor-faktor pendukung kesuksesan implementasi OM SPAN dan hubungan antarfaktor tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan memudahkan dalam menetapkan arah pengembangan OM SPAN agar tepat sasaran, efisien, ekonomis, efektif dan mendatangkan banyak manfaat sebagaimana amanat UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang pada umumnya terdiri dari sekumpulan komponen berbasis komputer yang terintegrasi dan komponen manual yang dibangun untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan output informasi kepada pengguna (Gelinas & Dull, 2012). Definisi lain, sistem informasi adalah sekumpulan prosedur-prosedur yang sah, di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan disalurkan kepada pengguna (Hall, 2011). Menurut (Stair & Reynolds, 2010) Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dimana komponen tersebut mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyebarkan data dan informasi serta menyediakan mekanisme timbal balik sedemikian rupa untuk memenuhi suatu tujuan.

2.2. Pengukuran Tingkat Kesuksesan

Menurut Purwanto (2007) dalam Utami dan Samopa (2013), pengukuran tingkat kesuksesan terbagi menjadi 5 tingkat seperti tampak pada Tabel 1. Utami dan Samopa (2013) mengadopsi model pengukuran tingkat kesuksesan Purwanto (2007) untuk mengukur tingkat kesuksesan Sistem Informasi Akademik.

Sedangkan teori tentang kesuksesan sistem informasi dikenalkan oleh DeLone dan McLean pada

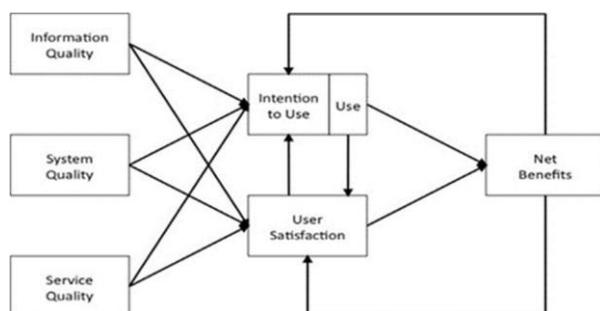
tahun 1992 dengan sebutan Information Systems Success Model (IS Success Model). Model ini memberikan pemahaman secara komprehensif tentang keberhasilan sistem informasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung kesuksesan penerapan sistem. Faktor-faktor tersebut adalah information quality, system quality, use, user satisfaction, individual impact, dan organizational impact.

Tabel 1. Tingkat Kesuksesan

Tingkat	% Kesuksesan	Makna
1	0% - 20%	Sangat tidak sukses
2	21% - 40%	Tidak sukses
3	41% - 60%	Cukup sukses
4	61% - 80%	Sukses
5	81% - 100%	Sangat sukses

Sumber: Purwanto (2007)

Pada tahun 2003, IS Success Model mengalami perkembangan terkait faktor atau dimensi untuk mengukur kesuksesan penerapan sistem informasi. Dimensi tersebut adalah information quality, system quality, service quality, use, user satisfaction dan net benefit (DeLone & McLean, 2003). Hubungan antara dimensi pengukuran ini tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Information Systems Success Model
 Sumber: DeLone dan McLean (2003)

Pada Gambar 1 tampak bahwa D&M IS Success Model memiliki enam dimensi yang saling berhubungan. Detail enam dimensi tersebut adalah:

- **System Quality** - digunakan untuk mengukur kualitas sistem informasi dari software dan hardware. Kualitas sistem adalah kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi untuk menyediakan informasi sesuai kebutuhan pengguna (DeLone & McLean, 1992). Kualitas sistem diukur secara subyektif oleh pengguna, sehingga kualitas sistem yang digunakan adalah persepsi kualitas sistem (perceived system quality). Pengukuran kualitas sistem

menggunakan indikator-indikator, yaitu; adaptability, availability, reliability, response time, usability, convenience of access, dan system integration.

- **Information Quality** - digunakan untuk mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi (Jogiyanto, 2007). Kualitas informasi ini adalah kualitas informasi yang diukur secara subyektif oleh pengguna atau disebut persepsi kualitas informasi. Pengukuran kualitas informasi menggunakan indikator-indikator, yaitu completeness, ease of understanding, personalization, relevance, security, format of output, currency, dan precision.
- **Service Quality** - merupakan perbandingan antara harapan pengguna dengan layanan diterima. Terdapat tiga komponen yang memengaruhi kualitas layanan (service quality), yaitu jaminan (assurance) kualitas yang diberikan sistem, kepedulian sistem (system empathy) terhadap pengguna, system responsiveness yaitu kualitas respon sistem terhadap permintaan pengguna (DeLone dan McLean, 2003). Pengukuran kualitas layanan menggunakan indikator-indikator, yaitu assurance, empathy dan responsiveness.
- **Use** - dibedakan untuk penggunaan keluaran (information use) dan penggunaan sistem (system use) (Jogiyanto, 2007). Pengukuran use dengan indikator-indikator, yaitu nature of use, navigation patterns, number of site visits, number of transactions executed.
- **User Satisfaction** - merupakan respon dan umpan balik dari pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. Pengukuran kepuasan pengguna menggunakan indikator-indikator, yaitu repeat purchases, repeat visits, user surveys (DeLone dan McLean, 2003).
- **Net Benefit** - adalah hasil bersih atau keuntungan yang dirasakan oleh individu dan juga organisasi setelah menerapkan sistem informasi. Pengukuran net benefit menggunakan indikator-indikator, yaitu; cost savings, expanded markets, incremental additional sales, reduced search costs, tim saving, ease of job, effectiveness, speeds of accomplishing task, usefulness in work (Davis, 1989).

2.3. Structural Equation Model Structural Equation Modelling (SEM) adalah

sebuah evolusi dari model persamaan berganda yang dikembangkan dari prinsip ekonometri dan digabungkan dengan prinsip pengaturan dari psikologi dan sosiologi (Ghozali, 2008). Menurut Bowen dan Guo (2011), SEM merupakan kerangka untuk menguji moderasi model atau model untuk mengetahui variasi efek dari satu variabel dengan beberapa variabel lain sampai tingkat ketiga.

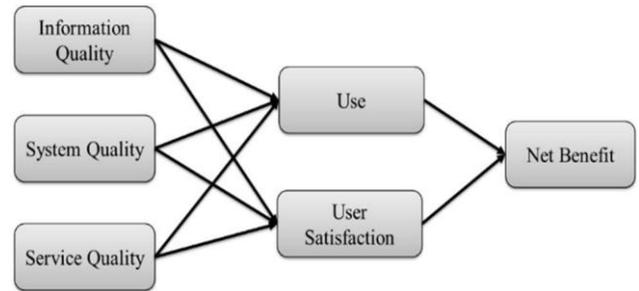
Menurut Ghozali (2008) dalam persamaan SEM terdiri beberapa variabel yaitu variabel eksogen (independen), variabel endogen (dependen), dan variabel mediasi (intervening). Variabel disebut eksogen jika posisi variabel dalam diagram model struktural tidak didahului oleh variabel sebelumnya. Variabel endogen jika posisi variabel dalam diagram model struktural didahului oleh posisi sebelumnya. Sedangkan variabel mediasi karena memiliki anteseden variabel yang mendahului dan konsekuen (variabel yang mengikuti).

Menurut Wiyono (2011) pendekatan dalam estimasi relasi pada SEM ada 2, yaitu covariance based (CB-SEM) dan variance based atau Partial Least Squares (PLS-SEM). CB-SEM cocok digunakan untuk pengujian dan pengembangan model. Namun jika terjadi ketidakpastian dari pendugaan skor faktor, maka akan menyebabkan menurunnya keakuratan prediksi. Sedangkan PLS-SEM cocok digunakan jika tujuan utamanya untuk prediksi. Model PLS-SEM merupakan alternatif untuk pemodelan persamaan struktural berbasis varian, di mana dalam analisis data tidak mengharuskan data terdistribusi normal dan bebas dari multikolinieritas (Garson, 2016).

2.4. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

IS Success Model Delone dan McLean telah digunakan banyak peneliti untuk mengukur kesuksesan implementasi sistem informasi (McGill, Hobbs, & Klobas, 2003), (Livari, 2005), (Petter, Delone, & McLean, 2008), (Istianingsih & Wijanto, 2008), (Wahyuni, 2011), (Utami & Samopa, 2013), (Pramadani & Mudjahidin, 2013), (Sulistyo, 2013), dan (Kanwal & Rehman, 2016). Hasil penelitian mereka di antaranya kualitas informasi secara signifikan memengaruhi kepuasan pengguna (Istianingsih & Wijanto, 2008). Livari (2005) dan (Wahyuni, 2011) membuktikan bahwa kesuksesan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi dan kualitas informasi. Petter, Delone, dan McLean (2008) menemukan bahwa penambahan kualitas layanan membawa perubahan dalam penggunaan IS success model, terutama pengembangan fenomenal pada e-commerce.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran artikel ini adalah tampak pada Gambar 2.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini mendasari penyusunan kuesioner hasil modifikasi (DeLone & McLean, 2003), (Davis, 1989) dan (Livari, 2005) sebagaimana terlampir (Lampiran I).

Hasil penelitian Baroudi, Olson, & Ives (1986) Use berpengaruh tidak signifikan terhadap user satisfaction. Pendapat Baroudi, Olson, & Ives (1986) juga didukung oleh penelitian Radityo & Zulaikha (2007) dan McGill, Hobbs, dan Klobas (2003). Penelitian (Utami & Samopa, 2013), dan (Kanwal & Rehman, 2016) berhasil membuktikan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan memengaruhi kesuksesan sistem informasi. Sulistyo (2013) menemukan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap intensi penggunaan dan kepuasan pengguna. Sulistyo (2013) dan Utami & Samopa (2013) juga menemukan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bersih yang diterimanya. Penelitian lain menemukan bahwa kepuasan pengguna dan penggunaan terelisasi dari IS Success Model karena sistem yang diteliti adalah bersifat mandatori (Sedera, Gable, & Chan, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 : Information Quality berpengaruh positif terhadap Use
- H2 : Information Quality berpengaruh positif terhadap User Satisfaction
- H3 : System Quality berpengaruh positif terhadap Use
- H4 : System Quality berpengaruh positif terhadap User Satisfaction
- H5 : Service Quality berpengaruh positif terhadap Use
- H6 : Service Quality berpengaruh positif terhadap User Satisfaction
- H7 : Use berpengaruh positif terhadap Net Benefit
- H8 : User Satisfaction berpengaruh positif terhadap Net Benefit.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel dipengaruhi oleh variabel independen (Wiyono, 2011). Variabel dependen atau endogen dalam model kesuksesan sistem informasi adalah:

- User Satisfaction (US) – adalah kepuasan dari pengguna OM SPAN atas aplikasi dan outputnya.
- Use (UI) - adalah penggunaan OM SPAN oleh pengguna akhir atas kesadaran dan keinginannya sendiri.
- Net Benefit (NB) – adalah manfaat bersih atau keuntungan yang dirasakan oleh individu dan juga organisasi setelah menerapkan sistem informasi.

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap variabel dependen (Wiyono, 2011). Variabel independen atau eksogen dalam model kesuksesan sistem informasi adalah:

- Information Quality (IQ) - adalah kualitas informasi yang diukur secara subyektif oleh pengguna atau disebut sebagai persepsi kualitas informasi.
- System Quality (SQ) - adalah kualitas sistem informasi yang merupakan kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi untuk menyediakan informasi sesuai kebutuhan pengguna.
- Service Quality (SEQ) – adalah kualitas layanan yang merupakan perbandingan antara harapan pengguna dengan layanan yang diterimanya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen penelitian berupa kuesioner (Lampiran I). Kuesioner tersebut merupakan modifikasi dan pengembangan penelitian (DeLone & McLean, 2003), (Livari, 2005) dan (Davis, 1989). Kuesioner penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator. Skala Likert terdiri dari lima tingkat preferensi jawaban yaitu; Sangat tidak setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Selanjutnya, kuesioner berserta petunjuk pengisiannya

dikirim kepada pengguna OM SPAN secara acak melalui email.

Kebutuhan pengambilan sampel menurut Hair et al. (1998) dalam Wiyono (2011) untuk model multivariate data analysis adalah 5 kali jumlah item pertanyaan pada kuesioner. Sedangkan untuk metode pemilihan sampelnya menggunakan random sampling. Hal ini berdasarkan Wiyono (2011), metode random sampling cocok digunakan jika karakteristik populasi homogen atau relatif homogen.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah SEM. Menurut Bacon (2009) kelebihan menggunakan SEM adalah:

- a. SEM memberikan pengamatan yang lebih luas terhadap hubungan variabel laten dan variabel lainnya. Dengan menggunakan SEM dapat memodelkan variabel laten dengan beberapa variabel indikator penting dan melihat keandalan masing-masing indikatornya.
- b. SEM lebih andal untuk menguraikan dan menganalisis setiap bagian yang dikembangkan sebuah model persamaan. Sedangkan analisis jalur dan regresi berganda hanya menjangkau bagian terluar dari sebuah model penelitian.
- c. SEM mampu mengatasi data yang sulit, seperti data time series dengan kesalahan autokorelasi, data tidak terdistribusi normal, dan data tidak lengkap. Dalam analisis menggunakan regresi berganda penanganan uji asumsi klasik (normalitas data, autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas) sulit dilakukan jika sudah melibatkan variabel moderating atau intervening.

Penelitian ini termasuk penelitian konfirmatori, maka metode analisis data yang sesuai adalah CB-SEM. Metode CB-SEM merupakan metode yang digunakan untuk mengkonfirmasi sebuah teori melalui pengujian hipotesis, terutama ketika jumlah data sampel besar, data terdistribusi secara normal, dan yang terpenting model memiliki landasan teoritis yang kuat (Wong, 2013).

Menurut Ghazali dan Fuad (2008) tahap pemodelan dan analisis CB-SEM terdiri dari 7 langkah, yaitu:

- a. Konseptualisasi model. Konseptualisasi model adalah pencarian atau pengembangan sebuah model yang mempunyai dasar teoretis yang kuat. Selanjutnya, model tersebut divalidasi secara empirik melalui pemograman SEM.

Pengembangan sebuah teori yang berjustifikasi

- ilmiah adalah syarat utama dan pertama sebelum menggunakan permodelan SEM.
- b. Menyusun diagram alur. Tahap ini merupakan visualisasi dari tahap pertama, di mana konseptualisasi model yang telah dibuat dalam bentuk diagram alur. Diagram alur ini mempermudah peneliti untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji. Dalam permodelan SEM, peneliti biasanya bekerja dengan konsep yang memiliki pijakan teoretis yang cukup untuk menjelaskan berbagai bentuk hubungan.
 - c. Spesifikasi Model. Tahap ini adalah melakukan spesifikasi model dan menggambarkan sifat serta jumlah parameter yang diestimasi. Spesifikasi model ini menyusun hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten lainnya dan juga hubungan antara variabel laten dengan variabel manifest berdasarkan teori.
 - d. Identifikasi Model. Identifikasi Model adalah melakukan identifikasi kemungkinan diperolehnya nilai unik untuk setiap parameter pada model.
 - e. Estimasi parameter. Estimasi parameter merupakan estimasi terhadap model untuk menghasilkan nilai-nilai parameter menggunakan salah satu metode estimasi yang ada. Pemilihan metode estimasi seringkali ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis.
 - f. Penilaian model fit. Penilaian model fit merupakan pengujian kecocokan antara model dengan data. Beberapa kriteria ukuran kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) dapat digunakan untuk melaksanakan langkah ini.
 - g. Interpretasi dan modifikasi model. Interpretasi yaitu melihat besarnya kontribusi atau pengaruh variabel indikator terhadap variabel laten dan besarnya pengaruh antar variabel laten. Tetapi, jika model belum baik perlu dilakukan modifikasi model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Pengumpulan data menggunakan kuesioner Google Form. Selanjutnya, pemberitahuan kuesioner dikirim ke pengguna melalui surat elektronik sebanyak 500 orang pengguna secara acak. Dari 500 orang pengguna, 130 orang mengisi kuesioner secara lengkap. Jumlah responden tersebut terdiri dari 117 orang staf (90%), dan 13 orang (10%) pejabat struktural. Distribusi responden menurut asal instansi yaitu; internal Kementerian Keuangan sebanyak 5

orang (4%) dan eksternal dari Kementerian/lembaga sebanyak 125 orang (96%).

Menurut Hair et al. (1998) dalam Wiyono (2011) menyatakan bahwa para peneliti di Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan cara 5 x jumlah item pertanyaan pada kuesioner untuk multivariate data analysis. Jadi jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 130 responden sudah memenuhi syarat minimal penelitian ini yaitu sebesar 105 responden (5 x 21 pertanyaan).

Selain itu, sampel sebanyak 4% dari internal Kementerian Keuangan dan 96% berasal dari eksternal Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sampel yang diperoleh dapat merepresentasi dari populasi, di mana pengguna OM SPAN internal Kementerian Keuangan sebanyak 4% dan eksternal Kementerian Keuangan sebanyak 96%.

4.2. Analisis Pengukuran Kesuksesan Pengukuran tingkat kesuksesan menggunakan

kuesioner dengan skala 1-5. Hasil pengukuran kesuksesan implementasi OM SPAN pada Lampiran II. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, rata-rata item pengukuran sebesar 4,15 pada skala 1–5. Selanjutnya, persentase tingkat kesuksesan didapatkan 83% (4,15/5 x 100%). Berdasarkan Purwanto (2007) nilai 83% menunjukkan bahwa implementasi OM SPAN pada tingkat “Sangat sukses”.

4.3. Analisis Model

4.3.1. Uji validitas

Uji validitas menggunakan AMOS versi 21, dengan acuan nilai loading factor lebih dari 0.5. Hasilnya, beberapa variabel dihapus dari model yaitu: IQ5, UI1, UI2 dan NB4 dikarenakan nilai loading factor kurang dari 0.5.

Tabel 2. Assessment of normality

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
SEQ3	2.000	5.000	-.957	-4.456	1.783	4.149
SEQ2	2.000	5.000	-1.206	-5.615	2.600	6.051
SEQ1	2.000	5.000	-.865	-4.027	2.764	6.434
NB3	1.000	5.000	-1.269	-5.907	6.849	15.940
NB2	1.000	5.000	-1.322	-6.154	6.110	14.219
NB1	1.000	5.000	-1.346	-6.266	5.628	13.099
US2	1.000	5.000	-1.474	-6.862	4.980	11.591
US1	1.000	5.000	-1.391	-6.476	5.921	13.781
SQ1	1.000	5.000	-.990	-4.609	1.723	4.010
SQ2	1.000	5.000	-1.480	-6.891	4.018	9.352
SQ3	1.000	5.000	-1.513	-7.042	4.572	10.642
SQ4	1.000	5.000	-1.191	-5.546	1.228	2.858
SQ5	1.000	5.000	-1.333	-6.203	6.921	16.108
IQ4	1.000	5.000	-1.847	-8.598	5.590	13.009
IQ3	1.000	5.000	-1.837	-8.551	7.521	17.504
IQ2	1.000	5.000	-1.813	-8.437	5.595	13.022
IQ1	1.000	5.000	-2.038	-9.487	5.931	13.804
Multivariate					229.735	51.529

4.3.2. Uji normalitas

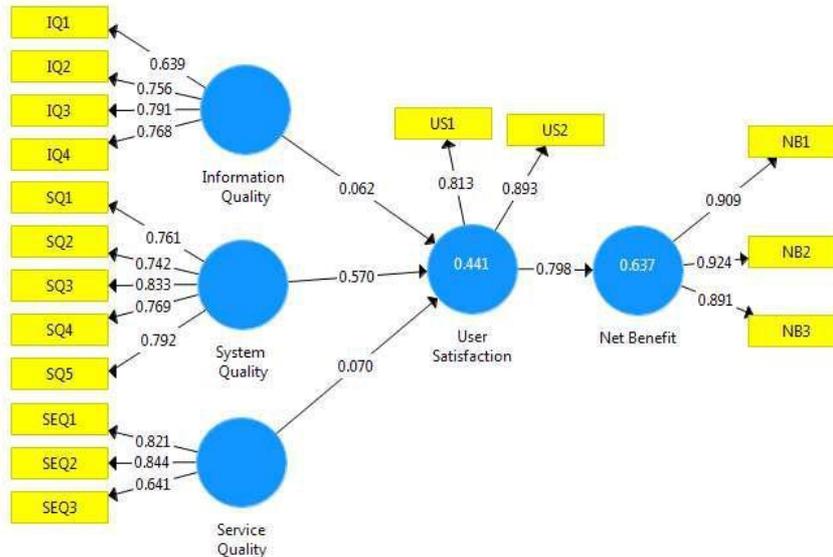
Uji normalitas menggunakan AMOS versi 21, tampak dengan nilai kritikal (c.r.) antara -2.58 s.d 2.58. Hasilnya, data terdistribusi tidak normal tampak pada nilai c.r. di luar range -2.58 s.d 2.58.

4.3.3. Uji model menggunakan PLS-SEM

PLS-SEM merupakan salah satu teknik SEM yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator, dan kesalahan pengukuran secara langsung (Wiyono, 2011). Pada Smart PLS 3.0, uji model terdiri dari outer dan inner model (Wiyono, 2011). Pertama, outer model digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel

laten dengan indikatornya. Hasil uji outer model tampak pada Gambar 3 dan Tabel 3.

PLS-SEM merupakan salah satu teknik SEM yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator, dan kesalahan pengukuran secara langsung (Wiyono, 2011). Pada Smart PLS 3.0, uji model terdiri dari outer dan inner model (Wiyono, 2011). Pertama, outer model digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Hasil uji outer model tampak pada Gambar 3 dan Tabel 3.



Gambar 1. Hasil Alogaritma PLS

Tabel 1 Pengukuran Model

Indicators	IQ	NB	SEQ	SQ	US	Status	CR	AVE	R ²
IQ1	0.639	0.176	0.263	0.483	0.235	Valid	0.829	0.549	
IQ2	0.756	0.268	0.329	0.479	0.369	Valid			
IQ3	0.791	0.448	0.328	0.606	0.437	Valid			
IQ4	0.768	0.252	0.358	0.505	0.374	Valid			
NB1	0.349	0.909	0.352	0.545	0.767	Valid	0.934	0.824	0.637
NB2	0.318	0.924	0.263	0.511	0.712	Valid			
NB3	0.441	0.891	0.315	0.620	0.692	Valid			
SEQ1	0.367	0.292	0.821	0.601	0.406	Valid	0.815	0.599	
SEQ2	0.343	0.265	0.844	0.555	0.443	Valid			
SEQ3	0.302	0.246	0.641	0.394	0.231	Valid			
SQ1	0.559	0.427	0.543	0.761	0.436	Valid	0.886	0.609	
SQ2	0.588	0.292	0.549	0.742	0.424	Valid			
SQ3	0.614	0.567	0.559	0.833	0.548	Valid			
SQ4	0.464	0.398	0.706	0.769	0.509	Valid			
SQ5	0.525	0.640	0.344	0.792	0.619	Valid			
US1	0.469	0.522	0.410	0.561	0.813	Valid	0.843	0.729	0.441
US2	0.385	0.811	0.419	0.572	0.893	Valid			

Berdasarkan Gambar 3 dan Tabel 3, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Loading factors. Nilai loading factor semua variabel dalam model lebih dari 0.5. Artinya bahwa semua variabel pada model ini sudah memenuhi syarat.
- 2) Discriminant validity. Valid, jika nilai discriminant validity atau korelasi cross loading dengan variabel latennya harus lebih besar dari korelasi terhadap variabel laten yang lain (Wiyono, 2011). Hasil pengukuran model menunjukkan nilai korelasi cross loading dengan variabel latennya lebih besar

- 3) Average Variance Extracted (AVE). Valid, jika nilai AVE di atas 0.50 (Wiyono, 2011). Hasil pengukuran model menunjukkan nilai AVE di atas 0.50, berarti bahwa variabel laten pada model ini sudah memenuhi syarat.
- 4) Composite Reliability (CR). Nilai CR yang baik jika ≥ 0.70 (Wiyono, 2011). Hasil pengukuran model menunjukkan nilai CR di atas 0.70, berarti bahwa

semua variabel laten pada model ini sudah memenuhi syarat atau dapat diandalkan.

Tabel 2. Uji Pengaruh

Hipotesis	β	t- statistic	Analisa β	Uji hipotesis
IQ -> NB	0.049	0.526	Tidak signifikan	Ditolak
IQ -> US	0.062	0.531	Tidak signifikan	Ditolak
SEQ -> NB	0.056	0.366	Tidak signifikan	Ditolak
SEQ -> US	0.070	0.345	Tidak signifikan	Ditolak
SQ -> NB	0.455	2.402	signifikan	Diterima
SQ -> US	0.570	2.645	signifikan	Diterima
US -> NB	0.798	13.070	signifikan	Diterima

Kedua, inner model digunakan untuk mengukur pengaruh antar variabel laten pada model. Hasil uji inner model tampak pada Tabel 4.

Berdasarkan Gambar 3, Tabel 3 dan Tabel 4, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. R square (R^2). R square atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat diterangkan oleh hubungan linear dengan variabel independen (Supardi, 2012). Hasil R square memiliki arti bahwa; 0.67 (baik), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah) (Wiyono, 2011). Berdasarkan tabel 2, nilai R^2 variabel laten Net Benefit sebesar 0.637 (63,7%). Artinya bahwa manfaat bersih yang didapatkan pengguna dipengaruhi oleh kepuasan pengguna sebesar 63.7% dan sisanya 36.3% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai R^2 variabel laten User Satisfaction sebesar 0.441 (44.1%). Artinya bahwa kepuasan pengguna dipengaruhi oleh faktor kualitas informasi, sistem dan layanan secara bersama sebesar 44.1% dan sisanya 55.9% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai kedua R^2 diantara 0.33 – 0.67, berarti bahwa pengaruh variabel dalam model pada tingkat moderat.
- b. Path coefficients (β). Path coefficients atau koefisien jalur digunakan untuk mengetahui nilai estimasi hubungan jalur pada model struktural (Wiyono, 2011). Berdasarkan tabel 3, semua bernilai positif dengan 3 dari 7 jalur berpengaruh signifikan.

Structural path significance. Structural path significance digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel eksogen dan endogen terhadap variabel endogen (Wiyono, 2011). Structural path

significance dapat dilakukan dengan menggunakan bootstrapping PLS dan membandingkan antara nilai t-tabel (1.985) dengan t- statistik pada level signifikansi 5%. Berdasarkan Tabel 4, 3 dari 7 hipotesis diterima dan yang lainnya ditolak

4.4. Pembahasan

Hasil pengukuran kesuksesan implementasi OM SPAN pada tingkat 83%. Berdasarkan Purwanto (2007) tingkat tersebut termasuk pada tingkat “Sangat Sukses”. Kesuksesan implementasi OM SPAN pada tingkat “Sangat Sukses” ini didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah kualitas informasi, kualitas sistem informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih yang diterima pengguna.

Selanjutnya, hubungan antara faktor-faktor pendukung kesuksesan implementasi OM SPAN adalah:

- a. Pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian dan analisis data menunjukkan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Livari, 2005), (Istianingsih & Wijanto, 2008), (Wahyuni, 2011), (Utami & Samopa, 2013), dan (Kanwal & Rehman, 2016). Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas informasi yang disajikan OM SPAN sudah baik dengan rata-rata skor 4,28 (—, —, —, —) dari skala 1-5. Sehingga, pengguna merasa puas dan mendapatkan manfaat dari informasi tersebut.
- b. Pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna dan manfaat bersih bagi pengguna. Hasil pengujian dan analisis data menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi secara langsung pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Livari, 2005) (Livari, 2005), (Istianingsih & Wijanto, 2008), (Wahyuni, 2011), (Utami & Samopa, 2013), dan (Kanwal & Rehman, 2016).

Selain itu, kualitas sistem informasi secara tidak langsung juga berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bersih bagi pengguna. Hal ini berarti bahwa hipotesis 4 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Livari, 2005) dan (Utami & Samopa, 2013).

Hasil pengukuran kualitas sistem informasi berdasarkan Purwanto (2007) menunjukkan nilai baik dengan rata-rata 4,16 (—————) dari skala 1-5. Hal ini mendukung kesuksesan implementasi OM SPAN. Namun demikian, jika kualitas sistem informasi ini ditingkatkan akan memberikan dampak pada peningkatan kepuasan pengguna dan manfaat bersih yang diterimanya.

- c. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian dan analisis data menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal ini berarti bahwa hipotesis 6 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Sedera, Gable, & Chan, 2004), namun berbeda dengan hasil penelitian (Petter, Delone, & McLean, 2008), (DeLone & McLean, 2003), dan (Utami & Samopa, 2013). Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan terkait OM SPAN sudah baik dengan rata-

rata skor 4,14 (—————) dari skala 1-5. Sehingga, pengguna merasa puas dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

- d. Pengaruh kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih bagi pengguna. Hasil pengujian dan analisis data menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bersih bagi pengguna. Hal ini berarti bahwa hipotesis 7 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan (DeLone & McLean, 2003) dan (Utami & Samopa, 2013). Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna yang didapatkan dari kualitas informasi, kualitas sistem informasi dan kualitas layanan memiliki peran penting pada manfaat yang diterima pengguna. Peningkatan yang terjadi pada kepuasan pengguna akan berdampak pada peningkatan manfaat yang diterimanya.
- e. Pengaruh penggunaan terhadap manfaat bersih bagi pengguna. Hasil pengujian dan analisis data menunjukkan bahwa penggunaan (use) dieliminasi dari model. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1, 3, 5, dan 7 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Sedera, Gable, & Chan, 2004), namun berbeda dengan hasil penelitian (DeLone & McLean, 2003) dan (Utami & Samopa, 2013). Hasil ini mengkonfirmasi hasil (Sedera, Gable, & Chan, 2004), di mana jika objek penelitian merupakan sistem informasi bersifat mandatori, maka instrumen pengukuran penggunaan tidak relevan dan dikeluarkan dari model. Hal ini memberikan informasi bahwa banyak sedikitnya pengguna dan

frekuensi penggunaan ditentukan oleh kebijakan untuk menggunakan OM SPAN.

5. KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah Kementerian Keuangan RI sangat sukses mengimplementasikan OM SPAN. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kesuksesan implementasi tersebut adalah kualitas informasi, kualitas sistem informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna.

Faktor pertama, kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna maupun manfaat bersih bagi pengguna. Artinya bahwa, peningkatan atau penurunan kualitas informasi tidak akan berpengaruh banyak pada kepuasan pengguna maupun manfaat bersih yang diterimanya.

Faktor kedua, faktor kualitas sistem informasi pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna dan manfaat bersih bagi pengguna. Artinya bahwa, peningkatan kualitas sistem informasi akan meningkatkan kepuasan dan manfaat bersih yang diterima pengguna.

Faktor ketiga, kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna maupun manfaat bersih bagi pengguna. Artinya bahwa, peningkatan atau penurunan kualitas layanan tidak akan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna maupun manfaat bersih yang diterimanya.

Faktor keempat, kepuasan pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bersih bagi pengguna. Artinya bahwa, peningkatan kepuasan pengguna akan meningkatkan manfaat bersih bagi pengguna.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini dalam jumlah sampel sebanyak 130 responden, sedangkan populasi mencapai 50-an ribu pengguna. Namun demikian, penelitian ini dilanjutkan karena karakteristik pengguna yang relatif homogen, di mana mereka adalah pengelola ABPN dengan akses dan pemahaman teknologi informasi yang relatif sama.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah:

- Penelitian mendatang dapat menggunakan IS Success model untuk meningkatkan validitas dan model riset, baik basis teori maupun penerapan empirisnya, khususnya dikaitkan dengan kondisi lokal.
- Faktor kualitas informasi dan layanan OM SPAN sudah baik. Dengan demikian jika organisasi organisasimengambilkebijakanuntuk

meningkatkan kedua faktor tersebut, tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan manfaat bersih yang diperoleh pengguna.

- c. Faktor kualitas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan manfaat bersih yang diterima pengguna. Hal ini dapat digunakan organisasi untuk menyusun kebijakan dalam pengembangan OM SPAN terkait peningkatan kualitas sistem informasinya.

7. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat disampaikan penulis berdasarkan uraian sebelumnya adalah:

- a. Bagi pengelola OM SPAN, pengembangan OM SPAN dapat difokuskan pada peningkatan kualitas sistem informasi agar meningkatkan kepuasan pengguna dan manfaat bagi pengguna. Pengembangan kualitas sistem informasi tersebut terutama pada aspek kecepatan merespon permintaan (response time) dan fleksibilitas sistem.
- b. Bagi satuann kerja atau organisasi pemerintah yang belum menggunakan OM SPAN agar segera menggunakannya untuk memudahkan dalam pengelolaan APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacon, L. D., 2009. Using AMOS for structural equation modeling in market research. Lynd Bacon & Associates.
- Baroudi, J., Olson, M., Ives, B., 1986. An Empirical Study of the Impact of User Involvement on System Usage and Information Satisfaction. Communications of the ACM p 232-238.
- Bowen, N. K., Guo, S., 2011. Structural Equation Modeling. Oxford Scholarship.
- Davis, F. D., 1989. Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. Management Information Systems Quality Journal Volume 13 No.3 p 319-340.
- DeLone, W. H., McLean, E. R., 1992. Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. Information System Resource Volume 3 No.4 p 60-95.
- DeLone, W. H., McLean, E. R., 2003. The DeLone andMcLean Model of Information Systems Success : A Ten-Year Update. Journal of Management Information Systems Volume 19 No.4 p 9-30.
- Furukawa, M., Minami, A., 2013. A Study on the 'Flexibility' of Information Systems (Part 1): Why Do They Need to Be Flexible?. International Journal of Business and Management Volume 8 No.20 p 48-61.
- Garson, G. D., 2016. Partial least squares: regression & structural equation models. North Carolina: Statistical Publishing Associates.
- Gelinas, U., Dull, B. R., 2012. Accounting Information Systems. Natorp Boulevard Mason: South Western Cengage Learning.
- Ghozali, I., 2008. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hall, J. A., 2011. Accounting Information System. USA: South-Western Cengage Learning.
- Istianingsih, Wijanto, S. H., 2008. Analisis Keberhasilan Penggunaan Perangkat Lunak Akuntansi Ditinjau Dari Persepsi Pemakai (Studi Implementasi Model Keberhasilan Sistem Informasi). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 5 No.1 p 50-76.
- Jogiyanto, H., 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Kanwal, F., Rehman, M., 2016. Measuring information, system and service qualities for the evaluation of e-learning systems in pakistan. Pakistan Journal of Science Volume 68 No.3 p 302-307.
- Livari, J., 2005. An Empirical Test of the Model of Information System Success. DATA BASE Adv. Inf. Syst, 8-27.
- McGill, T., Hobbs, V., Klobas, J., 2003. Users Developed Application and Information System Success: A Test of DeLone and McLean's Model. Information Resource Management Journal Volume 16 No.1 p 24 - 45.
- Petter, S., DeLone, W., McLean, E., 2008. Measuring information systems success: model, dimension, measures, and interrelationships". European Journal of Information Systems p 236-263.
- Pramadani, R., Mudjahidin, 2013. Analisis Keberhasilan E-procurement Pemerintah Kota Surabaya Menggunakan Information System Success Model. Jurnal Teknik POMITS Volume 1 No.1 p 1-6.

- Purwanto, A., 2007. Rancangan dan Implementasi Model Pemeriksaan Kinerja BPK RI Atas Aplikasi e-Government di Pemerintah Daerah: Kabupaten Sragen. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.**
- Radityo, D., Zulaikha., 2007. Pengujian Model DeLone dan McLean dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen: Kajian Sebuah Kasus. SNA. Solo: IAI.**
- Sedera, D., Gable, G., Chan, T., 2004. A factor and structural equation analysis of the enterprise systems success measurement model. In Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference on Information Systems p 449. Washington DC: Association for Information Systems.**
- Stair, M. R., Reynolds, G. W., 2010. Principles of Information Systems: A Managerial Approach. Australia : Thomson Course Technology.**
- Sulistyo, G. B., 2013. Efektivitas Penggunaan E-Learning Moodle Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Nilai Siswa di SMK Ma'Arif Kota Mungkid. Jurnal Bianglala Informatika Volume 1 No.2 p 20-28.**
- Supardi, 2012. Aplikasi Statistik Dalam Penelitian. Jakarta: UFUK PRESS.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara RI**
- Utami, A. W., Samopa, F., 2013. Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) di Perguruan Tinggi dengan menggunakan D&M IS Success Model: ITS Surabaya. Jurnal Sistem Informasi Volume 4 No.5 p 294-309.**
- Wahyuni, T., 2011. Uji Empiris Model Delone dan Mclean Terhadap Kesuksesan. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Volume 2 No. 1 p 3-25.**
- Wiyono, G., 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 dan SmartPLS 2.0. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.**

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

No	Variabel	Indikator	Kode	Kuesioner
1	Information Quality (Livari, 2005)	Completeness	IQ1	Dari OM SPAN/SPAN, Saya mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saya
		Precision	IQ2	Dari OM SPAN/SPAN, Informasi yang saya dapatkan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
		Relevance	IQ3	Saya dapat mengandalkan data yang didapatkan dari OM SPAN/SPAN untuk mendukung pekerjaan saya di kantor
		Currency	IQ4	Data yang saya dapat dari OM SPAN/SPAN adalah informasi terkini (up-to date) dan selalu diperbarui.
		Format of Output	IQ5	Data yang saya dapat dari OM SPAN/SPAN dapat di ekspor kemudian digunakan di aplikasi atau media lain.
2	System Quality (Livari, 2005)	System Flexibility	SQ1	OM SPAN/SPAN dapat di kostumisasi sesuai dengan kebutuhan saya.
		System Integration	SQ2	OM SPAN/SPAN selalu tersedia untuk diakses.
		Reliability	SQ3	Saya dapat mengandalkan OM SPAN/SPAN dalam mendukung perkerjaan saya.
		Time To Respon	SQ4	Waktu respon (response time) OM SPAN/SPAN sesuai dengan harapan saya.
		Convenience of Access	SQ5	OM SPAN/SPAN berguna untuk mendukung pekerjaan saya.
3	Service Quality (DeLone & McLean, 2003)	Assurance	SEQ1	Saya dapat dengan mudah menggunakan layanan OM SPAN/SPAN
		Emphaty	SEQ2	Layanan yang diberikan OM SPAN/SPAN sesuai dengan harapan saya.
		Responsiveness	SEQ3	OM SPAN/SPAN memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang saya perintahkan
4	Use (Livari, 2005)	Daily Used Time	UI1	Saya sering mengakses OM SPAN/SPAN untuk mendapatkan data keuangan instansi tempat saya bekerja
		Frequency of Use	UI2	Ketika mengakses OM SPAN, saya mengaksesnya dalam jangka waktu yang lama
5	User Satisfaction (DeLone & McLean, 2003)	Repeat Purchase	US1	Saya puas dengan data yang saya dapatkan dari OM SPAN/SPAN.
		Repeats Visits	US2	Dengan OM SPAN/SPAN, saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan lebih cepat.
6	Net Benefit (Davis, 1989)	Speeds of accomplishing task	NB1	Dengan OM SPAN/SPAN, saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan lebih baik.
		Effectiveness	NB2	Dengan OM SPAN/SPAN, saya dapat lebih efektif dalam bekerja.
		Ease of Job	NB3	Dengan OM SPAN/SPAN, saya merasa lebih mudah dalam bekerja.
		Usefulness in Work	NB4	OM SPAN/SPAN sangat berguna dalam menyelesaikan pekerjaan dan kegiatan organisasi.

LAMPIRAN II

HASIL TANGGAPAN RESPONDEN

Pengukuran	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Tidak tahu (3)	Tidak setuju (2)	Sangat tidak setuju (1)	Rata-rata*)
IQ1	59	65	0	3	3	4,34
IQ2	54	70	1	3	2	4,32
IQ3	57	69	2	0	2	4,38
IQ4	57	67	1	3	2	4,34
IQ5	33	74	16	6	1	4,02
SQ1	23	82	17	7	1	3,92
SQ2	39	83	1	6	1	4,18
SQ3	54	70	2	3	1	4,33
SQ4	31	78	5	14	2	3,94
SQ5	57	72	0	0	1	4,42
SEQ1	45	81	1	3	0	4,29
SEQ2	33	87	2	8	0	4,12
SEQ3	26	87	10	7	0	4,02
UI1	58	71	0	1	0	4,43
UI2	12	45	8	52	13	2,93
US1	43	83	1	2	1	4,27
US2	40	84	1	4	1	4,22
NB1	41	84	2	2	1	4,25
NB2	33	91	3	2	1	4,18
NB3	40	87	1	1	1	4,26
NB4	33	78	9	6	4	4,00
Rata-rata item pengukuran **)						4,15
Persentase tingkat kesuksesan***) = $\left(\frac{\text{Rata-rata item pengukuran}}{\text{Nilai Maksimal}} \right) \times 100\%$						83 %

Keterangan:

*) Rata-rata IQ1 = $\frac{(59 \times 5) + (65 \times 4) + (0 \times 3) + (3 \times 2) + (3 \times 1)}{59 + 65 + 0 + 3 + 3} = 4,34$

***) Rata-rata item pengukuran =

$$\frac{59 + 65 + 0 + 3 + 3}{59 + 65 + 0 + 3 + 3} = 4,15$$

***) Persentase tingkat kesuksesan = $\frac{4,15}{5} \times 100\% = 83\%$

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

JURNAL BPPK



PENENTUAN PRIORITAS PEMILIHAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT BERDASAR ASPEK SUSTAINABILITY

Jitu Laksono^a, Hendi Kristiantoro^b

^a Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
60286, Indonesia. Email: jluck46@gmail.com

^b Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
60286, Indonesia. Email: hendi.kr@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
9 April 2017

Dinyatakan Dapat Dimuat
6 November 2017

KATA KUNCI:

Logistics
Location
Sustainability
Customs and Excise
AHP

ABSTRAK

Bonded Logistics Center (BLC) is a solution to overcome the inefficiency of the logistics management. Ide utama dari kebijakan BLC adalah untuk menempatkan gudang penimbunan ekspor dan impor barang dalam negeri. Thus, the domestic industry does not need to import again when in need of raw materials, capital goods, and supporting materials. BLC scheme puts the Directorate General of Customs and Excise as a regulator, while executing in the field is a private company. Currently the BLC has been established in eleven locations throughout Indonesia. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the priority of the most strategic site selection on the basis of sustainability to set as BLC. It was concluded that the main priority that should be considered in selecting the most strategic locations for the construction of the BLC is Human Resources. Then followed a row with service level, transport, climate, landscape, security, traffic and public facility.

Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah solusi untuk mengatasi inefisiensi pengelolaan logistik. Ide utama dari kebijakan PLB adalah untuk menempatkan gudang penimbunan ekspor dan impor barang dalam negeri. Dengan demikian, industri dalam negeri tidak perlu mengimpor lagi ketika membutuhkan bahan baku, barang modal, dan bahan pendukung. Skema PLB menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai regulator, sedangkan pelaksana di lapangan adalah perusahaan swasta. Saat ini, PLB telah didirikan di sebelas lokasi di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas dalam memilih lokasi yang paling strategis dengan berdasarkan aspek sustainability untuk ditetapkan sebagai PLB. Disimpulkan bahwa prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi yang paling strategis untuk pembangunan PLB adalah Sumber Daya Manusia. Kemudian diikuti berturut-turut dengan service level, transportasi, iklim, landscape, keamanan, lalu lintas, dan fasilitas publik.

1. PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi melalui peningkatan daya saing industri merupakan prasyarat mutlak eksistensi perekonomian Indonesia. Potensi sumber daya alam dan keunggulan demografi harus dioptimalkan. Visi dan misi pemerintah

sebagaimana tergambar dalam Nawacita merupakan semangat awal dari transformasi tersebut. Untuk itu, tumbuh kembang sektor industri harus diperhatikan dengan memperbaiki daya saingnya.

Daya saing industri sangat bergantung pada

ketepatan pengelolaan sistem logistik. Praktek yang selama ini terjadi adalah bahan baku, barang modal, dan bahan penolong yang dibutuhkan industri dalam negeri mayoritas diimpor dari gudang penimbunan di Singapura dan Malaysia. Termasuk komoditas ekspor yang juga harus ditimbun di sana. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan pengangkutan. Sarana dan prasarana pelabuhan akhirnya tidak dapat menampung arus barang yang semakin tinggi. Angka waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan sangat tinggi. Laporan kinerja dwelling time pada bulan Juni 2015 tercatat rata-rata di kisaran 5,5 hari. Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan dwelling time dapat dipangkas sampai kisaran dua harian.

Menurut data Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 53 dari 160 negara yang disurvei. Posisi tersebut berada di bawah Vietnam yang berada pada peringkat ke-48, Thailand di peringkat ke-35, dan Malaysia di posisi ke-25. Indeks ini berupa infrastruktur, pengapalan, kompetensi logistik, pelacakan, dan waktu bongkar muat. Sementara, berdasar Laporan Kemudahan Berbisnis 2015 yang diterbitkan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-7 di antara negara-negara Asean dalam hal kinerja ekspor-impor. Proses ekspor-impor di Indonesia membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal dibandingkan dengan Singapura dan Vietnam. Proses ekspor-impor di Indonesia memakan waktu 3,5 hari, sedangkan di Singapura 2 hari dan Vietnam 1 hari. Biaya di Indonesia 573 Dolar AS, padahal di Singapura hanya separuhnya dan di Vietnam 45 Dolar AS.

Inefisiensi menyebabkan biaya logistik meningkat. Padahal biaya logistik yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24 persen dari total PDB atau senilai Rp1.820 triliun per tahun merupakan biaya logistik paling tinggi di dunia. Komponen biaya logistik di Indonesia terdiri dari biaya penyimpanan sebesar Rp546 triliun, biaya transportasi sebesar Rp1.092 triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp182 triliun.

Oleh karena itu, kebijakan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah jilid kedua merupakan tawaran solutif dari pemerintah untuk

memperbaiki inefisiensi pengelolaan logistik. Gagasan utama kebijakan Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah menempatkan gudang penimbunan barang ekspor-impor di dalam negeri. Dengan demikian, industri dalam negeri tidak perlu mengimpor lagi saat membutuhkan bahan baku, barang modal, dan bahan penolong. Semua kegiatan itu diarahkan pada cita-cita Indonesia sebagai negara penghubung logistik di Asia Pasifik.

PLB adalah kawasan penimbunan barang untuk keperluan industri. Fasilitas yang ditawarkan berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan pajak impor tidak dipungut. Ketika barang keluar dari PLB maka bea masuk dan pajak dikenakan. Ketentuan fasilitas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 272 Tahun 2015 tentang PLB. Skema PLB menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai regulator, sementara pelaksana di lapangan murni swasta. Hal ini diharapkan juga akan mendorong peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat.

Sampai saat ini PLB telah ditetapkan di sebelas lokasi di seluruh Indonesia. Mengingat strategisnya keberadaan PLB, tentu dibutuhkan lebih banyak PLB lagi sesuai sebaran industri dan karakter tiap daerah. Sebagai catatan, beberapa daerah dengan potensi besar justru belum memiliki PLB.

Bertitik tolak dari hal tersebut, penelitian ini berupaya mengelaborasi strategi optimalisasi PLB secara nasional untuk kemudian difokuskan secara khusus pada lingkup kedaerahan. Penelitian akan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang bertujuan untuk menentukan prioritas dalam pemilihan lokasi untuk ditetapkan sebagai PLB. Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas tersebut berdasarkan aspek sustainability yang dimiliki oleh tiap daerah. Aspek tersebut antara lain adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat memberi acuan untuk pengambil kebijakan dalam menetapkan tempat yang paling memungkinkan dan paling menguntungkan dikembangkan sebagai PLB di masa yang akan datang.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)

Manajemen rantai pasok (supply chain management) merupakan sekumpulan aktivitas (dalam bentuk entitas/fasilitas) yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi logistik mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Menurut Chopra dan Meindl (2007), manajemen rantai pasok adalah ikatan yang terjadi antara produsen, supplier, distributor, gudang, retailer, dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Li (2007) mendefinisikan manajemen rantai pasok sebagai sekumpulan aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan pemasok, manufaktur, gudang, jasa transportasi, pengecer, dan konsumen secara efisien. Manajemen rantai pasok memiliki sifat yang dinamis, namun melibatkan tiga aliran yang konstan, yaitu aliran informasi, produk, dan uang (Chopra dan Meindl, 2007).

2.2. Pusat Logistik Berikat (PLB)

Ketersediaan logistik merupakan kunci pengembangan industri. Rantai pasokan logistik yang kompleks, yang melibatkan sumber daya, orang, teknologi, kegiatan dan informasi dalam rangka untuk mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi dan mendistribusikannya ke pelanggan akhir (Lambiase et al., 2013). Untuk itu, Rao et al. (2015) menekankan pentingnya pemusatan penempatan logistik sebagai bagian dari manajemen rantai suplai industri.

Montwiłł (2014) mendorong pengembangan pelabuhan sebagai pusat logistik seiring dengan pertumbuhan daerah dan demi mengurangi efek negatif berupa kemacetan dan polusi. Sementara, Porter (2007) berfokus pada keunggulan kompetitif dan peningkatan inovasi yang ditawarkan melalui pemusatan industri (cluster). Pengembangan cluster dengan pemusatan penimbunan logistik diyakini akan mempengaruhi persaingan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan kecepatan inovasi, dan merangsang pembentukan bisnis baru.

Kayikci (2010) menyebutkan pusat logistik yang efisien memberi manfaat yang signifikan serta menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi tujuan komersial strategis, di mana penentuan lokasi adalah faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan menginisialisasi rantai pasokan. Oleh karena itu, otoritas publik harus mempertimbangkan daya

dukung ekonomi, sosial dan lingkungan sebelum menetapkan suatu daerah sebagai pusat logistik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (PLB) mendefinisikan PLB sebagai tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. PLB merupakan bagian solusi sistem pengelolaan logistik.

PLB didesain sebagai penyempurnaan konsep gudang berikat. Jika dibandingkan dengan gudang berikat, aturan di PLB tidak ada pembatasan suplai barang, karena dipastikan kapasitasnya besar dan difungsikan untuk kebutuhan industri di dalam negeri. Sedangkan dalam Gudang Berikat ada pembatasan sesuai jenis komoditi melalui penyesuaian izin awal. Untuk subbagian ini dituliskan di sini.

2.3. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Pilihan lokasi untuk pusat logistik adalah salah satu keputusan manajemen yang paling penting. Akibatnya, sejumlah besar penelitian telah dikhususkan untuk pengembangan model matematika untuk menentukan lokasi pusat logistik (Sun et al., 2008). Lokasi pusat logistik merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi sistem transportasi angkutan perkotaan dan menginisialisasi kecukupan dari kegiatan rantai pasokan relatif. Dengan demikian, lokasi pusat logistik harus dipilih dengan hati-hati. Semua faktor yang mempengaruhi untuk penentuan lokasi harus dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan pentingnya topik ini dengan setiap keputusan yang diberikan dalam hal implikasi ekonomi, sosial dan lingkungan yang kuat sebelum mengumumkan suatu daerah sebagai pusat logistik (Kayikci, 2010).

Van Thai dan Grewal (2005) berpendapat bahwa sebuah kerangka kerja konseptual seleksi lokasi untuk pusat logistik dapat dilakukan dengan melalui tiga tahap utama. Pada tahap pertama, area geografis umum untuk pusat logistik diidentifikasi berdasarkan the Centre of Gravity principle, dengan mempertimbangkan

faktor-faktor sosial ekonomi. Tahap kedua dari proses seleksi melibatkan identifikasi lokasi alternatif untuk pusat logistik dan pelabuhan udara/laut yang akan digunakan untuk arus lalu lintas kargo dalam suatu lingkungan wilayah geografis. Tahap ketiga berfokus pada pemilihan lokasi terbaik di antara alternatif lokasi sebagai pusat logistik berdasarkan pendekatan kuantitatif.

Proses dalam pengambilan keputusan sendiri saat ini telah menjadi sebuah ilmu matematika (Greco et al., 2005). Metode pengambilan keputusan multi-kriteria, juga dikenal sebagai Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode MCDM yang paling umum digunakan sebagai alat manajemen di beberapa sektor industri, seperti rantai pasokan, logistik dan juga pendidikan, dengan tujuan menilai strategi dan kinerja (Tramarico et al., 2015).

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan awal tahun 1970-an oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg. AHP memiliki suatu spesifikasi tersendiri dalam memunculkan data dari satu atau banyak ahli dengan menggunakan skala rasio berpasangan, mengatur struktur hirarkis perbandingan dengan kriteria dan sub-kriteria antara alternatif, menemukan vektor prioritas dalam setiap kelompok item yang dibandingkan, dan menyusun preferensi lokal dengan dukungan subkriteria dan kriteria dari semua tingkat hierarki untuk mendapatkan prioritas global di antara semua alternatif (Lipovetsky, 2009).

Menurut Saaty (2008), penelitian dengan metode AHP ini tidak membutuhkan jumlah sampel besar tapi cukup orang-orang kunci (key person) yang mempunyai peranan dan mengetahui dengan baik tentang bidang yang jadi objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengembangkan hirarki pemilihan lokasi pusat logistik berikat terbaik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman beberapa orang ahli di lapangan. Kami memilih AHP, karena sangat efektif dalam mengkuantifikasikan pengetahuan kualitatif dengan mengukur dimensi intangible. Hal ini penting karena dimensi intangible, yang dapat diukur hanya dengan penelitian kualitatif, tidak dapat langsung diukur menggunakan skala

absolut.

AHP adalah metode pengambilan keputusan analitik, cocok untuk keputusan yang melibatkan peringkat dan memprioritaskan alternatif, seperti yang terjadi pada pengambilan keputusan penentuan lokasi pusat logistik (Tugba, 2011). Metode ini sangat efektif dalam mengukur opini, yang didasarkan pada pengalaman pribadi dan pengetahuan, untuk mengembangkan kerangka keputusan yang konsisten. AHP adalah metode sangat berguna untuk mengukur dan membandingkan data subjektif, seperti latar belakang pribadi dan pengalaman bertahun-tahun, yang mempengaruhi proses pembuatan suatu keputusan (Pecchia et al., 2009).

Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Tingkat	Definisi
Kepentingan	
1	Kedua elemen sama pentingnya.
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya.
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya.
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya.
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya.
2, 4, 6, 8	Nilai di antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan.
Kebalikan	Jika elemen i memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan elemen j, maka j memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan elemen i.

Faisol et al. (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, diantaranya adalah:

- Decomposition, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi.
- Comparative Judgment, yaitu membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Hasil dari penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison.

Proses pembandingan dapat dikemukakan dengan penyusunan skala variabel seperti pada Tabel 1.

- c. Synthesis of Priority, yaitu mencari nilai eigen vektor untuk mendapatkan local priority.
- d. Logical Consistency, yaitu menentukan tingkat konsistensi dari hasil penilaian.

Banyak faktor mempengaruhi penentuan lokasi dari pusat logistik. Pemilihan lokasi dari

pusat logistik dapat dilakukan dengan mengintegrasikan tiga kriteria sustainability utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial (Rao et al., 2015). Pada penelitian ini juga digunakan 8 (delapan) subkriteria terkait untuk mengevaluasi dan memilih lokasi potensial bagi sebuah pusat logistik.

Tabel 2. Kriteria dan Sub Kriteria yang Dipakai dalam Struktur AHP

No.	Kriteria	Sub Kriteria	Keterangan
1	Ekonomi	Transportasi	Transportasi adalah inti dari distribusi logistik, sehingga pusat logistik harus menghubungkan lokasi dengan beberapa moda transportasi, misalnya jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara untuk memfasilitasi transit barang.
		Service Level	Tingkat layanan mengacu pada kapasitas pengiriman barang dari lokasi pasokan, atau untuk pelanggan lokasi/penerima pada suatu waktu. Kualitas pelayanan dari pemerintah daerah setempat termasuk dalam hitungan sub kriteria ini. Sebuah pusat logistik yang baik harus memberikan pelayanan yang memuaskan untuk permintaan logistik pelanggan setiap saat.
		Sumber Daya Manusia	Kondisi sumber daya manusia berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja yang memadai menjadi faktor pemilihan lokasi penting untuk pusat logistik. Umumnya, tingkat kemahiran, pendidikan, dan nominal upah pekerja harus dipertimbangkan.
2	Lingkungan	Iklim	Ketika memilih lokasi pusat logistik, kita harus komprehensif mengetahui lingkungan alam lokal seperti suhu, angin, dan hujan, yang membantu untuk mengurangi risiko pembangunan pusat logistik. Kondisi iklim di suatu wilayah dipandang akan secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan karyawan dan efisiensi kerja.
		Landscape	Ketika memilih lokasi pusat logistik, dibutuhkan izin atas ruang yang akan digunakan untuk pengembangan pusat logistik. Hal tersebut dilakukan sekaligus untuk menyelaraskan dengan fungsi tata ruang dan lingkungan hidup bagi penduduk setempat.
3	Sosial	Fasilitas Publik	Lokasi dari pusat logistik membutuhkan fasilitas publik seperti jalan, komunikasi, listrik, dan air yang berfungsi dengan baik
		Keamanan	Keamanan mengacu pada keamanan lokasi dari kecelakaan, pencurian, dan vandalisme
		Kondisi Lalu Lintas	Pengaruh pusat logistik pada lalu lintas harus dipertimbangkan ketika memilih lokasi pusat logistik. Mengingat kepadatan lalu lintas di area pusat logistik, diperlukan lingkungan lalu lintas yang tertib dan teratur sehingga mendukung kelancaran arus logistik di area tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (development research) dengan maksud untuk mengembangkan pengetahuan tentang manajemen sains dalam aplikasi pengambilan keputusan strategis pemilihan lokasi penyelenggaraan pusat logistik berikat (PLB)

berdasarkan aspek sustainability dengan menggunakan metode AHP. Secara umum langkah-langkah kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei pendahuluan dan studi literatur terkait dengan pengembangan PLB di Indonesia dan juga di dunia internasional.
2. Menentukan atribut-atribut pendukung

- keputusan pemilihan lokasi PLB di Indonesia berdasarkan literatur-literatur dan data yang tersedia serta melibatkan pendapat ahli/pakar (expert) dalam penentuannya.
3. Membuat hierarki problem yang akan dilakukan analisis terkait pemilihan lokasi PLB di Indonesia, yang berisikan kriteria prioritas dan subkriteria prioritas pilihan lokasi (Gambar 1). Memuat isian hierarki ke dalam kuesioner AHP.
 4. Melakukan wawancara dan penggalan pendapat beberapa ahli/pakar (expert) dalam memutuskan pemilihan lokasi PLB yang akan dibangun di suatu wilayah/daerah ke depan. Ahli/pakar (expert) yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini antara lain adalah dua orang Pejabat Kantor Wilayah DJBC X dan Y, Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Z, dan dua orang Pimpinan Perusahaan Kawasan Berikat di wilayah Provinsi Z.
 5. Melakukan input data hasil langkah nomor 4 (empat) di atas ke dalam kuesioner AHP untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan software Expert Choice 11.
 6. Melakukan analisis dan pembahasan hasil output pada langkah 5 (lima) di atas.
 7. Menarik kesimpulan penentuan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi paling strategis untuk pembangunan PLB dengan berdasarkan aspek sustainability di suatu wilayah/daerah di Indonesia ke depan.



Gambar 1. Struktur AHP Penentuan Prioritas dalam Pembangunan PLB

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemetaan Peran Dalam Kebijakan Pusat Logistik Berikat

Pusat Logistik Berikat merupakan implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II. Menurut Kepala Seksi Fasilitas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) X, kebijakan

terkait PLB melibatkan DJBC sebagai regulator dan pengawas, sementara pihak swasta sebagai penyelenggara. Sesuai PMK Nomor 272/PMK.04/2015, penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Pusat Logistik Berikat.

DJBC tidak menentukan di daerah mana lokasi PLB akan ditetapkan. Penentuan lokasi PLB dipilih oleh perusahaan penyelenggara PLB. Hal ini dikarenakan perusahaan bersangkutan yang mengetahui peta kebutuhan logistik dan peluang ekonomi masing-masing lokasi. DJBC hanya menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak swasta yang tertarik membangun PLB. Syarat tersebut mencakup syarat administratif dan fisik pergudangan. Sepanjang syarat-syarat terpenuhi, DJBC akan menyetujui dan menetapkan perusahaan tersebut sebagai penyelenggara PLB. DJBC kemudian melakukan kegiatan monitoring terhadap penyelenggaraan PLB secara periodik berdasarkan manajemen risiko paling kurang satu tahun sekali yang dilakukan pada setiap akhir tahun buku.

Pemetaan peran ini mendasari pemilihan responden ahli. Responden ahli dalam penelitian ini adalah perwakilan PT. A dan PT. B yang merupakan perusahaan swasta yang berminat menjadi penyelenggara PLB di Provinsi Z. Pendapat mereka dilengkapi dengan pendapat responden ahli dari Kantor Wilayah DJBC X dan Y serta dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Z. Formulasi responden ahli ini diharapkan dapat memenuhi validitas dan reliabilitas penelitian.

3.2. Analisis AHP

Setelah dilakukan tahapan survey pendahuluan dan pengisian kuesioner oleh responden ahli, maka tahap berikutnya adalah input data isian kuesioner. Tabulasi data isian kuesioner tersebut di atas disajikan pada lampiran artikel ini. Data tersebut di atas juga di-input-kan pada software Expert Choice 11 untuk kemudian dilakukan analisis AHP sesuai hierarki yang tersaji sebelumnya.

Tahap pertama yaitu melakukan analisis terhadap prioritas dalam kriteria sustainability utama yang dipilih oleh para responden ahli dalam memutuskan pemilihan lokasi PLB. Dari pengolahan data, diperoleh hasil bahwa prioritas

tertinggi yang dipertimbangkan adalah kriteria ekonomi, disusul dengan kriteria lingkungan, dan yang terakhir adalah kriteria sosial. Kriteria ekonomi memiliki bobot tertinggi dengan nilai 0,661 atau 66,1% dari prioritas pertimbangan total.



Gambar 2. Nilai Bobot Prioritas Kriteria Utama

Kemudian kriteria lingkungan mempunyai nilai bobot sebesar 0,243 atau 24,3% dari prioritas pertimbangan total. Sedangkan nilai bobot terkecil yaitu 0,096 atau 9,6% dari prioritas pertimbangan total dimiliki oleh kriteria sosial. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam membangun PLB para pengusaha harus mengutamakan pertimbangan aspek ekonomis dari lokasi yang akan dibangun daripada aspek lain seperti lingkungan dan sosial.



Gambar 3. Nilai Bobot Prioritas Sub Kriteria - Ekonomi

Selanjutnya dilakukan analisis mendalam terhadap prioritas subkriteria dari kriteria ekonomi. Dari pengolahan data, menunjukkan hasil perbandingan antara ketiga subkriteria cukup berimbang. Namun demikian, subkriteria sumber daya manusia menjadi prioritas tertinggi dalam pertimbangan. Disusul kemudian dengan subkriteria service level, dan yang terakhir adalah subkriteria transportasi. Subkriteria sumber daya manusia memiliki bobot tertinggi dengan nilai 0,370 atau 37,0% dari prioritas pertimbangan total. Kemudian subkriteria service level mempunyai nilai bobot sebesar 0,332 atau 33,2% dari prioritas pertimbangan total.

Sedangkan nilai bobot terkecil yaitu 0,298 atau 29,8% dari prioritas pertimbangan total dimiliki oleh subkriteria transportasi. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam membangun PLB para pengusaha harus mengutamakan pertimbangan aspek ekonomis

terutama segi sumber daya manusia dari lokasi yang akan dibangun. Hal ini disebabkan karena peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan perusahaan tidak bisa diabaikan. Dalam perspektif resource based-view, kapabilitas sumber daya manusia merupakan sumber daya potensial untuk sustainable competitive advantage bagi sebuah organisasi/perusahaan (Wernerfelt, 1984). Dengan sumber daya manusia yang memadai, pengelolaan distribusi logistik akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.



Gambar 4. Nilai Bobot Prioritas Sub Kriteria - Lingkungan

Pada perbandingan antara subkriteria dari kriteria lingkungan juga menunjukkan hasil yang cukup berimbang. Dimana subkriteria iklim unggul tipis diatas subkriteria landscape dengan nilai 0,536 atau 53,6% dari prioritas pertimbangan total. Sementara subkriteria landscape hanya mendapatkan nilai sebesar 0,464 atau 46,4% dari prioritas pertimbangan total. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam membangun PLB para pengusaha diupayakan untuk mengutamakan pertimbangan kondisi iklim dari lokasi yang akan dibangun. Karena dengan kondisi iklim yang stabil akan mendukung kinerja dari distribusi logistik pada daerah tersebut.



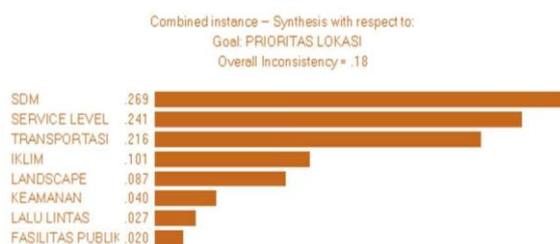
Gambar 5. Nilai Bobot Prioritas Sub Kriteria - Sosial

Berikutnya analisis juga dilakukan terhadap subkriteria dari kriteria sosial. Dari pengolahan data, diperoleh hasil bahwa prioritas tertinggi yang dipertimbangkan adalah subkriteria keamanan, disusul dengan subkriteria lalu lintas, dan yang terakhir adalah subkriteria fasilitas publik. Subkriteria keamanan memiliki bobot tertinggi dengan nilai 0,457 atau 45,7% dari prioritas pertimbangan total.

Kemudian subkriteria lalu lintas mempunyai

nilai bobot sebesar 0,308 atau 30,8% dari prioritas pertimbangan total. Sedangkan nilai bobot terkecil yaitu 0,235 atau 23,5% dari prioritas pertimbangan total dimiliki oleh subkriteria fasilitas publik. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam membangun PLB para pengusaha sedapat mungkin mengutamakan pertimbangan sisi keamanan dari lokasi yang akan dibangun. Dengan keamanan yang memadai dan kondusif, proses bisnis distribusi dan pengolahan logistik akan dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Selanjutnya setelah semua prioritas dari kriteria dan subkriteria telah dianalisis, tahap berikutnya yaitu dilakukan proses penyusunan prioritas dalam pemilihan lokasi untuk ditetapkan sebagai PLB pada suatu wilayah/daerah. Penyusunan prioritas dalam pemilihan lokasi tersebut mengacu pada nilai bobot dari semua subkriteria yang dipakai pada penelitian ini. Susunan prioritas diurutkan dari skala paling tinggi hingga ke paling rendah. Prosedur ini juga disebut sebagai sintesis prioritas global, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari metode AHP.



Gambar 5. Susunan Prioritas Global

Dari hasil sintesis prioritas global yang tersaji pada Gambar 5 di atas, diketahui prioritas pertimbangan utama dalam memilih lokasi pembangunan PLB adalah dari aspek sumber daya manusia. Nilai 0,269 atau 26,9% dari prioritas global total didapatkan oleh subkriteria sumber daya manusia. Prioritas pertimbangan kedua yang harus diperhatikan juga adalah dari aspek service level dari para stakeholder yang berhubungan dengan PLB di suatu daerah. Salah satunya adalah kualitas pelayanan publik dari pemerintah setempat. Subkriteria service level mendapatkan nilai 0,241 atau 24,1% dari prioritas global total.

Aspek transportasi mendapat peringkat ketiga dalam susunan prioritas pertimbangan

utama. Subkriteria transportasi memperoleh nilai sebesar 0,216 atau 21,6% dari prioritas global total. Disusul kemudian dengan aspek iklim dengan perolehan nilai sebesar 0,101 atau 10,1% dari prioritas global total. Kemudian ada aspek landscape dari lokasi yang juga menjadi pertimbangan dengan nilai 0,087 atau 8,7% dari prioritas global total.

Pada posisi berikutnya terdapat aspek keamanan dari suatu daerah yang juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi PLB. Subkriteria keamanan mendapatkan nilai 0,040 atau 4,0% dari prioritas global total. Aspek lalu lintas dari suatu lokasi juga menjadi pertimbangan dengan nilai 0,027 atau 2,7% dari prioritas global total. Kemudian diakhiri dengan pertimbangan dari aspek fasilitas publik yang memiliki nilai 0,020 atau 2,0% dari prioritas global total.

3.3. Konfirmasi Kualitatif

Implementasi PLB melibatkan DJBC sebagai regulator dan pengawas, sementara pihak swasta sebagai penyelenggara. Peta hubungan ini menempatkan pihak swasta, dalam hal ini perusahaan calon penyelenggara PLB, lebih aktif dalam pemilihan lokasi PLB. Hal ini terkait peluang ekonomi dan kesesuaian masing-masing lokasi yang dikehendaki perusahaan calon penyelenggara PLB.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bagian dari struktur pemerintah daerah menekankan keberadaan PLB harus memberi dampak positif bagi daerah bersangkutan. Investasi merupakan stimulus perekonomian daerah yang harus dipacu. Di sisi lain, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan daya dukung yang diperlukan perusahaan calon penyelenggara PLB.

Kebutuhan akan ketersediaan daya dukung investasi terkonfirmasi oleh pendapat responden ahli. Pembangunan PLB dalam perspektif mereka adalah sebuah skema bisnis yang harus melindungi kepentingan bisnis mereka. Hal ini juga menjelaskan prioritas sustainability pembangunan PLB yang mengutamakan pertimbangan aspek ekonomis dari lokasi yang akan dibangun daripada aspek lingkungan dan sosial.

4. KESIMPULAN

Pusat Logistik Berikat (PLB) yang merupakan

bagian dari paket kebijakan pemerintah jilid kedua merupakan tawaran solutif dari pemerintah untuk memperbaiki inefisiensi pengelolaan logistik. Sampai saat ini PLB telah ditetapkan di sebelas lokasi di seluruh Indonesia. Mengingat strategisnya keberadaan PLB, tentu dibutuhkan lebih banyak PLB lagi sesuai sebaran industri dan karakter tiap daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menentukan lokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki posisi paling strategis untuk dibangun PLB.

Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) didapatkan kesimpulan kriteria aspek utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi pembangunan PLB berturut-turut adalah kriteria ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dari kriteria-kriteria tersebut, didapatkan subkriteria sumber daya manusia sebagai prioritas tertinggi pada kriteria ekonomi. Subkriteria iklim menjadi prioritas tertinggi dari kriteria lingkungan. Kemudian dari kriteria sosial, subkriteria keamanan menempatkan diri sebagai prioritas tertinggi. Sedangkan dari hasil sintesis prioritas global didapatkan kesimpulan prioritas utama yang perlu menjadi pertimbangan dari kalangan pengusaha dalam memilih lokasi pembangunan PLB ke depan adalah aspek sumber daya manusia dari suatu lokasi. Kemudian disusul secara berturut-turut dengan aspek service level, transportasi, iklim, landscape, keamanan, lalu lintas, dan yang terakhir adalah fasilitas publik.

Pembangunan PLB dalam perspektif pengusaha merupakan sebuah skema bisnis yang harus melindungi kepentingan bisnis mereka. Hal ini juga menjelaskan prioritas sustainability pembangunan PLB yang lebih mengutamakan pertimbangan aspek ekonomis dari lokasi yang akan dibangun daripada aspek lingkungan dan sosial.

5. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pengusaha khususnya dalam perencanaan pembangunan PLB ke depan. Kepada para pemerintah daerah juga dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pengembangan kebijakan pendukung pelaksanaan PLB di daerah setempat, seperti peraturan mengenai ketenagakerjaan, tata ruang wilayah maupun perizinan usaha terkait PLB ini.

Kerjasama antara pihak DJBC dan pemerintah daerah setempat juga diperlukan dalam rangka untuk memberikan sosialisasi terkait potensi pengembangan PLB di lingkungan daerah setempat.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketersediaan data pendukung pelaksanaan PLB dari pemerintah daerah yang belum mencukupi. Kemudian, saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan dapat mengelaborasi penyelenggaraan PLB yang sudah berjalan dengan potensi pembangunan PLB baru. Penggunaan metode analisis selain AHP dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi kompleksitas yang ada pada kriteria seleksi dalam pertimbangan pemilihan lokasi pembangunan sebuah PLB. Peneliti selanjutnya dapat memasukkan unsur alternatif lokasi dalam penelitiannya agar manfaat dari hasil penelitian dapat lebih aplikatif.

Penghargaan

Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Dr. Bambang Tjahjadi, SE., MBA., Ak., atas bimbingan beliau selama proses penelitian ini. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dibiayai secara tidak langsung oleh Program Beasiswa STAR BPKP yang diselenggarakan atas kerjasama antara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Indonesia dengan Universitas Airlangga Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chopra, Sunil, dan Peter Meindl. 2007. Supply chain management. Strategy, planning & operation Das Summa Summarum des Management (pp. 265-275): Springer.
- Faisol, Ahmad, M Aziz Muslim, dan Hadi Suyono. 2014. Komparasi Fuzzy AHP dengan AHP pada Sistem Pendukung Keputusan Investasi Properti. *Jurnal EECIS*, 8(2), 123-128.
- Greco, Salvatore, J Figueira, dan M Ehr Gott. 2005. Multiple criteria decision analysis. Springer's International series.
- Kayikci, Yasanur. 2010. A conceptual model for intermodal freight logistics centre location decisions. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2(3), 6297-6311.
- Lambiase, Alessandro, Ernesto Mastrocinque, Salvatore Miranda, dan Alfredo Lambiase. 2013. Strategic planning and design of

- supply chains: A literature review. *International Journal of Engineering Business Management*, 5.
- Li, Ling. 2007. Supply chain management: concepts, techniques and practices enhancing the value through collaboration: World Scientific.
- Lipovetsky, Stan. 2009. Comparison of a Dozen AHP Techniques for Global Vectors in Multiperson Decision Making and Complex Hierarchy. Makalah disajikan dalam 10 th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Pittsburgh, EUA.
- Montwiłł, Andrzej. 2014. The role of seaports as logistics centers in the modelling of the sustainable system for distribution of goods in urban areas. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 151, 257-265.
- Pecchia, Leandro, Peter A Bath, Neil Pendleton, dan Marcello Bracale. Use of the Analytic Hierarchy Process (AHP) for examining healthcare professionals' assessments of the relative importance of risk factors for falls in community-dwelling older people.
- Porter, M E. 2007. Clusters and the New Economics of Competition', *Harvard Business Review*, 76 (6), November-December, 77-90. *International Library Of Critical Writings In Economics*, 212(2), 51.
- Rao, Congjun, Mark Goh, Yong Zhao, dan Junjun Zheng. 2015. Location selection of city logistics centers under sustainability. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 36, 29-44.
- Saaty, Thomas L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. *International journal of services sciences*, 1(1), 83-98.
- Sun, Huijun, Ziyou Gao, dan Jianjun Wu. 2008. A bi-level programming model and solution algorithm for the location of logistics distribution centers. *Applied mathematical modelling*, 32(4), 610-616.
- Tramarico, Claudemir Leif, Valério Antonio Pamplona Salomon, dan Fernando Augusto Silva Marins. 2015. Analytic Hierarchy Process and Supply Chain Management: A Bibliometric Study. *Procedia Computer Science*, 55, 441-450.
- Tugba Turgut, Banu, Gamze Tas, Ahmet Herekoglu, Hakan Tozan, dan Ozalp Vayvay. 2011. A fuzzy AHP based decision support system for disaster center location selection and a case study for Istanbul. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 20(5), 499-520.
- Van Thai, Vinh, dan Devinder Grewal. 2005. Selecting the location of distribution centre in logistics operations: A conceptual framework and case study. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 17(3), 3-24.
- Wernerfelt, B. 1984. A Resource-Based View Of The Firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180.

LAMPIRAN

Tabel 1. Rekapitulasi Respon Kuesioner

UTAMA												RESPOND
No.	Kriteria A	Skala									Kriteria B	
		9	7	5	3	1	3	5	7	9		
1	Ekonomi	3	1			1					Lingkungan	5
2	Ekonomi	4				1					Sosial	5
3	Lingkungan		3			1				1	Sosial	5

EKONOMI												RESPOND
No.	Sub Kriteria A	Skala									Sub Kriteria B	
		9	7	5	3	1	3	5	7	9		
1	Transportasi	1		1		1				2	Service Level	5
2	Transportasi		1			1			1	2	SDM	5
3	Service Level	1		1		1				2	SDM	5

SOSIAL												RESPOND
No.	Sub Kriteria A	Skala									Sub Kriteria B	
		9	7	5	3	1	3	5	7	9		
1	Fasilitas Publik	1		1		1				2	Keamanan	5
2	Fasilitas Publik		1			1			2	1	Lalu Lintas	5
3	Keamanan	1	1	1		1				1	Lalu Lintas	5

LINGKUNGAN												RESPOND
No.	Sub Kriteria A	Skala									Sub Kriteria B	
		9	7	5	3	1	3	5	7	9		
1	Iklim	1	1	1					1	1	Landscape	5



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MELONJAKNYA PENYERAPAN ANGGARAN KUARTAL IV INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN)

Rahadi Nugroho^a, Salman Alfarisi^b,

^a PKN STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Indonesia, Email: rnugroho83@gmail.com

^b Pusdiklat Pajak, Jl. Sakti Raya No.1, Kemanggisan, Jakarta Barat, Indonesia, Email: salman.afrs@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
5 April 2017

Dinyatakan Dapat Dimuat
6 November 2017

KATA KUNCI:

anggaran,
penyerapan,
perencanaan,
pengadaan barang dan jasa,
pengeluaran pemerintah.

ABSTRAK

The effect of public expenditure on economic depend also on the time when the particular expenditure really spend. Thus, budget expenditure's schedule must be complied. In Indonesia there was a phenomena that public expenditures usually soar in second semester, especially on last quarter of the budget year. The aim of this research is to find out the determinant of public expenditure. The result shows that budget planning, implementation of budget planning, and coordination are significant factor of public expenditure. However, procurement and human resources are not significantly affect public expenditure.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ekonomi juga tergantung ketepatan waktu pengeluaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyerapan anggaran yang terjadwal. Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah penyerapan anggaran yang meningkat drastis di semester 2 khususnya triwulan terakhir tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran instansi pemerintah dengan menggunakan metode persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran instansi pemerintah. Sedangkan faktor pengadaan barang dan jasa dan faktor sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan dalam penyerapan anggaran pemerintah adalah melesetnya target penyerapan anggaran terutama di semester I sehingga terjadi penumpukan belanja pemerintah di triwulan akhir terutama belanja modal. Sebagian besar Satuan Kerja (satker) sangat rendah tingkat penyerapan anggarannya di awal tahun anggaran, kemudian terjadi peningkatan pada triwulan berikutnya dan baru terjadi peningkatan secara signifikan di triwulan terakhir. Padahal Satuan Kerja telah berkomitmen untuk merealisasikan anggaran secara merata sepanjang tahun sebagaimana terdapat halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sebagai contoh lonjakan tersebut dapat dilihat di pola penyerapan belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2014 sebagaimana grafik I.1.

Pola penumpukan pencairan anggaran ini terjadi juga di Kementerian-Kementerian tak terkecuali di

instansi tempat penulis bekerja yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan. Penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal di BPPK pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memiliki pola penyerapan yang serupa yaitu menumpuk di triwulan IV. Berdasarkan Tabel III.1 diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan akhir triwulan III penyerapan anggaran belanja barang sebesar 47,4% sedangkan untuk penyerapan anggaran belanja modal sebesar 39,15%. Pada tahun 2012 sampai dengan akhir triwulan III penyerapan anggaran belanja barang sebesar 60,24% sedangkan untuk penyerapan anggaran belanja modal sebesar 40,49%. Pada tahun 2013 sampai dengan akhir triwulan III penyerapan anggaran belanja barang sebesar 53,53% sedangkan untuk penyerapan anggaran belanja modal sebesar 37,34%. Pada tahun 2014 sampai dengan akhir

triwulan III penyerapan anggaran belanja barang sebesar 59,34% sedangkan untuk penyerapan anggaran belanja modal sebesar 51,99%.

Keterlambatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa dan berbagai faktor internal lainnya.

Grafik 1.1 Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Modal Pemerintah Pusat 2014



Sumber: diolah dari Laporan Realisasi APBN 2014

Tabel 1.1 Persentase Penyerapan Anggaran Belanja BPPK 2011-2014

Tahun	Triwulan	Jenis Belanja					
		Barang	%	% kumulatif	Modal	%	% kumulatif
2011	I	18,516,131,228	7.16	7.16	6,885,070,615	6.22	6.22
	II	59,224,288,323	15.74	22.90	17,975,232,079	10.02	16.24
	III	121,319,501,360	24.24	47.14	43,817,592,864	22.91	39.15
	IV	227,917,079,966	40.13	87.27	116,943,468,764	54.62	93.77
2012	I	39,063,717,654	12.71	12.71	2,263,226,627	4.72	4.72
	II	126,328,458,612	28.40	41.11	9,444,250,757	14.97	19.69
	III	183,941,252,980	19.14	60.24	20,226,484,801	20.80	40.49
	IV	281,081,747,229	32.59	92.83	54,466,598,725	57.51	98.00
2013	I	38,945,451,200	11.83	11.83	5,610,990,944	6.09	6.09
	II	133,114,292,238	28.62	40.45	18,477,888,169	13.94	20.03
	III	177,301,255,427	13.08	53.53	34,633,875,826	17.31	37.34
	IV	368,923,898,338	43.83	97.36	97,644,535,961	61.13	98.47
2014	I	45,954,974,006	11.66	11.66	8,873,559,010	11.37	11.37
	II	138,965,567,104	18.60	30.27	20,825,936,248	15.36	26.73
	III	250,404,693,776	29.07	59.34	37,453,615,528	25.25	51.99
	IV	417,074,362,518	38.43	97.77	74,612,046,299	47.13	99.11

Sumber : diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPPK

Sebagaimana penelitian Siswanto dan Rahayu (2010) yang menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penyebab utama rendahnya penyerapan belanja pada kementerian dan lembaga (K/L) yaitu permasalahan terkait internal K/L, mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi. Sejalan dengan hal

tersebut Herriyanto (2012) juga menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan, administrasi, sumber daya manusia (SDM), Dokumen Pengadaan dan Ganti Uang Persediaan. Sementara itu Sulaeman, Hamzah dan Priyanto (2012) menyatakan bahwa perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi penyerapan anggaran khususnya di Kementerian Keuangan diikuti oleh permasalahan kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau instansi lain, dan permasalahan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja khususnya belanja barang dan belanja modal di instansi pemerintah dengan lokus BPPK. Penelitian ini menggabungkan beberapa penelitian sebelumnya, sebagian penelitian ini akan menggunakan variabel hasil dari penelitian Herriyanto (2012) serta penambahan variabel Permasalahan Koordinasi Dengan Sektor Atau Instansi Lain dari penelitian Sulaeman, Andy Hamzah, dan Priyanto (2012).

2. KERANGKA TEORITIS

Supranggono (2009, 90) menyatakan bahwa penyerapan anggaran memiliki pengaruh terhadap pengelolaan fungsi perbendaharaan dan ekonomi makro. Dalam melakukan cash management, Pemerintah dalam hal ini Bendahara Umum Negara (BUN)/Menteri Keuangan dituntut untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien yaitu dengan menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, kegiatan penempatan uang/investasi jangka pendek, mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, meminimalkan idle cash, mempercepat penyeteroran penerimaan negara, dan melakukan pembayaran tepat waktu. Dalam pelaksanaannya BUN memerlukan berkoordinasi dengan K/L. Bentuk koordinasi tersebut salah satunya adalah rencana penarikan pada DIPA halaman III K/L dijadikan sebagai dasar BUN dalam mempersiapkan kebutuhan dana. Karena BUN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana yang dibutuhkan K/L pada waktu yang tepat, hal ini berpengaruh pada strategi yang digunakan BUN. Pada saat BUN kekurangan kas maka BUN akan melakukan pinjaman dari dalam/luar negeri, pinjaman dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), atau surat berharga lainnya. Dalam pelaksanaan ini akan timbul

cost of borrowing dan cost administration of payment process ditambah pemerintah harus membayar bunga dan instrument pembiayaan lainnya sehingga apabila K/L tidak dapat melakukan realisasi penyerapan sesuai yang dijanjikan pada rencana penarikan maka biaya-biaya tersebut akan tetap dibayar.

Kepastian waktu dalam melakukan pengeluaran sangat penting, Schiavo-Campo, Salvatore dan Tommasi (1999, 149) menyatakan bahwa untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif, maka otoritas untuk melakukan pengeluaran harus diberikan pada Kementerian teknis tepat waktu. Selanjutnya Schiavo-Campo, Salvatore dan Tommasi (1999, 150) juga menyatakan bahwa kesuksesan dalam melaksanakan anggaran disebabkan oleh banyak faktor, seperti kemampuan dalam penyesuaian terhadap perubahan di ekonomi makro dan kemampuan internal pengguna anggaran dalam bidang pelaksanaan anggaran. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran terutama adalah kebijakan internal organisasi dan tingkat kesiapan perangkat organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan.

Sophian (2014, 3) menjelaskan masih terdapat kelemahan yang masih dijumpai terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diantaranya adalah pada tahap perencanaan masih dijumpai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang berisi rencana pengadaan barang yang tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan instansi. Misalnya barang/jasa yang sangat diperlukan untuk menunjang kinerja instansi tidak tercantum dalam jumlah yang memadai dalam RKA/KL sementara barang/jasa yang lainnya tersedia dalam jumlah yang melimpah.

Siswanto dan Rahayu (2010) melakukan penelitian terhadap rendahnya penyerapan belanja atas tujuh K/L terbesar pengelola belanja menggunakan Analisis Deskriptif. Dari hasil penelitian ini diperoleh empat faktor penyebab utama rendahnya penyerapan belanja yaitu permasalahan terkait internal K/L, mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi. Miliasih (2011) melakukan penelitian terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja satker K/L T.A. 2010 di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru menggunakan Analisis Deskriptif tabel analisis dengan Cross Tabulation. Dari hasil penelitian ditemukan penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal satker yaitu permasalahan terkait proses realisasi anggaran, permasalahan terkait

kebijakan teknis, dan permasalahan budaya pengelola anggaran di satker. Herryanto (2012) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran satuan kerja K/L di wilayah Jakarta menggunakan Analisis Faktor Eksploratory dengan 30 variabel awal. Dari hasil analisis faktor dihasilkan lima faktor utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, Administrasi, SDM, Dokumen Pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan.

Sulaeman, Hamzah, dan Priyanto (2012) melakukan penelitian terhadap penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini menggunakan variabel perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh, permasalahan kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau instansi lain, permasalahan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian serta permasalahan otoritas dan sistem anggaran dengan Analisis Faktor dan Analisis Jalur. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi serapan anggaran di Kementerian Keuangan diikuti oleh permasalahan kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau instansi lain, dan permasalahan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian.

Akadira (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik akan sangat membantu tingkat penyerapan. Pengawasan yang dilakukan perlu dilakukan sejak awal perencanaan untuk membantu mendeteksi lebih dini terhadap kemungkinan kegagalan yang ada dan ini mampu memperbaikinya. Pelaporan memainkan peranan penting pula untuk mengetahui jumlah penyerapan anggaran yang ada, pelaporan yang baik dapat mengakomodasi penyerapan keuangan dan informasi keberhasilan suatu kegiatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sampel Penelitian dan Teknik pengumpulan data

Lokus penelitian ini adalah BPPK, salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerapan anggaran pada satuan kerja BPPK termasuk Pejabat Perbendaharaan. Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran

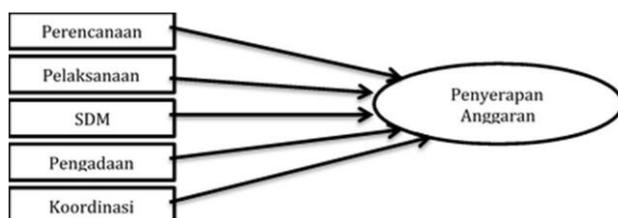
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran sedangkan Pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerapan anggaran yaitu Kepala Bidang/Kepala Bagian/Pejabat Eselon III, Kasubbag/Kasubbid/Pejabat Eselon IV, Pejabat Pengadaan serta Staf Pengelola Keuangan. Dari 132 kuesioner yang disebar baik secara manual maupun online kepada seluruh satker BPPK didapatkan sebanyak 83 responden, namun terdapat 2 responden melakukan dua kali input dan 1 responden tidak mengisi kuesioner secara lengkap sehingga jumlah sampel yang layak uji adalah 80 responden atau sebesar 60,61%.

Kuesioner terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian pertama berisi pertanyaan tentang identitas umum responden, bagian kedua berisi pertanyaan pilihan/tertutup yang berjumlah 32 pertanyaan, bagian ketiga yang berisi pertanyaan terbuka tentang faktor dan kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran berdasarkan pendapat responden. Pertanyaan tertutup berupa daftar pertanyaan untuk diisi berdasarkan persepsi masing-masing responden dari satker dengan menggunakan skala likert dengan lima pilihan. Sementara itu dalam pertanyaan terbuka, responden mengisi jawaban dalam kolom kosong apabila terdapat permasalahan yang tidak tercantum dalam pertanyaan tertutup.

3.2. Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK didasarkan pada kerangka penelitian sebagaimana gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian



a. Faktor Perencanaan (X1).

Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir serta

tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator sebanyak tujuh pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012) dan Sulaeman (2012).

b. Faktor Pelaksanaan Anggaran (X2).

Walaupun sudah direncanakan dengan baik tetapi jika dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala yang mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal maupun tidak sesuai rencana sebelumnya maka realisasi anggaran juga sangat mungkin akan tidak tepat waktu. Kendala yang sering terjadi adalah revisi anggaran, kelengkapan dokumen pembayaran, dan keterlambatan penagihan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak tujuh pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) (X3).

Kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam ketepatan penarikan dana instansi pemerintah. Selain itu, seringkali mutasi pegawai bagian keuangan sebuah instansi pemerintah juga mengakibatkan pekerjaan penarikan dana tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pegawai baru belum memahami peraturan-peraturan keuangan negara sehingga ada delay yang diakibatkan proses belajar pegawai baru. Variabel SDM ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak enam pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

d. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa (X4).

Proses pengadaan yang sering terkendala karena proses lelang ulang, tidak ada yang penyedia yang ikut lelang, kesulitan dalam menentukan Harga Perolehan Sendiri (HPS) dan barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi juga merupakan faktor yang menentukan realisasi pengeluaran anggaran. Pengadaan Barang dan Jasa ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak tujuh pertanyaan.

e. Faktor Permasalahan Koordinasi Dengan Sektor Atau Instansi Lain (X5).

Pemilihan faktor Permasalahan Koordinasi

Dengan Sektor Atau Instansi Lain sebagai variabel penelitian dikarenakan BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam menjalankan tugasnya program dan kegiatan yang direncanakan BPPK dapat ditentukan juga oleh kebijakan dari instansi lain (stakeholder BPPK) sehingga koordinasi dengan sektor lain sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan. Faktor-faktor yang berasal dari permasalahan koordinasi dengan berbagai sektor, berkaitan dengan permasalahan koordinasi dengan berbagai sektor dan institusi lain maka muncul beberapa isu, di antaranya permasalahan koordinasi proyek dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak tiga pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Sulaeman, Hamzah dan Priyanto (2012).

3.3. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak dua pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Sulaeman, Hamzah, Priyanto (2012) yaitu terkait besarnya serapan dan waktu serapan anggaran.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian, selanjutnya penelitian ini mengajukan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

dengan hipotesis yang ada dalam penelitian ini yaitu :

- H1: Faktor Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.
- H2: Faktor Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.
- H3: Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.
- H4: Faktor Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.
- H5: Faktor Permasalahan Koordinasi Dengan

Instansi Lain berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

- H6: Faktor Perencanaan, Faktor Pelaksanaan Anggaran, Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Pengadaan Barang dan Jasa serta Faktor Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Permasalahan Koordinasi Dengan Instansi Lain secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

Program komputer yang akan digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel 2013. Aplikasi microsoft excel 2013 ini digunakan dalam mengolah data untuk pengujian kalibrasi kuesioner, analisis deskriptif data primer, sampai dengan pembuatan tabel maupun bagan. Selain Microsoft Excel 2013, penelitian ini juga menggunakan aplikasi SPSS For Mac Versi 21.0. Aplikasi SPSS (Statistical Package for Social Science) 21.0 digunakan dalam menganalisis data primer hasil kuesioner untuk pengujian validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik deskriptif

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata variabel perencanaan (X1) adalah sebesar 3,6135 artinya dapat disimpulkan secara deskriptif sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa variabel perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,100 pada item Q5 (lampiran I) yaitu terkait selalu ada perubahan rencana/rancangan kegiatan saat kegiatan/proyek sedang berjalan. Rata-rata variabel Pelaksanaan Anggaran (X2) adalah sebesar 3,6520 artinya dapat disimpulkan secara deskriptif sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,038 pada item Q11 (lampiran I) terkait DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata variabel Sumber Daya Manusia (X3) adalah sebesar 3,5406 artinya dapat disimpulkan secara deskriptif sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,750 pada item Q18 (lampiran I) terkait pemberian reward and punishment tidak berjalan dengan baik. Rata-rata variabel Pengadaan Barang dan Jasa (X4) sebesar 3,1463 merupakan

variabel yang memiliki mean paling rendah di antara variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini, artinya dapat disimpulkan secara deskriptif responden memiliki persepsi ragu-ragu bahwa variabel pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap

penyerapan anggaran. Rata-rata variabel Permasalahan Koordinasi dengan Instansi Lain (X5) adalah sebesar 3,6083 artinya dapat disimpulkan secara deskriptif sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa variabel permasalahan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,775 pada item Q28 (lampiran I) terkait Sinkronisasi kegiatan proyek yang buruk antar unit/lembaga.

Sedangkan untuk variabel Serapan Anggaran sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa besar serapan anggaran sudah cukup baik (item Q31 dengan nilai rata-rata 3,563) namun ragu-ragu terkait waktu serapan anggaran sudah cukup baik sesuai dengan rencana dan tidak menumpuk di akhir tahun (item Q32 dengan nilai rata-rata 3,100).

Tabel 4.1 Ringkasan Statistik Deskriptif

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Perencanaan	80	2.17	4.67	3.6135	.61868
Pelaksanaan Anggaran	80	2.00	4.67	3.6520	.52322
SDM	80	2.00	4.75	3.5406	.66732
PBJ	80	1.00	4.71	3.1463	.70197
Koordinasi	80	1.67	5.00	3.6083	.83451
Serapan Anggaran	80	2.00	5.00	3.4813	.64848
Q31	80	1.0	5.0	3.563	.8692
Q32	80	1.0	5.0	3.100	.9757

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

4.2. Uji Kualitas Data

4.2.1. Uji Validitas

Uji validitas menggunakan korelasi antar skor masing-masing item pernyataan dengan skor total item dalam satu variabel. Nilai r hitung dihasilkan dari Pearson Correlation pada uji korelasi bivariat akan dibandingkan dengan r tabel dengan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka item pernyataan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka item pertanyaan dikatakan tidak valid. Sampel (n) dalam penelitian ini sebanyak 80 dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan $df=n-2$ ($df=78$) maka r tabel adalah 0,220 (r tabel dikutip dari lampiran di buku Ghozali 2013). Butir pernyataan yang valid dengan nilai r hitung lebih besar dari 0,220 dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, sedangkan

butir pernyataan yang tidak valid dikeluarkan dari data yang akan diolah untuk pengujian selanjutnya. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas pada Lampiran II memperlihatkan dari total 32 item pernyataan yang diuji sebanyak 31 item dinyatakan valid dengan nilai r hitung lebih dari r tabel yaitu 0,220 namun terdapat 1 item pernyataan yang tidak valid yaitu item Q8 terkait SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan nilai r hitung (Pearson Correlation) item Q8 sebesar 0.213 lebih rendah daripada r tabel ($df=78$) sebesar 0.220.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Banyak metode yang digunakan dalam penelitian, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah koefisien keandalan (Cronbach Alpha). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas data yang dilakukan dengan SPSS 21, pada Tabel 4.2 secara keseluruhan variabel nilai koefisien keandalan (Cronbach's Alpha) menunjukkan angka 0,884. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel (handal). Selain itu, variabel-variabel secara individu juga memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha lebih tinggi dari 0,60 dengan nilai terendah pada variabel Sumber Daya Manusia (X3) sebesar 0,634. Sehingga secara individu juga variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	n	Reliabilitas
Perencanaan (X ₁)	0.727	7	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (X ₂)	0.710	6	Reliabel
Sumber Daya Manusia (SDM) (X ₃)	0.634	6	Reliabel
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (X ₄)	0.853	7	Reliabel
Koordinasi dengan Instansi Lain (X ₅)	0.867	3	Reliabel
Serapan Anggaran (Y)	0.773	2	Reliabel
Keseluruhan Variabel	0.884	31	Reliabel

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

4.3. Uji Asumsi Klasik

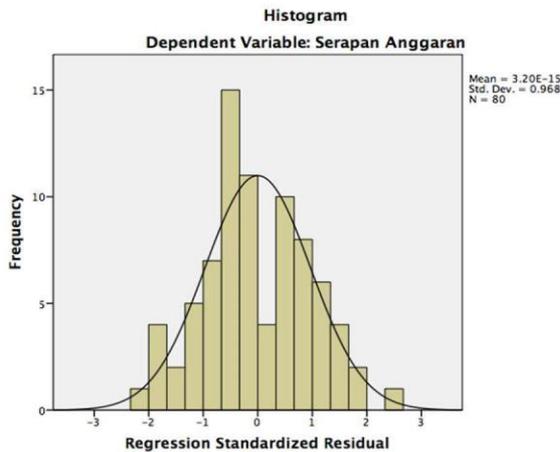
4.3.1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menganalisis grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selanjutnya pengujian normalitas juga menggunakan normal probability plots, jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Dari hasil grafik histogram Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa grafik mengikuti garis kurva normal

berarti data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Walaupun ada sedikit yang melenceng namun tidak jauh dari garis distribusi normal.

Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi

SPSS 21 4.3.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value. Batas dari tolerance value adalah > 0,10 atau nilai VIF < 10. Apabila nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa angka tolerance dari variabel bebas Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, SDM, PBJ dan Koordinasi mempunyai tolerance value > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas (dependen).

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Perencanaan	.513	1.951
Pelaksanaan Anggaran	.564	1.772
SDM	.781	1.281
PBJ	.763	1.311
Koordinasi	.811	1.234

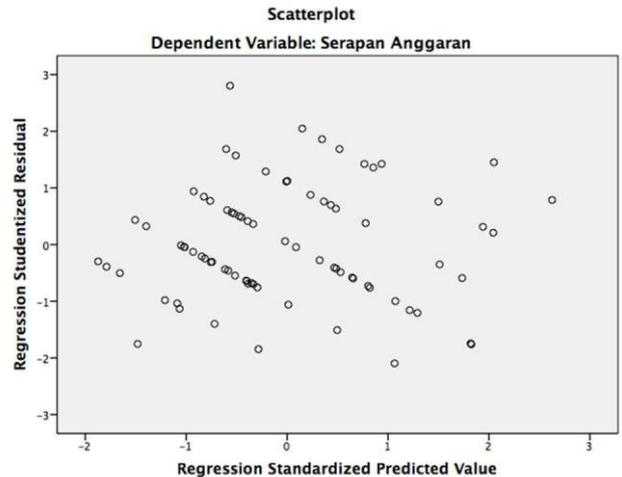
Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi

SPSS 21 4.3.3. Uji heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang

teratur maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil pengujian terdapat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas pada penyebaran titik-titik yang menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4. Pembahasan Hasil Pengujian

Hasil pengujian sebagaimana Tabel pada menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.2 Hasil uji Hipotesis

Model Dependent Variable: Serapan Anggaran (Y)	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	7.210	.395		14.939	.000
Perencanaan (X1)	-.568	.109	-.399	-3.424	.001
Pelaksanaan Anggaran (X2)	-.342	.123	-.358	-3.226	.002
SDM (X3)	-.024	.082	.143	-.1518	.133
PBJ (X4)	-.046	.079	.045	-.476	.636
Koordinasi (X5)	-.233	.064	-.219	-2.370	.020

Model persamaan regresi :
 $Y = 7,210 + (-0,399)X_1 + (-0,358)X_2 + 0,143X_3 + 0,045X_4 + (-0,219)X_5 + 0,395$
 $R^2 = 0,652$

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

Artinya hipotesis H6 dalam penelitian ini dapat diterima yaitu faktor perencanaan, faktor pelaksanaan

anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor permasalahan kebijakan, kinerja, dan permasalahan koordinasi dengan instansi lain secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK. Selain itu, variabel perencanaan, pelaksanaan anggaran, SDM, PBJ dan Koordinasi dapat menjelaskan perubahan tingkat serapan anggaran sebesar 65,2%, sedangkan 34,8% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	28.242	5	5.648	30.633	.000 ^b
Residual	13.645	74	.184		
Total	41.888	79			

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

4.4.1. Hipotesis H1 Faktor Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor perencanaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini variabel perencanaan menggunakan indikator permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam perencanaan semakin tinggi atau perencanaan semakin buruk maka semakin rendah serapan anggaran di satuan kerja tersebut. Sebagaimana Schiavo-Campo, Salvatore dan Tommasi (1999) menyatakan bahwa anggaran dengan perencanaan yang baik dapat saja dilaksanakan secara buruk, namun anggaran yang direncanakan secara buruk tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Herriyanto (2012) yang menyatakan bahwa faktor permasalahan dalam perencanaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Menurut responden permasalahan dalam perencanaan yang paling tinggi adalah terkait dengan persiapan perencanaan kegiatan serta kegiatan yang sering berubah-ubah pada saat sedang berjalan. Hal ini disebabkan kurangnya persiapan dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang. Sebagaimana hasil pengamatan penulis bahwa sebagian besar anggaran belanja yang ada di BPPK adalah berupa belanja barang yang salah satu outputnya adalah kediklatan (jumlah peserta diklat). Perencanaan dalam diklat dimulai dengan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang dilakukan pada stakeholder. Selama ini perencanaan kegiatan (diklat)

masih belum sejalan dengan perencanaan penganggarnya karena proses penyusunan anggaran sudah dimulai sejak awal tahun sebelumnya sedangkan perencanaan kegiatan dalam hal ini hasil AKD baru diperoleh pada akhir tahun sebelumnya sehingga penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja (money follow function) masih belum efektif.

Permasalahan lain yang terjadi dalam perencanaan adalah adanya tambahan pagu karena Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dari hasil pengamatan penulis selama tahun 2014 terdapat 5 satker BPPK yang mendapatkan ABT. Satu satker mendapatkan ABT pada Triwulan III sedangkan 4 satker mendapatkan ABT pada Triwulan IV. ABT yang baru disetujui pada akhir tahun anggaran mengakibatkan penyerapan anggaran akan menumpuk di akhir tahun anggaran. Dengan metode costing yang ada sampai dengan saat ini masih memungkinkan adanya sisa anggaran yang cukup signifikan sehingga apabila sisa anggaran tambahan tersebut diketahui pada akhir tahun anggaran maka akan sulit untuk direalokasi.

4.4.2. Hipotesis H2 Faktor Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor pelaksanaan anggaran terbukti berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini variabel pelaksanaan anggaran menggunakan indikator permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran semakin tinggi maka semakin rendah serapan anggaran di satuan kerja tersebut. Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran adalah pemenuhan kelengkapan dokumen tidak tepat waktu serta keterlambatan proses penagihan dan pembayaran. Dari hasil jawaban responden pada pertanyaan terbuka dapat disimpulkan beberapa penyebab keterlambatan penagihan yaitu pertama pihak penyedia barang dan jasa yang terlambat melakukan penagihan padahal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sudah diingatkan oleh PPK untuk mengajukan dokumen tagihan, kedua pihak penyedia barang dan jasa tidak mengetahui format dokumen tagihan sebagai syarat pembuatan surat permintaan pembayaran sehingga dokumen yang dibuat oleh pihak penyedia barang dan jasa harus diperbaiki yang ketiga adalah kurangnya pemahaman dari bidang lain (pelaksana kegiatan) dalam hal mekanisme pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

Selain itu adanya addendum/perubahan kontrak turut menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyerapan anggaran. Sesuai pasal 87 dan 91 Perpres 54/2010 addendum kontrak diperbolehkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; mengubah jadwal pelaksanaan. Addendum kontrak sering terjadi terutama pada pengadaan konsumsi dan laundry peserta diklat, karena perubahan jadwal diklat yang sering dan realisasi peserta diklat yang tidak selalu sesuai dengan rencana dapat menyebabkan adanya addendum kontrak.

4.4.3. Hipotesis H3 Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor Sumber Daya Manusia tidak terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sulaeman, Hamzah, dan Priyanto (2012) yang menyatakan Sumber Daya Manusia tidak menjadi permasalahan dalam penyerapan anggaran. Sumber daya manusia yang ada saat ini sudah memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Namun berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terbuka, yang jadi permasalahan dalam SDM bukanlah kompetensi melainkan jumlah SDM yang terbatas mengakibatkan pegawai merangkap banyak pekerjaan sehingga banyak pekerjaan yang terlambat diselesaikan dan pada akhirnya dapat juga menghambat dalam pelaksanaan anggaran.

4.4.4. Hipotesis H4 Faktor Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor Pengadaan Barang dan Jasa tidak terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Secara deskriptif juga responden memiliki persepsi ragu-ragu bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Herriyanto (2012) dan Siswanto dan Rahayu (2010) yang menyatakan bahwa permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Pada

saat ini di BPPK sudah terdapat Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terpusat sehingga dianggap lebih efektif dalam melakukan pengadaan. Namun dari jawaban responden pada pertanyaan terbuka terutama responden yang berada di daerah (Balai Diklat) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam PBJ adalah gagal lelang dikarenakan sepinya peminat peserta lelang di daerah sehingga lelang harus diulang.

4.4.5. Hipotesis H5 Faktor Permasalahan Koordinasi Dengan Instansi Lain berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor koordinasi dengan instansi lain terbukti berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini variabel koordinasi dengan instansi lain menggunakan indikator permasalahan yang sering terjadi dalam koordinasi dengan instansi lain, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam koordinasi dengan instansi lain semakin tinggi maka semakin rendah serapan anggaran di satuan kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agus Sulaeman, Hamzah, dan Priyanto (2012) yang menyatakan bahwa semakin buruk sinkronisasi, kekonsistenan, dan koordinasi dengan kementerian lain maka semakin buruk serapan anggaran.

Permasalahan yang terjadi dalam koordinasi dengan instansi lain seperti rencana kegiatan sering tidak konsisten atau berubah-ubah karena perubahan kegiatan pada unit/lembaga lain. Dalam hal ini satker-satker di BPPK dalam menjalankan tugasnya bergantung pada unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan karena unit tersebut sebagai stakeholder BPPK. Dinamika organisasi stakeholder juga dapat berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan BPPK sehingga apabila koordinasi buruk maka sebaik apapun perencanaan yang dibuat akan selalu berubah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu satker BPPK yang stakeholdernya sering mengalami dinamika organisasi diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan dengan unit pengguna selama ini sudah cukup baik, namun yang menjadi kendala adalah masalah kecepatan waktu dalam mengantisipasi perubahan. Masalah kecepatan waktu tersebut disebabkan perbedaan atap atau pucuk pimpinan sehingga apabila terjadi perubahan harus terlebih dahulu melewati jenjang atasan masing-masing satker sebelum dapat diputuskan.

Permasalahan lain adalah sinkronisasi kegiatan proyek yang buruk antar unit/lembaga serta buruknya

koordinasi antara suatu unit lembaga dengan lembaga lain di dalam proses perijinan dan pelaksanaan proyek. Sebagai contoh adalah izin proyek pembangunan konstruksi/gedung pada instansi terkait. Izin proyek tersebut harus ditelaah terlebih dahulu oleh instansi terkait dengan waktu yang tidak dapat diprediksi oleh sebab itu dapat menghambat jadwal perencanaan kegiatan yang telah dibuat oleh satker dan pada akhirnya berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.4.6. Faktor-Faktor Lain

Beberapa faktor-faktor lain yang belum terdapat dalam penelitian ini dan mungkin mempengaruhi penyerapan anggaran satker BPPK berdasarkan hasil wawancara yaitu:

1. Perubahan Kebijakan

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terbuka terkait faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran sebanyak 24 responden (30%) menyatakan bahwa perubahan kebijakan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pengeluaran secara nasional seperti penghematan, optimalisasi dan efisiensi. Seperti pada tahun 2014 Triwulan kedua terdapat kebijakan penghematan/pemotongan anggaran yang berpengaruh terhadap kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Komitmen

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terbuka terkait faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran sebanyak 20 responden (25%) menyatakan bahwa Faktor komitmen dari pemimpin dan pelaksana kegiatan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Komitmen pemimpin satker (KPA) dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya berpengaruh terhadap terselenggara atau tidaknya suatu kegiatan. Kemudian komitmen dari pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah direncanakan berpengaruh terhadap waktu pencairan anggaran. Selain itu juga komitmen pelaksana kegiatan untuk segera mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan berpengaruh terhadap pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan

anggaran belanja barang dan belanja modal pada satuan kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor permasalahan koordinasi dengan instansi lain sebesar 65,2%. Sisanya sebesar 34,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
2. Faktor permasalahan dalam perencanaan terbukti secara statistik berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK. Dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam perencanaan semakin tinggi atau perencanaan semakin buruk maka semakin rendah serapan anggaran.
3. Faktor permasalahan dalam pelaksanaan anggaran terbukti secara statistik berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK. Dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran semakin tinggi maka semakin rendah serapan anggaran satuan kerja.
4. Faktor permasalahan koordinasi dengan instansi lain terbukti secara statistik berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK. Dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam koordinasi dengan instansi lain semakin tinggi maka semakin rendah serapan anggaran.
5. Faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor permasalahan kebijakan, kinerja, dan permasalahan koordinasi dengan instansi lain terbukti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

6. Berdasarkan pendapat responden terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yaitu faktor perubahan kebijakan baik kebijakan pengeluaran secara nasional dan faktor komitmen dari pemimpin dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang dapat dimanfaatkan oleh satker dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif yaitu :

1. Dalam hal perencanaan sebaiknya perencanaan kegiatan dipersiapkan secara matang mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan, anggaran yang dibutuhkan serta jadwal pelaksanaannya oleh para pelaksana kegiatan dan perencanaan kegiatan tersebut harus sejalan dengan perencanaan penganggarnya agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh anggaran yang belum tersedia atau harus menunggu anggaran yang perlu direvisi. Satker juga dapat memaksimalkan penggunaan sarana teknologi informasi dalam meningkatkan kecepatan memperoleh informasi dari stakeholder sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan seperti penyebaran kuesioner analisis kebutuhan diklat kepada stakeholder secara online. Perubahan dalam perencanaan pelaksanaan anggaran harus selalu diupdate secara berkala, agar apabila terjadi kendala dapat segera diatasi dan tidak menghambat penyerapan anggaran satker.
2. Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran seperti keterlambatan penagihan sebaiknya pengelola keuangan di satker selain menegur penyedia barang dan jasa yang terlambat melakukan penagihan tetapi juga secara aktif mengedukasi para penyedia barang dan jasa mengenai format dokumen penagihan yang dipersyaratkan agar dokumen penagihan tidak bermasalah dan dapat langsung diproses untuk membuat surat permintaan pembayaran. Pengelola keuangan juga harus secara aktif mengedukasi pelaksana kegiatan dalam mekanisme pertanggungjawaban anggaran, agar setelah kegiatan selesai pelaksana kegiatan dapat segera memberikan dokumen terkait

- pencairan anggaran kepada pengelola keuangan.
3. Keterbatasan SDM dalam pengelola keuangan mengakibatkan penumpukan pekerjaan termasuk dalam hal pelaksanaan anggaran. Dalam membagi pegawai baru atau mutasi pegawai sebaiknya mempertimbangkan beban kerja masing-masing satker, tidak membagi pegawai secara rata pada semua satker karena beban kerja yang dimiliki masing-masing satker berbeda.
4. Meningkatkan komitmen para pimpinan dan pelaksana kegiatan agar kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan. Sebaiknya diadakan rapat rutin antara pengelola keuangan, perencana kegiatan serta pelaksana kegiatan untuk membahas perubahan rencana kegiatan, perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Jika ada perubahan rencana kegiatan dapat diinformasikan jauh hari sebelum kegiatan dimulai kepada pengelola keuangan agar anggaran yang diperlukan dapat disiapkan.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi rutin dengan instansi lain terutama stakeholder agar perubahan yang terjadi pada stakeholder dapat diantisipasi dan diketahui jauh-jauh hari. Dalam hal ini masing-masing pimpinan puncak dapat berperan lebih untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan.
6. Pengambilan sampel responden yang lebih banyak dari semua satker terutama responden pimpinan satker (KPA) sebagai pengambil keputusan agar data yang digunakan dalam penelitian lebih menggambarkan kondisi satker yang sebenarnya.
7. Penambahan variabel dan indikator lain yang belum ada pada penelitian ini seperti sesuai dengan jawaban responden pada pertanyaan terbuka faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor kebijakan baik kebijakan secara nasional, instansi lain ataupun kebijakan para pimpinan satker serta faktor komitmen dari pimpinan dan pelaksana kegiatan.
8. Melakukan analisis yang berbeda atas data yang berasal dari BDK, Pusdiklat, STAN dan Sekretariat BPPK karena proses bisnis yang

berbeda dan permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran juga mungkin berbeda.

9. Menggunakan data capaian penyerapan anggaran masing-masing satker dalam analisis data penelitian dikaitkan dengan rencana kegiatan dan rencana penyerapan anggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Akadira, Tora. 2010. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Direktorat Jenderal Manajemen Dasar dan Menengah. Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

Jurnal

- Sulaeman, Agus Sunarya; Andy Prasetiawan Hamzah dan Rame Priyanto. 2012. Penyerapan Anggaran Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi. Jurnal BPPK Vol.4 tahun 2012 hal 18-37.

Karya Ilmiah

- Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja K/L di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
- Supranggono, Linggo. 2009. Evaluasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Kementerian Negara/Lembaga. Skripsi. Tangerang Selatan: STAN

Naskah dari Internet

- Schiavo-Campo, Salvatore, and Daniel Tommasi. 1999. Managing Government Expenditure. Manila: Asian Development Bank.
- Siswanto, Adrianus Dwi dan Sri Lestari Rahayu. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. BKF Quick Research: tersedia pada

website:

<http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/ede-f-konten-viewmobile.asp?id=20100920095054911292040>

- Sopian, Abu. 2014. Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diunduh dari http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/204_Strategi%20Pengadaan%20Barang.pdf pada tanggal 1 Agustus 2015

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2015. Struktur Organisasi BPPK. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/profil/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 25 April 2015

Naskah Produk Kebijakan

- _____. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpes Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia.

_____. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pemerintah Republik Indonesia.

_____. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana

Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas. Pemerintah Republik Indonesia.

_____. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014. Pemerintah Republik Indonesia.

LAMPIRAN I

Tabel Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Item	Indikator	Rujukan
Perencanaan (X ₁)	Q1	Anggaran kegiatan diblokir	Hendris Herriyanto (2012)
	Q2	Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek	
	Q3	Kurangnya persiapan dalam pembuatan rencana/rancangan kegiatan	
	Q4	Rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan TOR, RAB dan data pendukung	
	Q5	Selalu ada perubahan rencana/rancangan kegiatan saat kegiatan/proyek sedang berjalan	
	Q6	Adanya tambahan pagu karena ABT, kelebihan realisasi PNBPN, tambahan/luncuran PHLN/PHDN, penerimaan hibah.	
	Q7	Pelaksanaan kegiatan/proyek tidak melihat rencana/jadwal yang tercantum dalam halaman 3 DIPA atau Rencana Anggaran Belanja (RAB)	
Pelaksanaan Anggaran (X ₂)	Q8	SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan.	Agus Sunarya Sulaeman, Andy Prasetiawan Hamzah, Rame Priyanto (2012)
	Q9	Salah dalam penentuan akun	
	Q10	Adanya addendum kontrak	
	Q11	DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan	
	Q12	Pemenuhan kelengkapan dokumen sering tidak tepat waktu	
	Q13	Keterlambatan proses penagihan dan pembayaran	
	Q14	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti melalui Ganti UP	
Sumber Daya Manusia (X ₃)	Q15	SDM pelaksana pengadaan kurang kompeten	Hendris Herriyanto (2012)
	Q16	Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbang resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima	
	Q17	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami proses pengelolaan anggaran	
	Q18	Pemberian reward and punishment bagi para pengelola anggaran/satker tidak berjalan dengan baik	
	Q19	Pejabat/pegawai pengelola keuangan sering mengalami mutasi	
	Q20	Terdapat kebiasaan seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin, mengerjakan pekerjaan di menit terakhir	
Pengadaan Barang dan Jasa (X ₄)	Q21	Jadwal pelaksanaan lelang yang disusun tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan.	Siswanto dan Rahayu (2010)
	Q22	Terlambat dalam pengesahan dokumen pengumuman lelang.	
	Q23	SK Penunjukan panitia pelaksana kegiatan swakelola belum ditetapkan	
	Q24	Keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang bersertifikat	
	Q25	Permasalahan terkait pengadaan peralatan/mesin seperti peralatan/mesin yang diperlukan tidak tersedia/sulit didapat, peralatan/mesin yang dipesan terlambat datang, peralatan/mesin yang diterima tidak sesuai spesifikasi.	
	Q26	Proses penawaran, kontrak, dan pengadaan barang/jasa, dan kegiatan dilakukan sangat lambat dan berjenjang	
	Q27	Kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melalui survei pasar.	
Koordinasi dengan Sektor Lain (X ₅)	Q28	Sinkronisasi kegiatan proyek yang buruk antar unit/lembaga	Agus Sunarya Sulaeman, Andy Prasetiawan Hamzah, Rame Priyanto (2012)
	Q29	Rencana Kegiatan sering tidak konsisten atau berubah-ubah karena perubahan kegiatan pada unit/lembaga lain	
	Q30	Sulitnya koordinasi antara suatu unit lembaga dengan lembaga lain di dalam proses perijinan dan pelaksanaan proyek	
Serapan Anggaran (Y)	Q31	Besarnya serapan anggaran sudah baik	Agus Sunarya Sulaeman, Andy Prasetiawan Hamzah, Rame Priyanto (2012)
	Q32	Waktu serapan anggaran sudah baik sesuai dengan rencana	

Sumber : diolah dari landasan teori dan penelitian terdahulu

LAMPIRAN II
Statistik Deskriptif Jawaban Responden

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Perencanaan	80	2.17	4.67	3.6135	.61868
Q1	80	1.0	5.0	3.375	1.2052
Q2	80	1.0	5.0	3.300	1.0838
Q3	80	1.0	5.0	3.725	1.0185
Q4	80	1.0	5.0	3.425	.9517
Q5	80	2.0	5.0	4.100	.7730
Q6	80	1.0	5.0	3.700	.8627
Q7	80	1.0	5.0	3.438	1.0043
Pelaksanaan Anggaran	80	2.00	4.67	3.6520	.52322
Q8	80	1.0	4.0	2.463	.9406
Q9	80	1.0	5.0	3.125	1.0599
Q10	80	1.0	5.0	3.800	.8175
Q11	80	1.0	5.0	4.038	.8026
Q12	80	1.0	5.0	3.763	.9174
Q13	80	1.0	5.0	3.713	.9572
Q14	80	1.0	5.0	3.475	.9543
SDM	80	2.00	4.75	3.5406	.66732
Q15	80	1.0	4.0	2.725	.8109
Q16	80	1.0	5.0	3.563	1.0655
Q17	80	1.0	5.0	3.450	.9665
Q18	80	2.0	5.0	3.750	.9209
Q19	80	1.0	5.0	2.963	.9473
Q20	80	1.0	5.0	3.400	.9359
PBJ	80	1.00	4.71	3.1463	.70197
Q21	80	1.0	5.0	3.100	.9085
Q22	80	1.0	5.0	3.175	.8682
Q23	80	1.0	5.0	2.900	.8802
Q24	80	1.0	5.0	3.175	1.0406
Q25	80	1.0	5.0	3.200	1.1069
Q26	80	1.0	5.0	3.250	.9209
Q27	80	1.0	5.0	3.225	.9933
Koordinasi	80	1.67	5.00	3.6083	.83451
Q28	80	2.0	5.0	3.775	.9137
Q29	80	1.0	5.0	3.463	.9539
Q30	80	2.0	5.0	3.588	.9506
Serapan Anggaran	80	2.00	5.00	3.4813	.64848
Q31	80	1.0	5.0	3.563	.8692
Q32	80	1.0	5.0	3.100	.9757

LAMPIRAN III Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

Item	Indikator	r Tabel (df=78)	r Hitung	Validitas
Variabel Perencanaan (X₁)				
Q1	Anggaran kegiatan diblokir	0.220	0.576	Valid
Q2	Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek	0.220	0.583	Valid
Q3	Kurangnya persiapan dalam pembuatan rencana/rancangan kegiatan	0.220	0.769	Valid
Q4	Rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan data pendukung	0.220	0.680	Valid
Q5	Selalu ada perubahan rencana/rancangan kegiatan	0.220	0.472	Valid
Q6	Adanya tambahan pagu	0.220	0.517	Valid
Q7	Pelaksanaan kegiatan/proyek tidak melihat rencana/jadwal yang tercantum dalam halaman 3 DIPA	0.220	0.697	Valid
Variabel Pelaksanaan Anggaran (X₂)				
Q8	SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan	0.220	0.213	Tidak Valid
Q9	Salah dalam penentuan akun	0.220	0.728	Valid
Q10	Adanya addendum kontrak	0.220	0.704	Valid
Q11	DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan	0.220	0.460	Valid
Q12	Pemenuhan kelengkapan dokumen sering tidak tepat waktu	0.220	0.644	Valid
Q13	Keterlambatan proses penagihan dan pembayaran	0.220	0.552	Valid
Q14	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti melalui Ganti UP	0.220	0.629	Valid
Variabel Sumber daya Manusia (SDM) (X₃)				
Q15	SDM pelaksana pengadaan kurang kompeten	0.220	0.490	Valid
Q16	Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbang resiko	0.220	0.680	Valid
Q17	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami proses pengelolaan anggaran	0.220	0.682	Valid
Q18	Pemberian reward and punishment tidak berjalan dengan baik	0.220	0.669	Valid
Q19	Pejabat/pegawai pengelola keuangan sering mengalami mutasi	0.220	0.554	Valid
Q20	Terdapat kebiasaan seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin	0.220	0.477	Valid
Variabel Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (X₄)				
Q21	Jadwal pelaksanaan lelang yang disusun tidak realistis	0.220	0.711	Valid
Q22	Terlambat dalam pengesahan dokumen pengumuman lelang.	0.220	0.717	Valid
Q23	SK Penunjukan panitia pelaksana kegiatan swakelola belum ditetapkan	0.220	0.677	Valid
Q24	Keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang bersertifikat	0.220	0.710	Valid
Q25	Permasalahan terkait pengadaan peralatan/mesin	0.220	0.788	Valid
Q26	Proses penawaran, kontrak, dan pengadaan barang/jasa, dan kegiatan dilakukan sangat lambat dan berjenjang	0.220	0.790	Valid
Q27	Kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	0.220	0.717	Valid
Variabel Koordinasi dengan Instansi Lain (X₅)				
Q28	Sinkronisasi kegiatan proyek yang buruk antar unit/lembaga	0.220	0.846	Valid
Q29	Rencana Kegiatan sering tidak konsisten atau berubah-ubah	0.220	0.930	Valid
Q30	Sulitnya koordinasi antara suatu unit lembaga	0.220	0.889	Valid
Variabel Serapan Anggaran (Y)				
Q31	Besarnya serapan anggaran sudah baik	0.220	0.892	Valid
Q32	Waktu serapan anggaran sudah baik sesuai dengan rencana	0.220	0.915	Valid

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21